



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ERUPSI
GUNUNGAPI SINABUNG DI KABUPATEN KARO TAHUN 2018-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dengan masih ditetapkan aktivitas erupsi Gunungapi Sinabung berstatus Awas (level IV) serta sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 160 B tahun 2015 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2017;
- b. bahwa dalam rangka pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali di wilayah pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo diperlukan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Tahun 2018 -2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Tahun 2018-2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1553);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
13. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ERUPSI GUNUNGAPI SINABUNG DI KABUPATEN KAROTAHUN 2018-2019.

Pasal 1

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunungapi Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo serta pihak yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo.

Pasal 2

Rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 30 Mei 2018

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR 19

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCABENCANA
ERUPSI GUNUNGAPI SINABUNG DI
KABUPATEN KARO TAHUN 2018-2019

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali pasca bencana erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara diperlukan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah Erupsi Gunung Sinabung. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah terdampak, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, yang dalam pelaksanaannya akan melibatkan peran berbagai pihak yang menyediakan sumber daya. Pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Karo dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo dan berkoordinasi dengan BNPB ditingkat nasional serta BPBD Provinsi Sumatera Utara ditingkat Provinsi.

Untuk efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Erupsi Gunung Sinabung yang akan dilaksanakan oleh berbagai pihak, maka perlu disusun dan ditetapkan suatu dokumen Rencana yang didasarkan kepada hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana. Rencana tersebut merupakan acuan dalam menyampaikan presepsi dan langkah penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi dari seluruh pihak yang terkait.

Sesuai dengan sifat Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pascabencana, maka penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung Tahun 2018-2019 di wilayah Kabupaten Karo ini dilakukan melalui suatu proses koordinasi Pemerintah Kabupaten Karo dengan Kementerian/Lembaga dari sektor terdampak, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Koordinasi telah dilaksanakan sejak pelaksanaan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana serta pengkajian kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Namun demikian sebagaimana halnya suatu dokumen perencanaan, maka Rencana terbuka untuk direvisi apabila dikemudian hari dinilai perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang terkini demi pencapaian tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana yang efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akhir kata kami memberikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang terkait yang telah memberikan bantuan dan fasilitasi demi tersusunnya dan ditetapkannya Rencana ini.

RINGKASAN EKSEKUTIF
RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
ERUPSI GUNUNGAPI SINABUNG DI KAB. KARO
TAHUN 2018-2019

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah terdampak, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, dan telah ditetapkannya Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara 2015-2017 di Jakarta tanggal 24 Juli 2015 oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Perubahan Kesatu Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara 2016-2017 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 26 April 2016 oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Rencana ini disusun sebagai tindak lanjut atas dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan rencana aksi ini diperlukan mengingat peningkatan aktivitas erupsi Gunung Sinabung yang terusterjadidan sampai saat ini masih dalam status Awas (level IV) serta mengakibatkan perluasan cakupan daerah terdampak bencana.

Ditingkatkannya status Gunungapi Sinabung menjadi Awas disertai dengan bertambahnya area yang harus dikosongkan dalam radius 7 km di sisi tenggara dan selatan dari puncak kawah Gunung Sinabung menyebabkan jumlah pengungsi terus bertambah. Selain penanganan darurat bencana, telah dilakukan penanganan pascabencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap warga yang direlokasi sesuai dengan rekomendasi PVMBG.

Kerusakan yang diakibatkan erupsi Gunungapi Sinabung tersebut berdampak pada sector permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan layanan umum di wilayah terdampak bencana. Mengingat erupsi Gunungapi Sinabung sampai saat ini masih terus berlangsung, maka penghitungan dampak erupsi secara pasti sulit dihitung. Hasil perhitungan sementara kerusakan dan kerugian akibat erupsi Gunungapi Sinabung sejak September 2013 hingga Mei 2015 (sebelum ditetapkan status Awas) diperkirakan Rp1,80 triliun, terdiri dari nilai

kerusakan sebesar Rp578,99 miliar dan nilai kerugian sebesar Rp1,23 triliun. Kerusakan dan kerugian di sektor ekonomi produktif meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, pariwisata, perikanan, UKM, dan industri adalah yang paling besar, yaitu lebih dari Rp1,14 triliun. Sedangkan kerusakan dan kerugian di sektor permukiman sebesar Rp505,9 miliar, infrastruktur Rp 83,93 miliar, sosial Rp53,43 miliar, dan lintas sektor Rp18,26 miliar. Namun berdasarkan kondisi terkini dari hasil kajian dan penghitungan untuk pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi dibutuhkan dana sebesar ± Rp1.059.491.618.812,-.

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi dan banjirlahar hujan Gunung Sinabung direncanakan dalam tiga tahap, yaitu: (1) Tahap I, relokasi dilakukan ke Siosar (370 KK) sudah selesai dilaksanakan untuk 3 (tiga) desa terdampak yaitu Desa Bekerah, Simacem dan Sukameriah. (2) Tahap kedua, dilakukan secara mandiri untuk 4 (empat desa) yakni Desa Berastepu, Gurukinayan, Gamber dan Kutatonggal sebanyak 1.682 KK dan pemenuhan kebutuhan relokasi mandiri untuk 220 KK warga empat desa yang berasal dari Desa Gurukinayan 33 KK, Kutatonggal 5 KK, Berastepu 163 KK dan Gamber 19 KK dan Sektor Infrastruktur, Serta Sektor Sosial Ekonomi; dan (3) Tahap Ketiga pemenuhan kebutuhan relokasi untuk ± 1.038 KK warga tiga desa dan satu dusun, yang berasal dari Desa Sigarang-garang 423 KK, Desa Sukanalu 332 KK, Desa Mardinding 263 KK dan Dusun lau kawat 20 KK. Total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah ± Rp 1.059.491.618.812,-.

Dari seluruh nilai kebutuhan, sektor permukiman merupakan hal prioritas, dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp 253,8 miliar. Kebutuhan permukiman dikhususkan untuk relokasi 1.258 KK dengan rincian sebagai berikut :

1. Lanjutan Tahap II Relokasi Mandiri 220 KK untuk Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kutatonggal, Desa Gamber;
2. Penanganan pemenuhan kebutuhan Relokasi dan Rekonstruksi tahap II Lanjutan; dan
3. Relokasi Tahap III di Siosar ±1.038 KK untuk Desa Sigaranggarang, Desa Sukanalu, Desa Mardinding dan Dusun Lau Kawar. Tidak tertutup masih akan potensi perubahan data masyarakat mengingat yang diverifikasi masih data penduduk yang berdomisili di dalam desa, sedangkan data penduduk yang berdomisili di luar desa belum diverifikasi.

Sumber pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana erupsi Gunungapi Sinabung berasal dari APBN. Mekanisme dan prosedur pendanaan pemerintah dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan serta aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang undang dimaksud. Setiap Kementerian/Lembaga sesuai dengan sharingnya akan langsung menyampaikan bantuan pendanaannya kepada Pemerintah Kabupaten terkait sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berkenaan dengan bentuk kegiatannya masing-masing dan alokasi pendanaannya.

Seluruh rangkaian penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sejak perencanaan kegiatan termasuk identifikasi dan penghimpunan sumber pembiayaan, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pengorganisasian pelaksana kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan termasuk pengawasan baik yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah dan/atau pemerintah daerah sampai kepada langkah pengalihan hasil rehabilitasi dan rekonstruksi kepada program pembangunan yang berkelanjutan pada daerah tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

Pemantauan diperlukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan evaluasi dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana. Pelaporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Tahun 2015 Relokasi Tahap Pertama (Siosar) sebanyak 370 KK telah selesai dilaksanakan dengan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB. Pada pelaksanaannya, masih ada 3 sektor yang membutuhkan penanganan lebih lanjut yaitu sektor ekonomi, sosial dan lintas sektoral. Selanjutnya Relokasi Tahap kedua (Relokasi Mandiri) terhadap 1.683 KK masih dalam proses penyelesaian kegiatan dilapangan, disamping itu kebutuhan diluar Hunian Tetap (Huntap) dimasing-masing sektor (infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor) masih dalam skenario kebutuhan sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Untuk kegiatan relokasi tahap III di Siosar sebanyak ± 1.038 KK, masih belum terlaksana berawal dari permasalahan lahan dan masih diperlukan justifikasi teknis karena perubahan jumlah unit rumah relokasi. Tidak tertutup masih akan potensi perubahan data masyarakat mengingat yang diverifikasi masih data penduduk yang berdomisili di dalam desa, sedangkan data penduduk yang berdomisili di luar desa belum diverifikasi. Beberapa kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertuang dalam renaksi terdahulu sudah tidak relevan lagi saat ini untuk dilaksanakan karena faktor perubahan kebijakan dan masalah/kendala di lapangan, disamping itu jangka waktu rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunungapi Sinabung tahun 2015-2017 telah berakhir pada Juli 2017.

Guna menindaklanjuti permasalahan di atas diperlukan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunungapi Sinabung 2018-2019.

1.2 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Tahun 2018 – 2019, disusun sebagai rencana program dan kegiatan dalam rangka :

1. Memperbaharui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunung Sinabung sesuai dengan perkembangan yang ada.

2. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunungapi Sinabung yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Karo dan dibahas bersama Pemerintah (Kementerian/Lembaga), dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya mengenai rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN, APBD dan sumber lain yang sah secara efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Kebutuhan permukiman dikhususkan untuk merelokasi ± 1.258 KK dengan rincian sebagai berikut :

1. Lanjutan Tahap II Relokasi Mandiri sejumlah 220 KK untuk Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal dan Desa Gamber;
2. Penanganan pemenuhan kebutuhan Relokasi dan Rekonstruksi tahap II Lanjutan; dan
3. Relokasi Tahap III sejumlah ± 1.038 KK untuk Desa Sigarang-garang, Desa Sukanalu, Desa Mardinding dan Dusun Lau Kawar.

1.3 Ruang Lingkup

Secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, agar setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun satu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan pascabencana.

Sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi :

- a. Lanjutan Tahap II Relokasi Mandiri 220 KK untuk Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kutatonggal, dan Desa Gamber;
- b. Penanganan pemenuhan kebutuhan Relokasi dan Rekonstruksi tahap II (Relokasi Mandiri); dan

- c. Relokasi Tahap III di Siosar ±1.038 KK untuk Desa Sigarang-garang, Desa Sukanalu, Desa Mardinding dan Dusun Lau Kawar;

Beberapa aspek penanganan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi :

1. Aspek kemanusiaan, antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat serta perguruan tinggi;
2. Aspek permukiman, terdiri dari relokasi, perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
3. Aspek infrastruktur, terdiri dari perbaikan sarana prasarana umum, pembangunan kembali sarana prasarana umum, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
4. Aspek ekonomi, terdiri dari pemulihan ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, peternakan, pariwisata, dan perdagangan;
5. Aspek sosial, terdiri dari pemulihan konstruksi sosial, pemulihan kearifan lokal dan tradisi masyarakat, pemulihan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
6. Aspek lintas sektor antara lain terdiri dari pemulihan dan peningkatan kegiatan yang meliputi tata pemerintahan, ketertiban, keamanan dan perbankan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2019 terdiri dari enam bab yaitu :

a. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunungapi Sinabung, maksud dan tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika penulisan;

b. Bab II Kondisi Umum Wilayah dan Kejadian Bencana

Bab ini menguraikan gambaran singkat karakteristik wilayah sebelum kejadian bencana, yang ditinjau dari kondisi geografi, demografi, sosial, ekonomi, dan infrastruktur;

c. Bab III Review Kebutuhan Pemulihan Pasca Bencana

Bab ini menguraikan evaluasi dan kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunungapi Sinabung yang terdiri dari penilaian kerusakan dan kerugian, penilaian gangguan akses, gangguan fungsi, dan meningkatnya risiko. Hasil kajian kebutuhan pemulihan yang dianalisis dalam lima sektor, yaitu permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor.

d. Bab IV Prinsip dan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bab ini menguraikan prinsip dasar, kebijakan, ruang lingkup, serta strategi rehabilitasi dan rekonstruksi;

e. Bab V Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Bab ini menguraikan proses perencanaan dan pendanaan, mekanisme pelaksanaan anggaran, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, kelembagaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemantauan dan evaluasi, serta kesinambungan pemulihan berbasis pengurangan risiko bencana.

f. Bab VI Penutup

Bab ini menjelaskan bahwa Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan acuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih harus dijabarkan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya oleh setiap pihak pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunungapi Sinabung.

BAB II

KONDISI UMUM WILAYAH & KEJADIAN BENCANA

2.1. Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Karo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki nilai strategis sebagai penyangga pariwisata di Provinsi Sumatera Utara dengan jarak sekitar 75,7 Km dari pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara di Medan. Secara umum Kabupaten Karo merupakan wilayah yang dinamis berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik dibidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.

Sementara itu Kabupaten Karo merupakan daerah rawan bencana gempa vulkanik karena memiliki dua gunung berapi aktif yaitu Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak. Gunung Sinabung yang terakhir kali meletus pada tahun 1600an dan pada tahun 2010 kembali aktif serta akhirnya meletus pada tahun 2013 hingga sekarang aktivitas letusannya masih berlangsung. Sementara itu untuk letusan gunung berapi merupakan suatu aktivitas vulkanik yang sering disebut dengan istilah erupsi. Bisa dikatakan hampir semua aktivitas letusan gunung berapi selalu berkaitan dengan zona kegempaan aktif, hal ini terjadi akibat hubungan antar batas lempeng yang memiliki tekanan yang sangat tinggi dan bersuhu lebih dari 1.000 Derajat Celcius sehingga dapat melelehkan material bebatuan di sekitarnya dan menjadi Magma.

Magma terkumpul di dapur magma yang terletak dibawah gunung berapi, ketika dapur magma sudah penuh, maka magma akan terdorong keluar dari gunung berapi. Magma yang sudah keluar ini disebut dengan Lava yang memiliki suhu 700 hingga 1.200 derajat Celcius. Ketika meletus, sebuah gunung berapi dapat melontarkan berbagai material hingga puluhan kilometer jauhnya, tidak hanya itu, awan panas dan gas beracun juga kerap kali menjadi ancaman serius bagi penduduk yang bertempat tinggal tak jauh dari letusan. Letusan gunung berapi merupakan salah satu bencana alam yang banyak menimbulkan berbagai kerusakan dengan total kerugian yang besar karena menghancurkan areal pemukiman dan pertanian penduduk, belum lagi dampak lainnya seperti pencemaran udara oleh gas beracun serta memicu penyebab banjir lahar hujan yang dapat merusak infrastruktur umum.

2.2. Kondisi Fisik

Gunung Sinabung (2.460 m dpl) terletak di Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Setelah 400 tahun dalam keadaan stabil (semenjak tahun 1605), Gunung Sinabung akhirnya aktif kembali pada tahun 1975 -1976 dengan erupsi-erupsi kecil. Erupsi besar terjadi pada tanggal 29 Agustus 2010 dimana status Gunung Sinabung naik menjadi tingkat IV Awam (level IV) dan mengakibatkan 12.000 jiwa menggungsi. Sejak tanggal 23 September 2010 statusnya diturunkan menjadi Siaga (level III), dan kembali diturunkan menjadi Waspada (level II) pada tanggal 7 Oktober 2010.

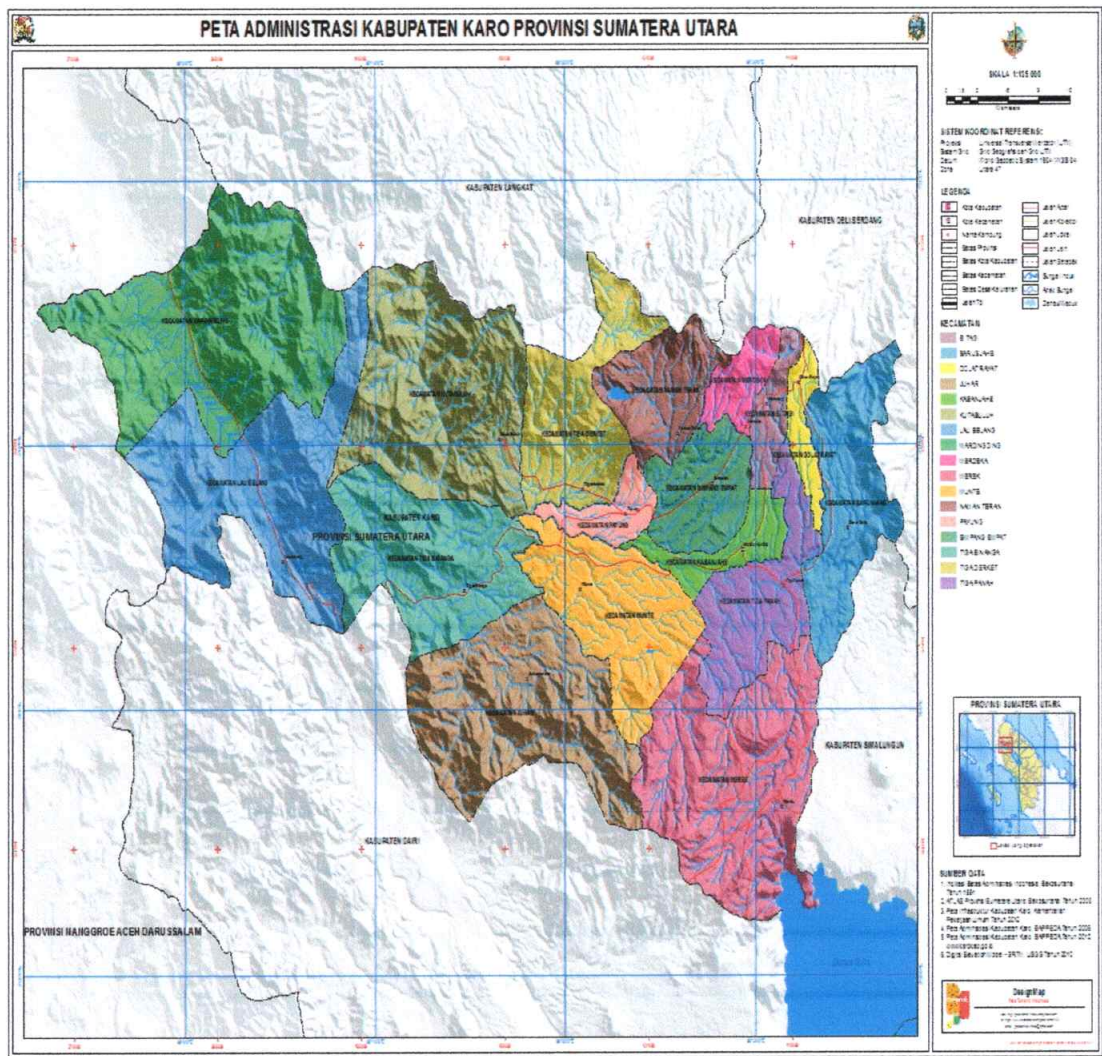
Pemantauan Gunung Sinabung, menyampaikan tiga erupsi terjadi pada tanggal 2 Desember 2017 dalam kurun waktu 20 menit. Erupsi pertama terjadi pukul 07.40 WIB dengan tinggi kolom abu 2.500 meter, dan disertai guguran awan panas sejauh 3.000 meter serta angin ke arah selatan. Erupsi juga menimbulkan gempa selama 357 detik. Erupsi kedua terjadi sekitar Pukul 07.48 WIB dengan tinggi kolom abu 1.300 meter dan lama gempa 707 detik, serta angin lemah ke arah timur laut. Kemudian erupsi ketiga terjadi sekitar Pukul 08.00 WIB, dengan kembali menyemburkan abu vulkanik setinggi 1.800 meter. Untuk yang ketiga, lama gempa 379 detik dan angin lemah ke arah timur laut.

Disebutkan, saat ini Gunung Sinabung masih berstatus level IV atau Awam. Masyarakat diimbau agar menjauhi zona-zona bahaya karena masih berpotensi terjadi awan panas dan guguran lava serta erupsi. Jika terjadi erupsi, masyarakat diimbau menggunakan masker dan mengikuti arahan dari pihak terkait, Hingga dokumen ini tersusun, status Gunungapi Sinabung masih dalam level Awam (level IV).

2.2.1. Letak Luas dan Batas Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Karo dapat dianalisis secara geografis, astronomis, topografis, klimatologis, geologis dan hidrologis. Secara geografis, Kabupaten Karo berada pada posisi strategis antara 6 (enam) kabupaten dalam Provinsi Sumatera Utara, 1 (satu) Provinsi NAD (Nangroe Aceh Darusallam) dan terletak pada jajaran Dataran Tinggi Bukit Barisan. Posisi strategis tersebut dapat dilihat pada batas wilayah administrasi seluas 2.127,25 Km² (212.725 Ha) yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kab. Langkat dan Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah : Kab. Dairi dan Kab. Samosir
- Sebelah : Kab. Deli Serdang dan Kab. Simalungun
- Sebelah : Kab. Aceh Tenggara (Provinsi Nangroe Aceh



Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Karo

Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Lau Baleng merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah secara berturut-turut masing-masing sebesar 267,11 Km² atau 12,56 % dan 252,60 Km² atau 11,87 % dari luas wilayah Kabupaten Karo. Sedangkan Kecamatan Berastagi mempunyai luas wilayah paling kecil yaitu 30,50 Km² atau 1,43 % dari luas wilayah Kabupaten Karo. Secara rinci, luas masing-masing wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Luas Daerah Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Rasio Terhadap Total (%)
1	Mardingding	267,11	12,56
2	Laubaleng	252,60	11,87
3	Tigabinanga	160,38	7,54
4	Juhar	218,56	10,27
5	Munte	125,64	5,91
6	Kutabuluh	195,70	9,20
7	Payung	47,24	2,22
8	Tiganderket	86,76	4,08
9	Simpang Empat	93,48	4,39
10	Naman Teran	87,82	4,13
11	Merdeka	44,17	2,08
12	Kabanjahe	44,65	2,10
13	Berastagi	30,50	1,43
14	Tigapanah	186,84	8,78
15	Dolat Rayat	32,25	1,52
16	Merek	125,51	5,90
17	Barusjahe	128,04	6,02
Jumlah		2.127,25	100,00

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka 2017

Secara administratif, Kabupaten Karo terdiri dari 17 kecamatan, 259 desa dan 10 kelurahan. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Tigapanah yaitu sebanyak 26 desa sedangkan kecamatan Dolatrayat merupakan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit yaitu

hanya memiliki 7 desa. Untuk lebih jelasnya, jumlah desa masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.2.

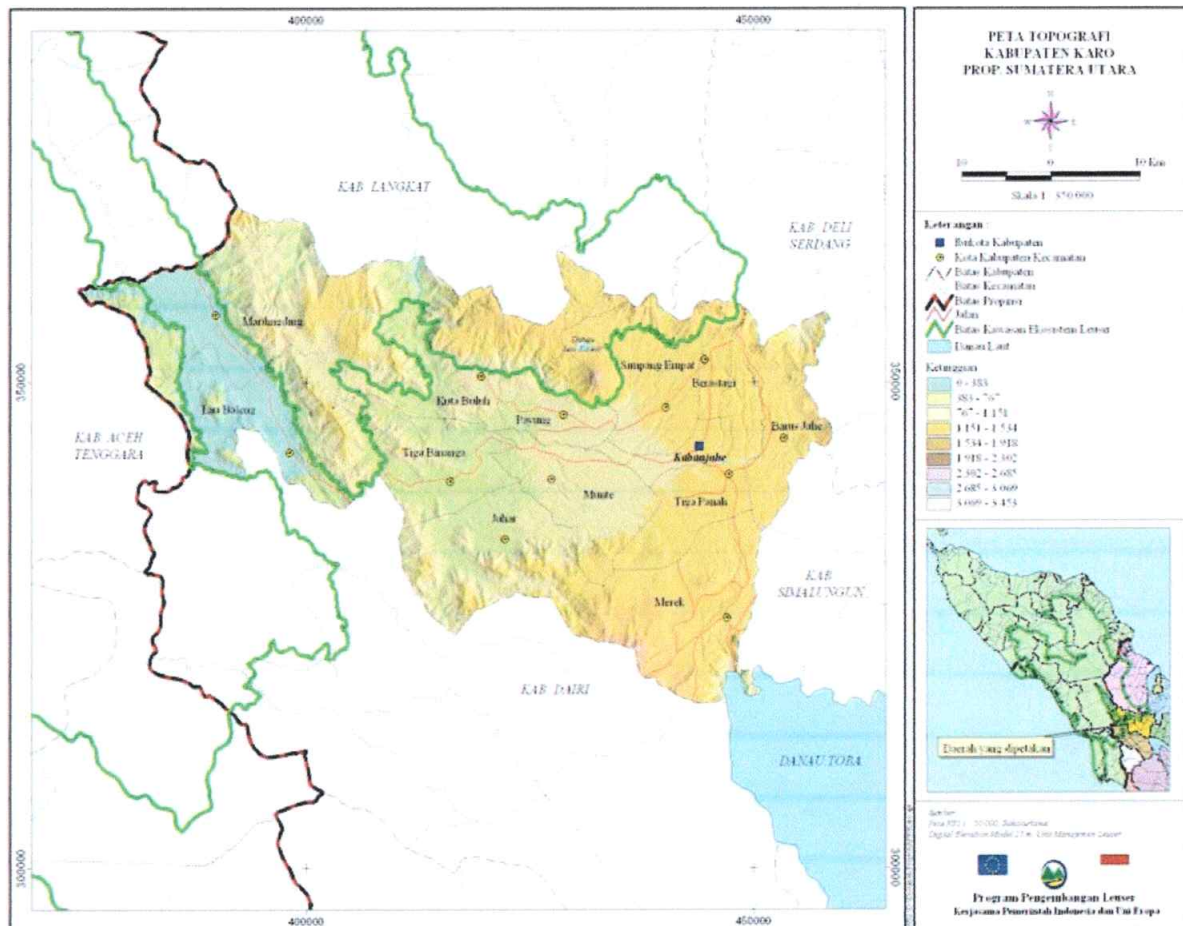
Tabel 2.2
Jumlah Desa dan Kelurahan pada Masing-Masing Kecamatan
Di Kabupaten Karo Tahun 2017

No.	Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Buah)		
		Desa	Kelurahan	Jumlah
1.	Mardingding	12	-	12
2.	Laubaleng	15	-	15
3.	Tigabinanga	19	1	20
4.	Juhar	25	-	25
5.	Munte	22	-	22
6.	Kutabuluh	16	-	16
7.	Payung	8	-	8
8.	Tiganderket	17	-	17
9.	Simpang Empat	17	-	17
10.	Naman Teran	14	-	14
11.	Merdeka	9	-	9
12.	Kabanjahe	8	5	13
13.	Berastagi	6	4	10
14.	Tigapanah	26	-	26
15.	Dolat Rayat	7	-	7
16.	Merek	19	-	19
17.	Barusjahe	19	-	19
Jumlah		259	10	269

Sumber :Kabupaten Karo Dalam Angka 2017

2.2.2. Kondisi Astronomis

Secara astronomis, Kabupaten Karo terletak pada $2^{\circ}50'$ – $3^{\circ}19'$ Lintang Utara dan $97^{\circ}55'$ – $98^{\circ}38'$ Bujur Timur. Letak astronomis ini membawa implikasi terhadap kondisi topografis, klimatologis, geologis dan hidrologis.



Gambar 2.2 Peta Topologi Kabupaten Karo

Wilayah Kabupaten Karo, secara topografis berada pada ketinggian 280–1.420 meter di atas permukaan laut dengan perbandingan luas sebagai berikut

- Daerah ketinggian 280-500 Meter dari permukaan laut seluas 46.462 Ha (21,84 %).
- Daerah ketinggian 500-1.000 Meter dari permukaan laut seluas 84.892 Ha (39,91%).
- Daerah ketinggian 1.000-1.400 Meter dari permukaan laut seluas 70.774 Ha (33,27%).
- Daerah ketinggian > 1.400 Meter di atas permukaan laut seluas 10.597 Ha (4,98%).

Kondisi topografis juga mengakibatkan perbedaan kemiringan/lereng lahan yang dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Datar 2% = 23.900 Ha = 11,24%
- b. Landai 2 – 15% = 74.919 Ha = 35,22%
- c. Miring 15 – 40% = 41.169 Ha = 19,35%
- d. Curam 40% = 72.737 Ha = 34,19%

Berdasarkan kondisi topografis, maka Kecamatan Lau Baleng berada pada ketinggian terendah di atas permukaan laut yakni 200 - 580 mdpl. Sementara, Kecamatan yang berada pada ketinggian > 1.000 mdpl yaitu Kecamatan Namanteran, Merdeka, Berastagi dan Dolatrayat. Secara rinci, kondisi topografis masing-masing kecamatan sebagaimana disajikan pada tabel 2.3 berikut :

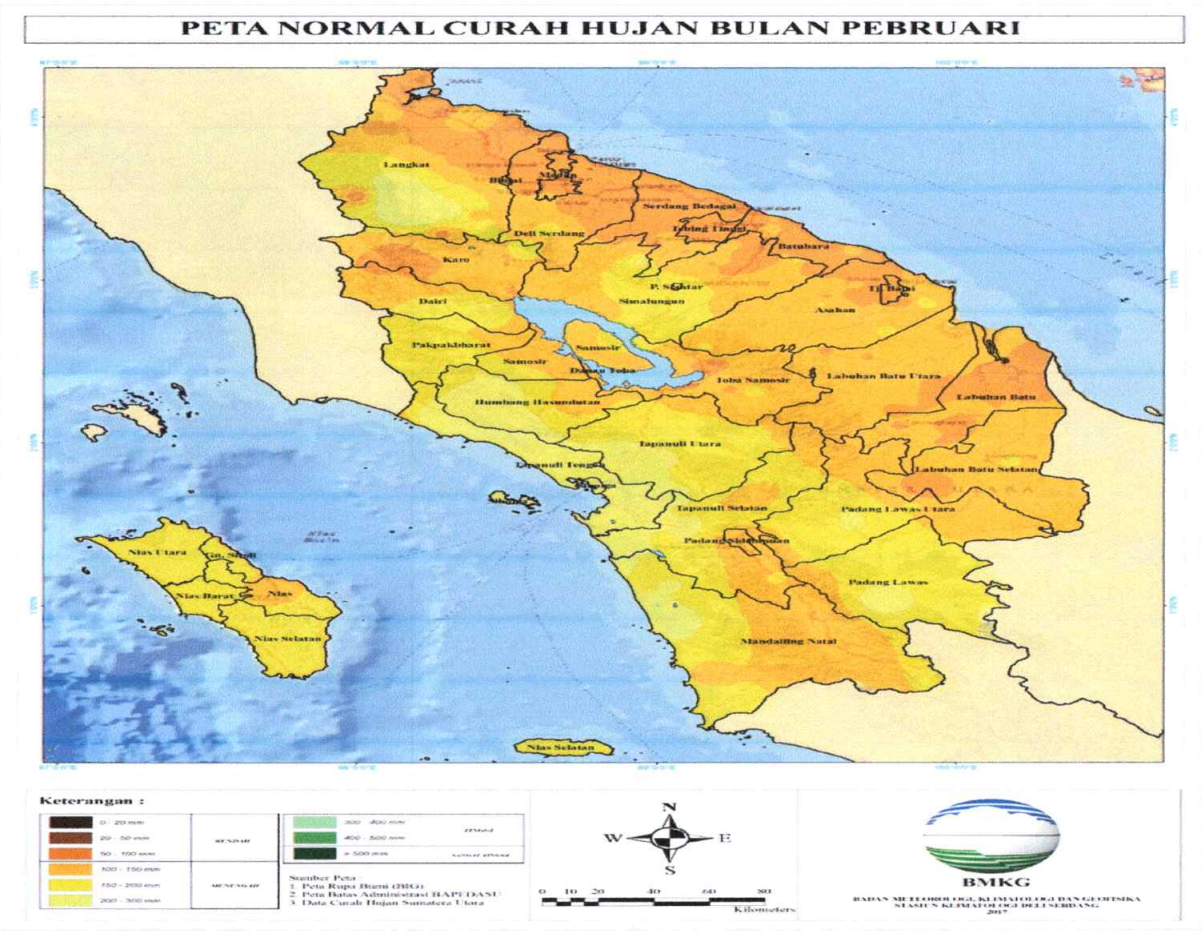
Tabel 2.3.
Kondisi Topografis Kecamatan se Kabupaten Karo
Tahun 2017 (mdpl)

No	Kecamatan	Topografis
1	Mardingding	280 - 560
2	Laubaleng	200 - 580
3	Tigabinanga	490 - 750
4	Juhar	650 - 1.030
5	Munte	716 - 1.242
6	Kutabuluh	631 - 1.100
7	Payung	500 - 1.500
8	Tiganderket	500 - 1.500
9	Simpang Empat	950 - 1.400
10	Naman Teran	1.300 - 1.450
11	Merdeka	1.000 - 1.500
12	Kabanjahe	1.000 - 1.300
13	Berastagi	1.200 - 1.300
14	Tigapanah	1.139 - 1.326
15	Dolat Rayat	1.242 - 1.418
16	Merek	977 - 1.116
17	Barusjahe	870 - 1.400

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka 2017

2.2.3. Kondisi Klimatologis

Secara klimatologis, Kabupaten Karo beriklim tropis dengan suhu yang bervariasi antara 16,2⁰C sampai dengan 23,3⁰C dengan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 87⁰C sampai dengan 92⁰C. Kondisi ini berpengaruh terhadap keberadaan musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan pertama mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Januari dan musim hujan kedua pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei, sedangkan musim kemarau biasanya pada bulan Februari, Juni dan Juli.



Gambar 2.3

Peta Klimatologi Kabupaten Karo

2.2.4. Kondisi Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Karo ditandai dengan adanya potensi pertambangan dan energi. Potensi pertambangan meliputi mineral bukan logam berupa belerang, fosfat maupun batuan berupa batu gamping, dolomit, kalsit, lempung, marmer, sirtu, trass, andesit, feldspar dan granit. Sampai saat ini, pertambangan batuan yang sudah dieksploitasi terbatas pada dolomit yakni di Kecamatan Kutabuluh dan Tiganderket. Sementara itu, sumber daya energi yang berpotensi untuk dikembangkan adalah energi panas bumi. Energi panas bumi yang telah dikembangkan adalah panas bumi Gunung Sibayak

yang terdapat di Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka, dengan cadangan terduga sebesar 68 MW yang dieksploitasi oleh PT. Pertamina (Persero). Energi panas bumi lainnya yang potensial adalah panas bumi Gunung Sinabung yang terdapat di Kecamatan Payung namun belum dieksploitasi.

2.2.5. Kondisi Hidrologi

Secara hidrologi, Kabupaten Karo merupakan bagian dari 2 (dua) Daerah Aliran Sungai(DAS) yang besar yakni DAS Wampu dan DAS Lawe Alas (Renun).Sungai Wampu bermuara ke Selat Malaka dan Sungai Renun bermuara ke Samudera Hindia.

2.3. Kependudukan

Secara demografi, sesuai hasil sensus tahun 2010, penduduk Kabupaten Karo berjumlah 350.960 jiwa dan berdasarkan hasil sensus tersebut, diproyeksikan penduduk Kabupaten Karo Tahun 2014 adalah sebesar 382.622 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 180 jiwa/Km². Jumlah desa, luas wilayah, jumlah penduduk per kecamatan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Banyaknya Desa/Kel	Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk Tiap Km ²
1	Mardingding	12	19,281	267,11	72,18
2	Laubaleng	15	20,099	252,60	79,57
3	Tigabinanga	19	22,108	160,38	137, 85
4	Juhar	25	14,384	218,56	65,81
5	Munte	22	21,428	125,64	170,55
6	Kutabuluh	16	11.531	195,70	58,92
7	Payung	8	12,024	47,24	254,53
8	Tiganderket	17	14,260	86,76	164, 36
9	Simpang Empat	17	20,739	93,48	221,85
10	Naman Teran	14	14,460	87,82	164, 65
11	Merdeka	9	15,712	44,17	355, 72
12	Kabanjahe	13	73,479	44,65	1645,67
13	Berastagi	10	49,805	30,50	1632, 95
14	Tigapanah	26	33,687	186,84	180,30

15	Dolat Rayat	7	9,378	32,25	290, 79
16	Merek	19	20,373	125,51	162,32
17	Barusjahe	19	23,850	128,04	186,27
Jumlah Tahun 2016		269	396,598	2.127,25	186,44

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka 2017

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karo Tahun 2011–2016 adalah sebesar 2,48% per tahun. Tahun 2016, jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari pada jumlah penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 196,898 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 199,700 jiwa dengan sex rasionya sebesar 98.60 seperti terlihat pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5.

Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Rasio
1	Mardingding	9,626	9,655	19,281	99,70
2	Laubaleng	9,945	10,154	20,099	97,94
3	Tigabinanga	11,004	11,104	22,108	99,10
4	Juhar	7,166	7,218	14,384	99,28
5	Munte	10,731	10,679	21,428	100,32
6	Kutabuluh	5,703	5.828	11,531	97,86
7	Payung	5,945	6,079	12,024	97,86
8	Tiganderket	6,924	7,306	14,260	95,18
9	Simpang Empat	10,366	10,373	20,739	99,93
10	Naman Teran	7,362	7,098	14,260	103,72
11	Merdeka	7,880	7,832	15,712	100,61
12	Kabanjahe	35,920	37,559	73,479	95,64
13	Berastagi	24,801	25,004	49,805	99,19
14	Tigapanah	16,664	17,023	33,687	97,89
15	Dolat Rayat	4,639	4,739	9,378	97,89
16	Merek	10,437	9,936	20,373	105,04
17	Barusjahe	11,755	12,095	23,850	97,19
Jumlah Tahun 2016		196,898	199,700	396,598	98,60

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka 2017

2.4. Kondisi Infrastruktur dan Sarana Prasarana Publik

2.4.1.Perencanaan Pembangunan

Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan di Pemerintahan Kabupaten Karo merupakan indikator bahwa perencanaan sudah berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua dokumen perencanaan yang penyusunannya terlambat yaitu RPJPD dan RPJMD. Seperti terlihat pada tabel 2.6, bahwa dokumen RPJMD penyusunannya dua periode tidak mengacu kepada RPJPD karena RPJPD Kabupaten Karo sampai saat ini dalam tahap penyusunan.

Tabel 2.6.
Ketersediaan Dokumen PerencanaanKabupaten Karo Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Karo

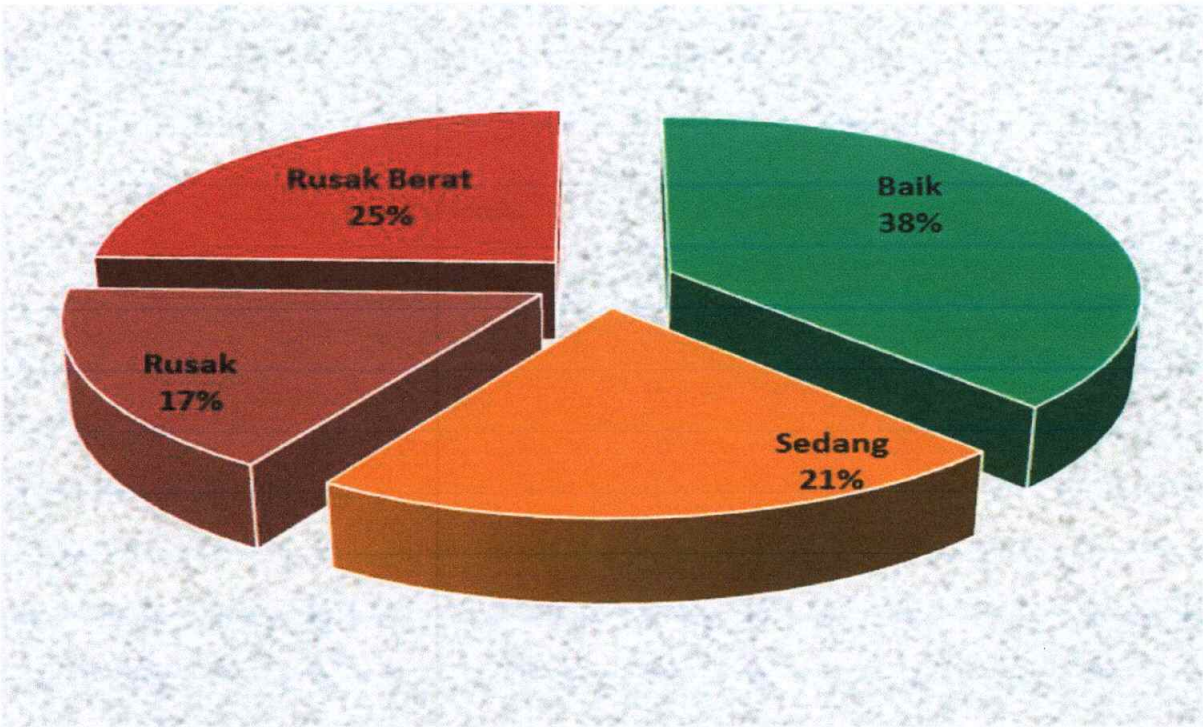
2.4.2. Jaringan Jalan

Prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran transportasi darat, kelancaran lalu lintas akan menunjang perekonomian disuatu daerah. Panjang jalan di Kabupaten Karo tahun 2016 tercatat 1,253,65 Km yang terdiri dari jalan provinsi sepanjang 35,50 Km dan jalan kabupaten sepanjang 1.218,15 Km. Proporsi panjang jalan dengan kondisi baik di Kabupaten Karo pada tahun 2016 ada sepanjang 476,10 Km atau 37,98% dari total panjang jalan 1.253,65 Km di Kabupaten Karo.

Dilihat dari jenis permukaan jalan di Kabupaten Karo pada tahun 2016, sebagian besar jalan berupa hotmix/aspal sepanjang 819,21 Km, telfrod/batu/krikil sepanjang 272,34 Km, dan tanah sepanjang 126,60 Km.

Perbandingan jalan menurut kondisi jalan Kabupaten Karo tahun 2016 dapat dilihat pada gambar2.4 berikut ini:

Gambar 2.4
Panjang Jalan Menurut Jenis dan Kondisi Jalan (Km) Kabupaten Karo Tahun 2016



Sumber : Kabupaten Karo Dalam Angka 2017

2.5. Sumber Daya Energi Listrik, Air dan Mineral

Potensi dan kondisi Pertambangan di Kabupaten Karo dapat dilihat dari tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7.
Potensi Pertambangan dan Energi

No.	Potensi Pertambangan & Energi	Jenis
1	Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Panas Bumi, belerang, Batu Gamping, Dolomit, Fosfat, kalsit, Lempung, Marmer, Sirtu, Trass, Andesit, Feldspar, granit
2	Potensi sumber daya air dan energi	Potensi air sungai untuk PLTA, Panas Bumi
3	Potensi dan Pembangkit Listrik Tenaga Air	Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), Pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTM)

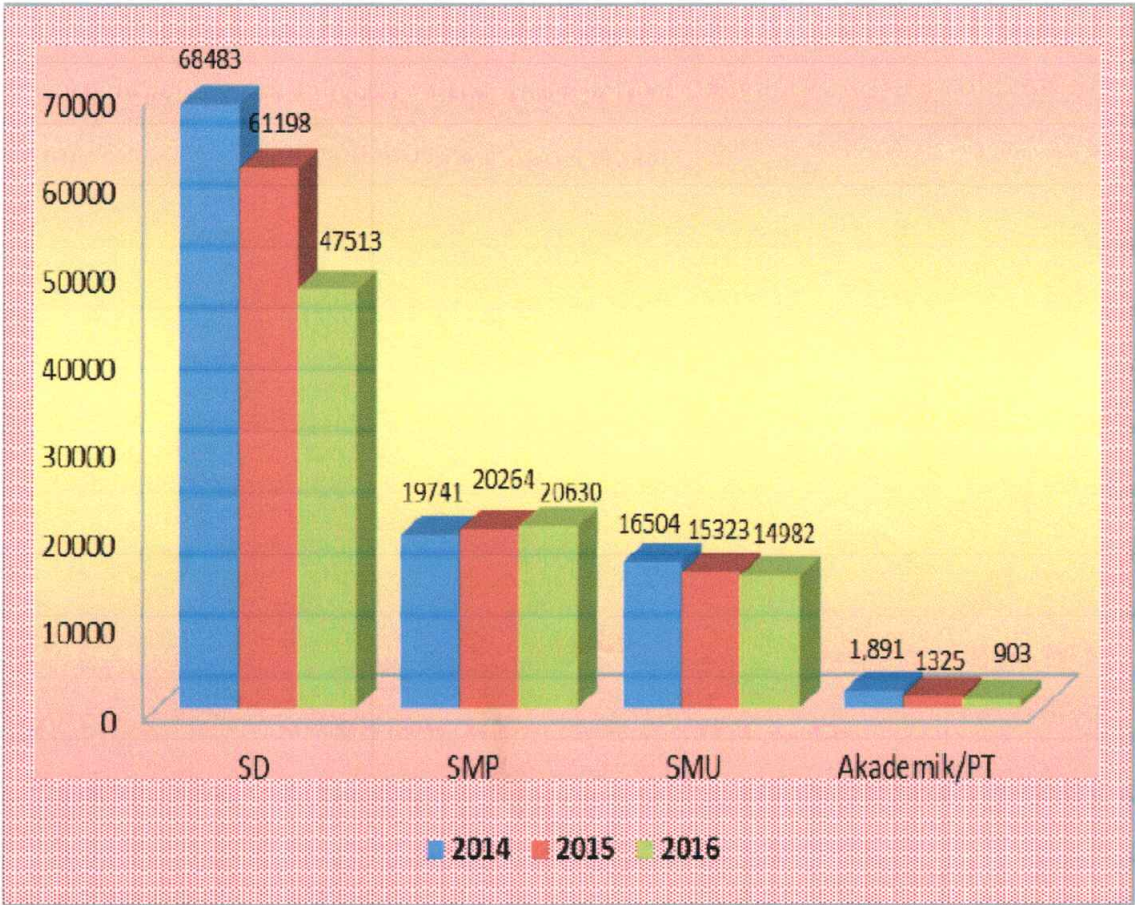
Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karo

2.6 Kondisi Pendidikan

Sektor Pendidikan merupakan salah satu pilar yang mendukung program pembangunan daerah. Pada tingkat pendidikan dasar tahun 2016, terdapat 289 sekolah dan 2.045 kelas serta terdapat 2.651 tenaga pengajar dan 47.513 siswa. Pada tingkat pendidikan lanjutan pertama terdapat 64 buah sekolah dan 693 ruang kelas, serta ada sebanyak 1.515 tenaga pengajar dan 20.630 siswa. Pada tingkat pendidikan menengah atas, terdapat 37 sekolah dan 14.982 siswa yang dididik oleh tenaga pengajar sebanyak 1.151 orang.

Rasio murid terhadap guru pada pendidikan dasar sebesar 18, yang berarti tiap guru mengajar 18 siswa. Pada tingkat SMP rasionya sebesar 14 dan SMA sebesar 10. Rasio jumlah pelajar tingkat dasar terhadap sekolah sebesar 153 yang berarti setiap sekolah menampung rata-rata sebanyak 153 siswa. Rasio tingkat SMP adalah sebesar 322 dan pada tingkat SMA sebesar 474. Adapun jumlah siswa menurut tingkat pendidikan periode 2014 hingga 2016 adalah tergambar pada tabel 2.8 berikut:

Gambar 2.4
Jumlah Siswa Menurut Tingkat Pendidikan 2014 - 2016



Sumber : Kabupaten Karo Dalam Angka 2017

2.6.1 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah, semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Perkembangan APS di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel 2.8 di bawah ini:

Tabel 2.8
Angka Partisipasi Sekolah (APS)di Kabupaten Karo Tahun 2015-2016

No.	Angka Partisipasi Sekolah	2015	2016
1	7 – 12	98,65	98,68
2	13 - 15	93,33	92,29
3	16 - 18	79,73	79,38
4	19-24	19,56	19,62

Sumber : Kabupaten Karo Dalam Angka 2017

2.6.2 Fasilitas Pendidikan

Jumlah sekolah yang ada di daerah Kabupaten Karo untuk setiap jenjang pendidikan baik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah masih kurang. Fasilitas pendidikan untuk pendidikan dasar dan pendidikan yang dalam kondisi baik tahun 2013-2015, seperti terlihat pada tabel 2.9 di bawah ini. Sekolah dan sarana prasarana dalam kondisi baik belum mencapai 100%, masih memerlukan anggaran yang besar untuk pemeliharaan dan rehab sehingga yang dalam kondisi bisa mencapai 100%.

Tabel 2.9
Fasilitas Pendidikan untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Karo Tahun 2013-2015

No.	Uraian	2013	2014	2015
1.	Sekolah SD/MI kondisi baik (%)	69,00	70,00	88,91
2.	Sekolah SMP/MTs kondisi baik (%)	72,00	78,00	82,30
3.	Sekolah SMA/SMK/MA kondisi baik (%)	71,00	75,00	79,77
4.	Sekolah SD/MI Memiliki ruang perpustakaan (%)	28,00	29,59	29,59
5.	Sekolah SMP/MTs Memiliki ruang perpustakaan (%)	79,00	80,00	83,00
6.	Sekolah SMA/SMK/MA Memiliki ruang perpustakaan (%)	80,00	81,00	82,00

No.	Uraian	2013	2014	2015
7.	Sekolah SMP/MTs Memiliki ruang laboratorium (%)	56,00	58,00	58,00
8.	Sekolah SMA/MA Memiliki ruang laboratorium (%)	49,00	50,00	50,00
9.	Sekolah SMK Memiliki ruang laboratorium (%)	45,00	46,00	46,00
10.	Persentase Kecamatan yang memiliki TK Pembina (%)	29,00	29,00	29,00
11.	Persentase Kelurahan/desa yang memiliki lembaga PAUD Non Formal (%)	85,00	90,00	97,30

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo

Persentasi tenaga pendidik yang S-1/DIV di Kabupaten Karo Tahun 2013-2015 yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya untuk mencapai S-1/D-IV adalah guru dan kepala sekolah agar mencapai 100% serta kepala sekolah untuk memiliki sertifikat diklat Kepala Sekolah serta peningkatan Kompetensi, ini dapat tergambar pada tabel 2.14 berikut :

Tabel 2.14
Persentasi Tenaga Pendidik S-1/D-IV

No.	Uraian	2013	2014	2015
1.	Guru yang memenuhi S-1/D-IV	63,37	66,14	67,81
2.	Kepala Sekolah yang memenuhi S-1/D-IV	70,00	75,00	85,00
3.	Kepala Sekolah yang memiliki sertifikat Diklat Kepala Sekolah	1	2	2
4.	Pengawas Sekolah yang memenuhi S-1/D-IV	95	100	100
5.	PTK PUDNI mengikuti peningkatan Kompetensi	0	0	0
6.	PTKSD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA mengikuti peningkatan Kompetensi	7	7	7

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo

2.9. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni budaya dan olahraga. Masing-masing fokus tersebut akan dibahas pada bagian di bawah ini.

2.9.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

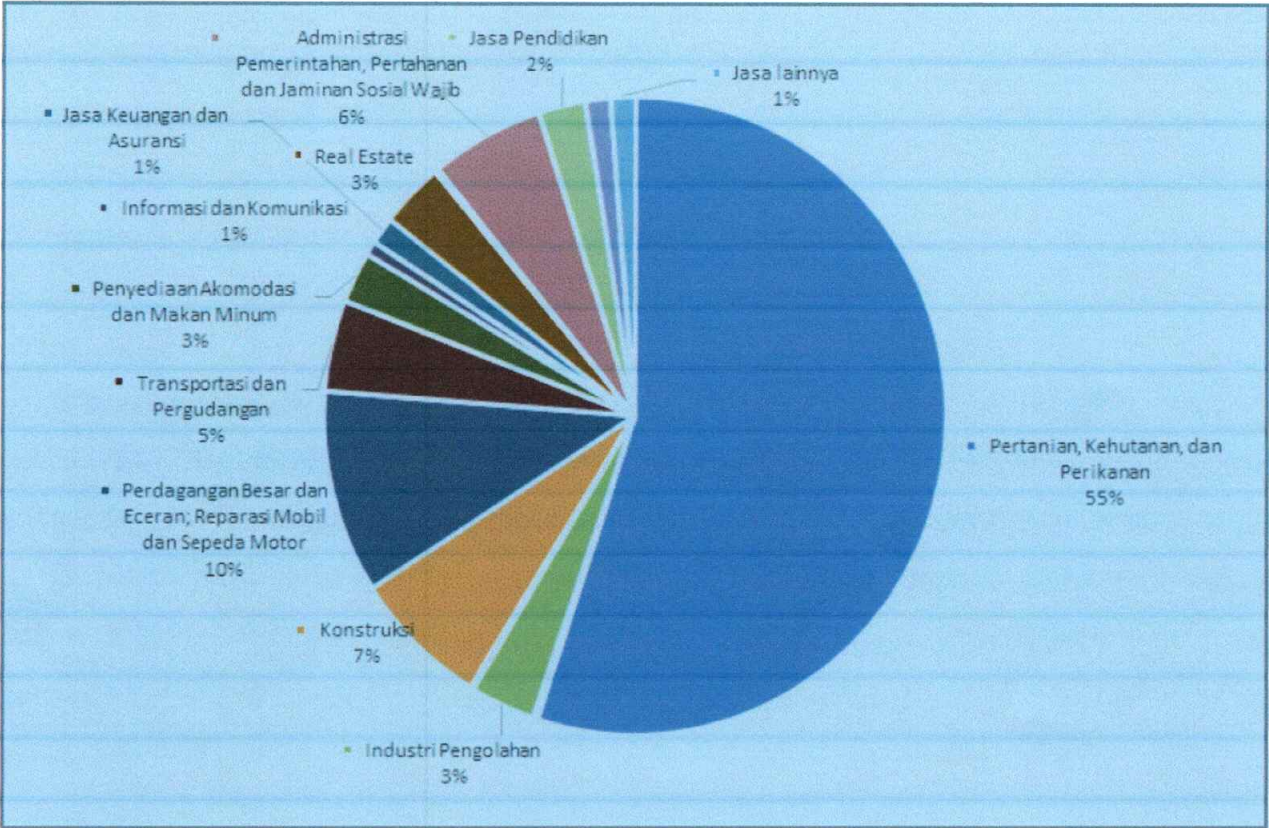
Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Karo, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup: pertumbuhan PDRB, tingkat inflasi, perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karo, pendapatan regional dan penduduk di atas garis kemiskinan.

2.9.2. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang memberikan informasi tentang gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi regional Kabupaten Karo. PDRB dapat disajikan berdasarkan atas harga berlaku dan berdasarkan atas harga konstan. Penyajian PDRB Kabupaten Karo atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan harga tetap suatu tahun dasar, semua barang dan jasa yang dihasilkan, biaya antara yang digunakan ataupun nilai tambah masing-masing sektor dinilai berdasarkan harga tahun dasar. Berdasarkan harga berlaku, nilai PDRB Kabupaten Karo pada tahun 2016 adalah sebesar 16.728,42 miliar rupiah. Dibandingkan dengan PDRB tahun 2015 yang nilainya 15.150,36 miliar rupiah, pada tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar 1.578,06 miliar rupiah atau meningkat sebesar 9,43 persen. Untuk harga konstan, dengan menggunakan harga tahun dasar 2010 PDRB Kabupaten Karo juga mengalami kenaikan dari sebesar 11.880,93 miliar rupiah pada tahun 2015 menjadi 12.494,87 miliar rupiah pada tahun 2016. Penghitungan PDRB berdasarkan harga konstan dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pada tahun 2016, perekonomian Kabupaten Karo mengalami pertumbuhan sebesar 5,17 %. Sektor Pertanian masih mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Karo pada tahun 2016. Sektor ini menyumbangkan 9.207,58 miliar rupiah atau 55,04 % pada pembentukan PDRB Kabupaten Karo.

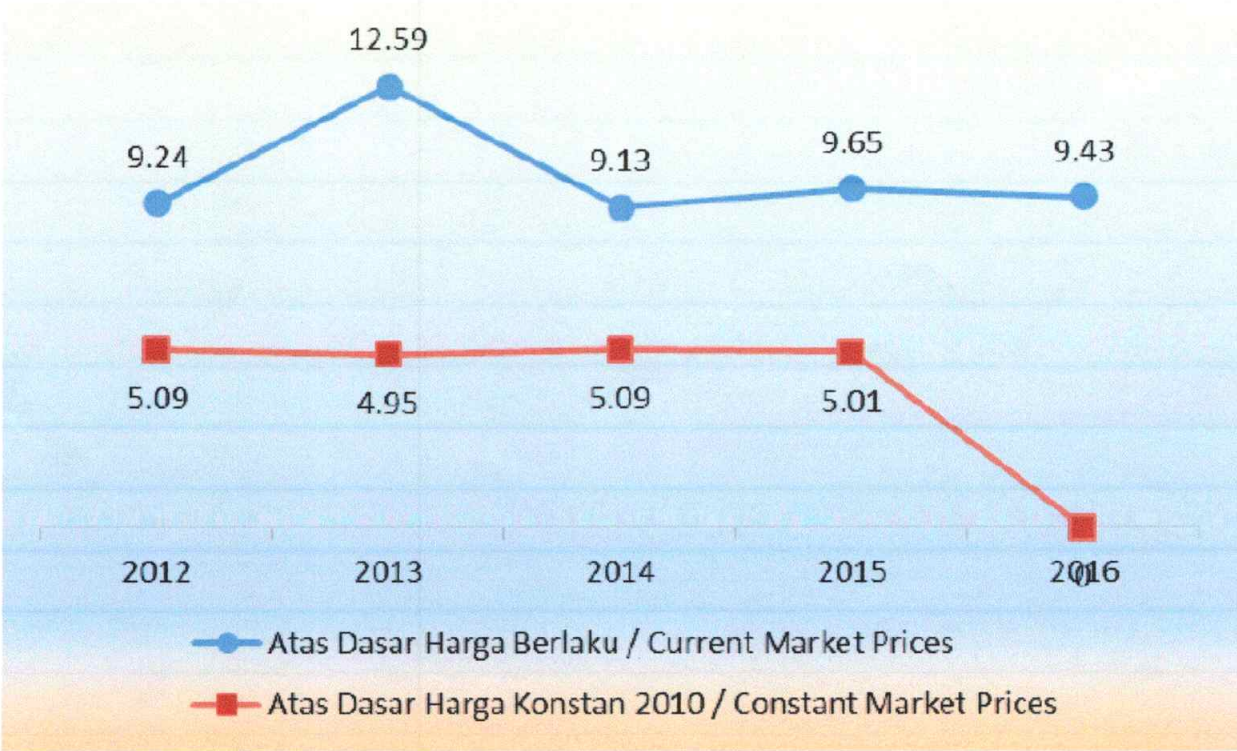
Berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga berlaku, distribusi PDRB Kabupaten Karo seperti pada gambar 2.6

Gambar 2.6
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Karo Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga berlaku Tahun 2016



Sumber : BPS, Karo Dalam Angka 2017

Gambar 2.7
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Karo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 –2016 (%)



2.9.3. Laju Inflasi

Inflasi tahunan secara kamulatif di Kabupaten Karo berfluktuasi. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian yang tidak bisa diabaikan, karena dapat menimbulkan dampak yang sangat luas baik terhadap perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat. Bagi perekonomian, inflasi yang tinggi dapat menyebabkan timbulnya ketidakstabilan, menurunkan gairah menabung dan berinvestasi, menghambat usaha peningkatan ekspor, menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, maupun dapat berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran.

Angka inflasi mempengaruhi pembangunan ekonomi karena inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Pada tahun 2010, 2013 dan 2014 angka inflasi sebesar 7,65, 10,09 dan 8,24 adalah angka inflasi yang tinggi pada periode tahun 2010-2015. Inflasi terbesar pada tahun 2013 yaitu sebesar 10,09 dan terendah tahun 2015 yaitu sebesar 3,40. Perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel 2. 15 berikutini.

Tabel 2.15.

Nilai inflasi rata-rata Tahun 2010 s.d 2015 Kabupaten Karo

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Inflasi	7,65	3,54	3,79	10,09	8,24	3,32

Sumber : BPS, Inflasi Kab. Karo

Bagi daerah yang perekonomiannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berkisar antara 2 sampai 4 persen per tahun. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2 sampai 4 persen dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Selanjutnya tingkat inflasi yang berkisar antara 7 sampai 10 persen dikatakan inflasi yang tinggi.

2.9.4. PDRB per Kapita Kabupaten Karo

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita dapat digunakan sebagai barometer bagi tingkat kemakmuran suatu daerah, meskipun data tersebut belum dapat sepenuhnya digunakan langsung

dalam pengukuran pemerataan pendapatan. Tabel 2.16 menunjukkan jumlah PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Karo perkapita atas dasar harga berlaku dan harga konstan selama 2009-2013.

Tabel 2.16
PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Karo
Tahun 2009- 2014

No	U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Atas Dasar Harga Berlaku					
	PDRB (Rp Jutaan)	9.231	10.293	11.244	12.634	13.780
	Penduduk Tengah Tahun	350	354	358	375	382
	PDRB Perkapita (Rp	26.302	29.058	31.338	33.655	36.016
2.	Atas Dasar Harga Konstan 2010					
	PDRB (Rp Jutaan)	9.225	9.761	10.258	10.768	11.326
	Penduduk Tengah Tahun	350	354	358	375	382
	PDRB Perkapita (Rp	26.286	27.555	28.588	28.686	29.602

Sumber : PDRB Kabupaten Karo, 2009-2014

2.9.5.Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo setiap tahun meningkat walaupun secara perlahan, untuk empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.41 di bawah ini.

Tabel 2.17
Persentase penduduk di atas garis kemiskinan
Kabupaten Karo tahun 2013-2016 (%)

No	U r a i a n	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	90,21	90.80	90,32	90,19

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka 2017

2.10. Kesehatan

Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, sarana kesehatan rumah sakit merupakan salah satu faktor dalam perbaikan kualitas hidup dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat karena ketersediaan sarana kesehatan menentukan kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2016 ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Karo terdapat sebanyak 5 rumah sakit yaitu 3 rumah sakit di Kecamatan Kabanjahe dan 2 buah di Kecamatan Berastagi serta pada kecamatan lainnya tersedia sarana kesehatan berupa puskesmas ada sebanyak 19 puskesmas dan 321 puskesmas pembantu, 53 balai pengobatan umum dan 447 posyandu.

Ketersediaan sumber daya manusia menjadi faktor pendukung dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah telah menyediakan tenaga kesehatan yang menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Karo. Adapun jumlah tenaga kesehatan yang tinggal di desa yaitu Dokter Umum ada sebanyak 65 orang dan dokter gigi sebanyak 17 orang, Bidan PTT ada sebanyak 313 orang dan Bidan di Desa sebanyak 232 orang.

Tabel 2.19

Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan yang Tinggal di Desa di Kabupaten Karo Tahun 2016

No.	Kecamatan	Dokter Umum/PTT	Dokter Spesialis	Dokter Gigi/PTT	Para Medis	Bidan/Bidan PTT	Bidan Di Desa
1	Mardingding	4	0	0	7	16	10
2	Laubaleng	5	0	0	9	21	17
3	Tigabinanga	3	0	1	13	20	14
4	Juhar	1	0	1	6	12	9
5	Munte	1	0	1	9	30	25
6	Kutabuluh	3	0	0	8	10	5
7	Payung	2	0	0	4	12	8
8	Tiganderket	2	0	0	8	10	9
9	Simpang Empat	3	0	1	23	15	12
10	Naman Teran	2	0	1	6	12	8
11	Merdeka	6	0	1	5	11	7

No.	Kecamatan	Dokter Umum/PTT	Dokter Spesialis	Dokter Gigi/PTT	Para Medis	Bidan/Bidan PTT	Bidan Di Desa
12	Kabanjahe	4	19	3	46	27	27
13	Berastagi	9	0	2	32	33	26
14	Tigapanah	8	0	4	23	36	25
15	Dolat Rayat	4	0	1	6	14	8
16	Merek	3	0	1	10	20	10
17	Barusjahe	5	0	1	12	14	12
Jlh	2016	65	19	17	227	313	232

Sumber : Kabupaten Karo Dalam Angka 2017

2.10.4. Cakupan Pelayanan Kesehatan

Cakupan tenaga medis dalam menangani pasien untuk beberapa jenis perawatan yaitu komplikasi kebidanan, pertolongan persalinan, UCI, TBC BTA, dan kunjungan bayi masih kurang terutama penanganan penyakit TBC BTA hanya 59% pada tahun 2014, seperti terlihat pada tabel 2.20. berikut :

Tabel 2.20

Tingkat Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	70,00	74,00	75,00	76,00	73,00
2.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	87,60	82,60	82,40	83,50	85,00
3.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	94,60	86,20	69,90	81,40	86,60
4.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	97,20	94,40	96,20	98,20	59,00
6.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
7.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	34,70	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Cakupan kunjungan bayi (%)	98,80	83,20	83,00	84,20	85,00
9.	Cakupan Puskesmas (%)	111,76	111,76	111,76	111,76	111,76
10.	Cakupan Pembantu Puskesmas (%)	95,91	84,76	84,76	74,72	85,50

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karo

2.11. Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil SUSENAS, Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Karo Tahun 2015 mencapai 228.207 orang dengan tingkat partisipasi Angkatan kerja sebesar 85,25 persen dan tingkat pengangguran sebesar 2,23 persen.

Tabel 2.21.

Jumlah Penduduk berumur 15 tahun keatas berdasarkan jenis kegiatan utama Kabupaten Karo Tahun 2012-2015

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
I.	Angkatan Kerja	209.428	206.048	208.839	228.207
1.	Bekerja	205.243	201.758	206.709	223.122
2.	Pengangguran	4.185	4.290	2.130	5.085
II.	Bukan Angkatan Kerja	34.773	42.117	53.047	39.493
Jumlah (I +II)		244.201	248.165	261.886	267.700
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)		85,76	83,03	79,74	85,25
Tingkat Pengangguran		2,00	2,08	1,02	2,23

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka 2017

Pada dasarnya setiap manusia hidup harus bekerja dan mempunyai pekerjaan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya sendiri maupun untuk diri orang lain, dan atau kedua-duanya. Masalah pekerjaan ini merupakan masalah yang kompleks dan serius. di Kabupaten Karo Tahun 2015, disajikan dalam pada tabel 2.22, sebagai berikut:

Tabel 2.22**Jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karo Tahun 2015**

No.	Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pertanian	77,415	81, 517	158,932
2.	Industri	8,396	665	9,061
3.	Jasa-Jasa	27,081	28,048	55,129

2.12. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Indikator koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Karo masih perlu ditingkatkan baik jumlah maupun persentasi koperasi yang aktif yang hanya sebesar 53% saja, dapat dilihat pada tabel 2.23.

Tabel 2.23**Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Karo Tahun 2010-2014**

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Persentasi koperasi aktif (%)	47,00	48,00	50,00	52,34	53,00
2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	1.745	1.745	1.745	1.745	1.945
3.	Jumlah BPR/LKM	0	0	0	0	0
4.	Usaha Mikro dan Kecil	13.135	13.275	13.240	13.544	13.694

2.13.1. Penanaman Modal

Perkembangan jumlah investor pada tahun 2010 sampai dengan 2015 sebanyak 52 sampai 61 investor yang terdiri dari 34 PMDN dan 18 sampai 27 PMA. Perkembangan investor PMDN dan PMA dari data di atas terlihat bahwa perkembangan jumlah investor PMDN mulai dari tahun 2010-2015 tidak bertambah sedangkan PMA mengalami peningkatan dari 18 sampai 27 seperti pada tabel 2.56. Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada PMA dan PMDN juga meningkat sesuai dengan penambahan jumlah PMA karena jumlah PMDN tetap, ini dapat dilihat pada tabel 2.24.

Tabel 2.24.
Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Karo
Tahun 2009 s.d 2013

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
2010	Jumlah Investor	34	18	52
2011	Jumlah Investor	34	19	53
2012	Jumlah Investor	34	19	53
2013	Jumlah Investor	34	19	53
2014	Jumlah Investor	34	22	56
2015	Jumlah Investor	34	27	61

Sumber: Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara

Tabel 2.25.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Karo
Tahun 2010 s.d 2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	5.713	5.767	5.767	5.767	5931	6126
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	52	53	53	53	56	61
3	Rasio daya serap tenaga kerja	109,86	108,81	108,81	108,81	105,91	100,42

Sumber: Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara

2.14. Kebudayaan

Indikator pembangunan daerah untuk urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel 2.26 berikut ini.

Tabel 2.26
Indikator Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan
Kabupaten Karo Tahun 2010-2015

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	2	2	2	2	1	2
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3	3	3	3	3	3
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	4	4	4	4	4	1

2.15. Kepemudaan dan Olahraga

Kondisi daerah Kabupaten Karo terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga salah satunya dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi olahraga. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memberdayakan pemuda. Banyaknya jumlah organisasi olahraga menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olah raga.

Perkembangan jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Karo dari tahun 2010-2015 terdapat sebanyak 24 organisasi, sedangkan jumlah organisasi pemuda terdapat sebanyak 31 organisasi. Jumlah organisasi pemuda dan olahraga di Kabupaten Karo disajikan pada tabel 2.27 berikut :

Tabel 2.27
Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karo
Tahun 2010-2015

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	23	23	24	24	24	24
2.	Jumlah Organisasi Olahraga	31	31	31	31	31	31
3.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	1	1	1	1	2	1
4.	Jumlah kegiatan Olahraga	2	3	3	3	3	2
5.	Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)	0	0	0	0	0	0
6.	Lapangan Olahraga	1	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karo Tahun 2016

2.16. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

2.16.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Untuk indikator pembangunan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Karo Tahun 2009-2014, dapat dilihat pada tabel 2.29 di bawah ini.

Tabel 2.29

Capaian Indikator Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Karo Tahun 2009-2014

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	4,31	4,53	2,9	4,23	3,93	
2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	264,7	265,56	263,09	259,73	256,21	
3.	Pertumbuhan ekonomi	5,17	5,39	5,74	5,09	4,98	5,18
4.	Kemiskinan	11,42	11,02	10,49	9,93	9,97	
5.	Penegakan PERDA	6	6	6	2	2	2
6.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	10	10	17	17	17	17
7.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	0,264	0,265	0,263	0,259	0,256	
8.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0,154	0,143	0,114	0,091	0,105	0,095
9.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	0,96	1,07	0,85	0,68	1	

2.17. Pertanian

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Karo terlihat pada tabel 2.30 di bawah ini.

Tabel 2.30
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya
Per Hektar Kabupaten Karo Tahun 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar(Ton/Ha)x100%							
1.	Padi Sawah	51,77	55,77	56,17	56,54	51,28	59,40
2.	Padi Gogo	38,29	33,89	35,57	39,7	36,73	36,61
3.	Jagung	51,83	56,62	62,7	64,14	63,11	68,86
4.	Ubi Jalar	117,26	126,09	138,9	146,22	145,82	139,19
5.	Kontribusi sektor Pertanian dan Perkebunan/ perkebunan terhadap PDRB (%)	47,04	44,82	45,13	44,69		
6.	Kontribusi sektor Pertanian dan Perkebunan (palawija) terhadap PDRB (%)	10,16	12,42	12,28	12,41		
7.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	61,08	60,94	60,98	60,52		
8.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	0	2.625	2.625	2.625		

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo Tahun 2016

2.18. Kehutanan

Capaian indikator urusan Kehutanan Kabupaten Karo Tahun 2009-2014 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.31
Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Kehutanan
Kabupaten Karo Tahun 2010-2015

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Ha)	85	155	182	185	123	127
2.	Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	40	35	52	30	32	30

2.19. **Urusan Pariwisata**

Jumlah kunjungan wisata ini tidak menggambarkan wisatawan yang tidak menginap. Kunjungan wisata ini juga tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana objek wisata serta penataan dari objek wisata itu sendiri. Kondisi objek wisata yang ada di Kabupaten Karo seperti tergambar pada tabel 2.32 berikut ini.

Tabel 2.32
Kondisi Sarana dan Prasarana Daerah Wisata di Kabupaten Karo
Tahun 2010-2015

No.	Objek Wisata	Tahun						Ket
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Air Terjun Sipiso-Piso	3	3	3	3	3	3	Perlu ditata dan ditingkatkan
2.	Panorama Daulu	3	3	3	3	3	3	
3.	Lau Debuk-Debuk	3	3	3	3	3	3	
4.	Gunung Sibayak	3	3	3	3	3	3	
5.	Pasar Buah Tradisional	3	3	3	3	3	3	
6.	Taman Mejuah-juahBerastagi	3	3	3	3	3	3	
7.	Bukit Gundaling	3	3	3	3	3	3	
8.	Deleng Kutu	3	3	3	3	3	3	
9.	Desa Budaya Lingga	3	3	3	3	3	3	
10.	Danau Lau Kawar	3	3	3	3	3	3	
11.	Gunung Sinabung	3	3	3	3	3	3	
12.	Uruk Tuha	3	3	3	3	3	3	
13.	Gua Liang Lahar	3	3	3	3	3	3	
14.	Lau Biang	3	3	3	3	3	3	
15.	Situs Rumah Hijau	3	3	3	3	3	3	
16.	Situs Puntungan Meriam Putri Hijau	3	3	3	3	3	3	
17.	Desa Budaya Dokan	3	3	3	3	3	3	
18.	Gunung Sipiso-Piso	3	3	3	3	3	3	
19.	Tongging	3	3	3	3	3	3	
20.	Air Terjun Sikulikap	3	3	3	3	3	3	
21.	Semangat Gunung/ Raja Berneh	3	3	3	3	3	3	

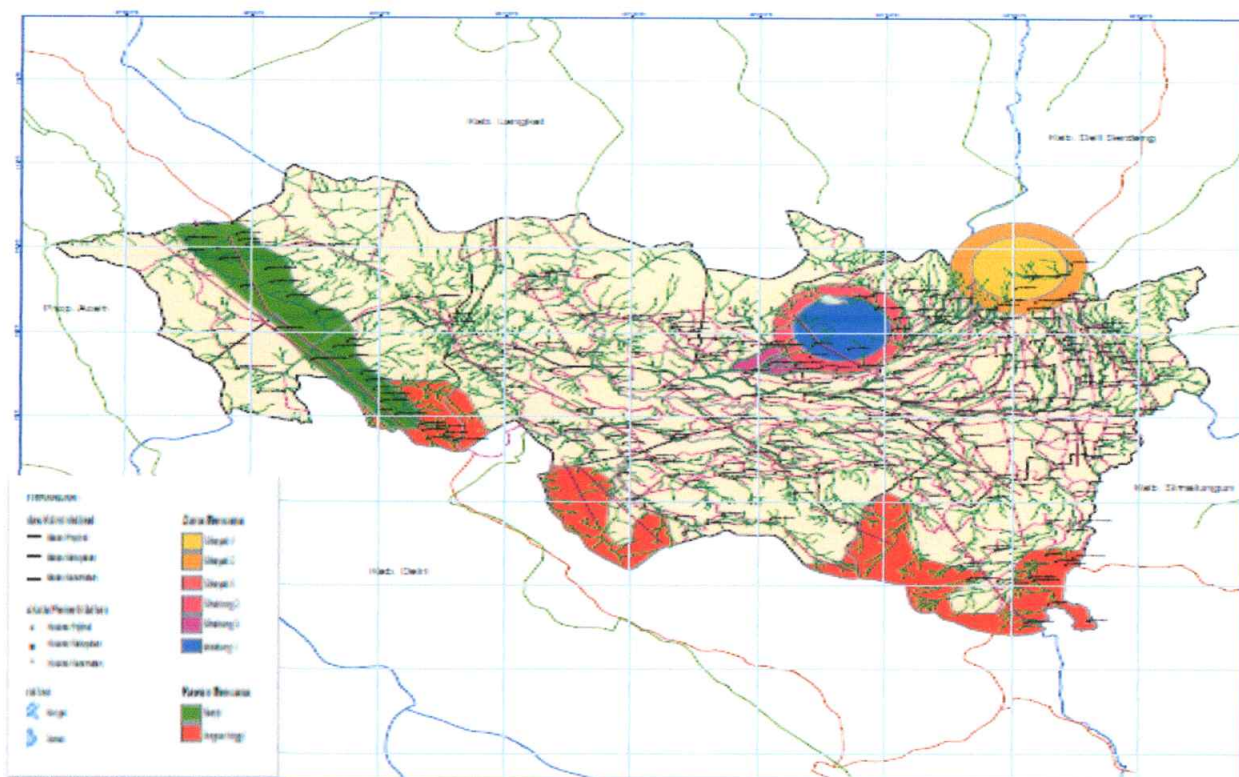
No.	Objek Wisata	Tahun						Ket
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
22.	Taman Hutan Raya Bukit Barisan	3	3	3	3	3	3	

Keterangan: 1= Rusak Berat; 2= Rusak; 3= Sedang; 4= Baik

2.20. Wilayah Rawan Bencana

Setelah menguraikan potensi pengembangan wilayah yang dianalisis menurut kondisi geografis, astronomis, topografis, klimatologis, geologis dan hidrologis, maka aspek lain yang perlu diperhitungkan adalah wilayah rawan bencana alam. Wilayah rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam khususnya bencana gunung api, bencana banjir dan bencana tanah longsor.

Gunungapi aktif yang terdapat di Kabupaten Karo adalah Gunung Sinabung yang masuk dalam Kecamatan Payung dan Kecamatan Simpang Empat dan Gunungapi Sibayak (sebagian) berada di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Berastagi. Potensi dan drajat bahaya yang ditimbulkan dari letusan gunungapi tersebut adalah aliran piroklastik atau aliran awan panas, Jatuhan piroklastik, dan lava. Potensi Bencana Banjir di Kabupaten Karo terdapat di beberapa desa yang tersebar di Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Laubaleng. Potensi bencana gerakan tanah/longsor terdapat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Karo. Kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah potensi gerakan tanah/longsor, antara lain: Kecamatan Mardinding, Kecamatan Kutabuluh, Kecamatan Payung, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Berastagi, Kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Barus Jahe, Kecamatan Tiga Panah, Kecamatan Merek, Kecamatan Munte, Kecamatan Lau Baleng dan Kecamatan Juhar. Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki potensi gerakan tanah mulai dari menengah sampai tinggi. Seluruh wilayah rawan bencana sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat pada Gambar 2.8 berikut :



Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Karo

2.3. Kejadian Bencana

Gunung Sinabung adalah gunung api di Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Karo, gunung ini tidak pernah tercatat aktif sejak tahun 1600 tetapi mendadak aktif kembali dan meletus pada tahun 2010. Erupsi pertama terjadi pada 27 Agustus 2010, gunung ini mengeluarkan asap dan abu vulkanis. Pada tanggal 29 Agustus 2010 dini hari sekitar pukul 00.15 WIB (28 Agustus 210) Gunung Sinabung mengeluarkan lava. Status Gunung ini dinaikan menjadi SIAGA (level 3) dan dua belas ribu warga disekitarnya dievakuasi dan ditampung di 8 lokasi di poski-posko pengungsian yang ada di Kabupaten Karo. Pada 7 September Gunung Sinabung kembali meletus ini merupakan letusan terbesar sejak gunung ini menjadi aktif pada tanggal 29 Agustus 2010. Suara letusan ini terdengar sampai jarak 8 kilometer, debu vulkanis ini tersembur hingga 5000 meter di udara.

Gunung Sinabung meletus kembali pada September 2013. Letusan pertama terjadi pada tanggal 15 September 2013 dini hari kemudian terjadi kembali pada sore harinya pada 17 September 2013. Letusan ini melepaskan awan panas dan debu vulkanik. Sebelumnya tidak ada tanda-tanda peningkatan aktivitas Sinabung sehingga tidak ada peringatan dini kepada warga. Pada erupsi kali ini tidak ada korban jiwa dilaporkan, tetapi ribuan

warga permukiman sekitar Gunung Sinabung terpaksa mengungsi ke kawasan aman.

Akibat peristiwa ini status Gunung Sinabung dinaikan ke level 3 (Siaga). Setelah itu tidak terjadi peningkatan aktivitas selama beberapa hari sehingga pada tanggal 29 September 2013 status di turunkan menjadi level 2 waspada. Memasuki bulan November terjadi peningkatan aktivitas sehingga pada tanggal 3 November 2013 pukul 03.00 status dinaikan kembali menjadi siaga, pengungsian penduduk kembali terjadi di desa-desa yang berjarak 5 km dari puncak Gunung Sinabung terutama Desa Bekerah, Simacem dan Suka Meriah yang berjarak hanya 3 km dari puncak gunung.

Letusan-letusan terjadi berkali-kali setelah itu disertai luncuran awan panas sampai 4,5 kilometer, hingga pada tanggal 24 November 2013 pukul 10.00 WIB status Gunung Sinabung dinaikan ke level tertinggi level 4 (AWAS). Berdasarkan rekomendasi vulkanologi, penduduk 21 desa dan 2 dusun di sekitar Gunung Sinabung mengungsi ke 24 titik posko pengungsian yang ada di Kabupaten Karo. Status level 4 (awas) terus bertahan hingga memasuki tahun 2014 guguran lava pijar dan semburan awan panas masih terus terjadi sampai 3 Januari 2014. Mulai tanggal 4 Januari 2014 terjadi rentetan kegempaan, letusan, dan luncuran awan panas terus menerus sampai hari berikutnya. Hal ini memaksa tambahan warga yang mengungsi akibat ketakutan, hingga pengungsi melebihi 20 ribu orang. Pada minggu terakhir Januari 2014 kondisi Gunung Sinabung mulai stabil dan direncanakan pengungsi yang berasal diluar radius bahaya (5 km) dapat dipulangkan. Status gunung diturunkan menjadi Siaga.

Namun aktivitas Gunung Sinabung tidak juga berhenti dan terus mengalami peningkatan hingga terakhir tercatat peningkatan status dari Siaga (level 3) menjadi Awas (level 4) sejak Selasa 2 Juni 2015 pukul 23.00 WIB. Status awas ini bertahan saat ini. Status Awas ini diprediksikan akan memakan waktu yang lama dan dapat mencapai 5 tahun hingga aktivitas Gunung Sinabung kembali menjadi normal. Hingga saat ini, dampak erupsi secara pasti juga sulit dihitung karena erupsi masih berlangsung.

Meletusnya Gunung Sinabung memberikan dampak besar pada beberapa aspek kehidupan masyarakat khususnya yang berada di sekitar gunung tersebut. Masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Sinabung kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian berupa gagal panen, tanah terkontaminasi belerang, yang jumlah kerugiannya belum bisa ditaksir hingga

sekarang ini. Banyak masyarakat gagal panen karena tanaman mereka rusak akibat tertutup debu vulkanik, belum lagi lahar dingin yang juga merusak tanaman dan sumber-sumber air, serta memutuskan jalan dan jembatan desa.

Rusaknya pemukiman dan tempat tinggal masyarakat yang tinggal di kawasan Gunung Sinabung membuat warga harus tinggal di posko-posko pengungsian. Kondisi pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara, masih ada yang memprihatinkan. Lokasi pengungsian yang disediakan pemerintah tidak membuat nyaman buat pengungsi. Pengungsi yang berada di dalam gedung saling himpit-himpitan. Kondisi ini membuat udara di dalam gedung tidak sehat. Bahkan sampah di lokasi pengungsian banyak berserakan. Pemerintah telah berupaya meningkatkan jumlah dan mutu bantuan yang akan di berikan kepada pengungsi korban erupsi sinabung, baik itu bantuan berupa selimut, pakaian, dan obat-obatan serta alat-alat kebersihan.

BAB III

REVIEW KEBUTUHAN PEMULIHAN PASCABENCANA

3.1. Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunungapi Sinabung

Mengingat Erupsi Gunungapi Sinabung sampai saat ini masih terus berlangsung, maka penghitungan dampak erupsi secara pasti sulit dihitung. Sehingga penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi dan banjir lahar dingin Gunungapi Sinabung dilaksanakan dengan beberapa tahap yaitu, Tahap Pertama, Relokasi di Siosar untuk 370 KK warga tiga desa, yang berasal dari Desa Bekerah 112 KK, Desa Sukameriah 128 KK dan Desa Simacem 130 KK. Pada pelaksanaannya, masih ada 3 sektor yang membutuhkan penanganan lebih lanjut yaitu sektor ekonomi, sosial dan lintas sektoral.

Tahap kedua, Bantuan Dana Relokasi Mandiri diberikan untuk 1.682 KK warga empat desa sesuai dengan Keputusan Bupati Karo Nomor 361/139/BPBD/2016 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana Rumah (BDR) Dan/Atau Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) Untuk Relokasi Mandiri Warga Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal Dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo, yang terdiri atas Desa Gurukinayan 778 KK, Desa Kutatonggal 108 KK, Desa Berastepu 611 KK dan Desa Gamber 185 KK. Realisasi relokasi mandiri yang dilaksanakan diberikan berupa BDLUT untuk 1.679 KK dan BDR untuk 1.655 KK. Untuk proses BDLUT sudah selesai dilaksanakan, sedangkan BDR masih dalam proses pengerjaan. Relokasi mandiri menggunakan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB tahun anggaran 2015 sebesar Rp 190.674.100.000,-. Selain hal tersebut, ada penambahan penerima manfaat relokasi mandiri sebanyak 181 KK sesuai Keputusan Bupati Karo Nomor 361/90/BPBD/2016 Tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Dana Rumah Dan/Atau Bantuan Dana Lahan Usaha Tani Lanjutan Bagi Warga Yang Namanya Terdaftar Dalam Keputusan Bupati Karo Nomor 361/248/BPBD/2015 Tetapi Namanya Tidak Terdaftar Dalam Keputusan Bupati Karo Nomor 361/139/BPBD/2016 Untuk Relokasi Warga Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal Dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo. Pelaksanaan relokasi mandiri untuk 181 KK ini dan infrastruktur permukiman 1.655 KK menggunakan dana hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB tahun anggaran 2017 sebesar Rp 85.250.100.000,-.

Tahap ketiga, relokasi di Siosar sebanyak 1038 KK, masih belum terlaksana terkait permasalahan lahan dan masih diperlukan justifikasi teknis karena perubahan jumlah unit rumah relokasi. Tidak tertutup masih akan potensi perubahan data masyarakat mengingat yang diverifikasi masih data penduduk yang berdomisili di dalam desa, sedangkan data penduduk yang berdomisili di luar desa belum diverifikasi.

Realisasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunungapi Sinabung tahun 2015–2017 dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut :

Tabel 3.1
Rekapitulasi Realisasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo-Sumatera Utara Tahun 2015-2017

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan	TAHAP I	TAHAP II	TERDAMPAK	TOTAL REALISASI
		Siosar	Relokasi Mandiri	Erupsi Gunung Sinabung	
		Realisasi Kegiatan (Rp)	Realisasi Kegiatan (Rp)	Realisasi Kegiatan (Rp)	Realisasi Kegiatan (Rp)
1	2	3	4	4	5=3+4
1	Sektor Permukiman	74.486.863.500	125.233.500.000	-	199.720.363.500
a	Sub Sektor Perumahan	25.181.500.000	105.019.200.000	-	130.200.700.000
b	Sub Sektor Prasarana Lingkungan	49.305.363.500	15.514.300.000	-	64.819.663.500
c	Pendampingan/Pemberdayaan Permukiman	-	4.700.000.000	-	4.700.000.000
2	Sektor Infrastruktur	814.405.670.000	900.370.000	-	815.306.040.000
a	Sub Sektor Transportasi	813.505.300.000	-	-	813.505.300.000
b	Sub Sektor Energi	900.370.000	900.370.000	-	1.800.740.000
c	Sub Sektor Air & Sanitasi	-	-	-	-
d	Sub Sektor Sumber Daya Air	-	-	-	-
3	Sektor Sosial	10.628.080.000	798.200.000	7.760.000.000	19.186.280.000
a	Sub Sektor Kesehatan	798.200.000	798.200.000	-	1.596.400.000
b	Sub Sektor Pendidikan	3.147.200.000	-	7.760.000.000	10.907.200.000
c	Sub Sektor Keagamaan	5.490.000.000	-	-	5.490.000.000
d	Sub Sektor Lembaga Sosial	742.680.000	-	-	742.680.000
e	Pendampingan/Pemberdayaan Sosial Masyarakat	450.000.000	-	-	450.000.000
4	Sektor Ekonomi	26.206.144.415	86.325.300.000	6.709.133.400	119.240.577.815
a	Sub Sektor Pertanian	25.231.981.915	85.159.800.000	5.748.133.400	116.139.915.315
b	Sub Sektor Peternakan	413.000.000	-	-	413.000.000
c	Sub Sektor Koperasi dan UKM	561.162.500	1.165.500.000	961.000.000	2.687.662.500
e	Pendampingan/Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	-	-	-
5	Lintas Sektor	6.442.830.000	-	-	6.442.830.000
a	Sub Sektor Pemerintahan	6.442.830.000	-	-	6.442.830.000
b	Sub Sektor Lingkungan Hidup & Kehutanan	-	-	-	-
c	Sub Sektor Pengurangan Resiko Bencana	-	-	-	-
d	Sub Sektor Perencanaan & Tata Ruang	-	-	-	-
e	Sub Sektor Keuangan & Perbankan	-	-	-	-
Total = 1+2+3+4+5		932.169.587.915	213.257.370.000	14.469.133.400	1.159.896.091.315

3.1.1. Realisasi Kegiatan Tahap II (Relokasi Mandiri)

Pelaksanaan Relokasi Tahap II sesuai dengan renaksi awal untuk 1.683 KK mengalami beberapa kendala dimana sampai dengan bulan Januari 2016 izin pinjam pakai lahan untuk pertanian belum juga terbit dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga muncul gagasan untuk melakukan pola kegiatan menjadi Relokasi Mandiri. Relokasi Mandiri yang dimaksud adalah masyarakat menyiapkan lahan dan membangun rumahnya secara mandiri serta didampingi secara teknis oleh tim pendamping (fasilisator).

Pemerintah Kabupaten Karo mendapatkan bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor HD-016/PK/2015 tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp 190.674.100.000,- yang diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada tanggal 23 Desember 2015, sehingga kegiatan seharusnya berakhir pada tanggal 23 Desember 2016, namun untuk mengoptimalkan sisa dana (Silpa) sebesar Rp 4.602.501.883,- maka Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu menerbitkan surat izin perpanjangan pemanfaatan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi Nomor S-863/PK/2016 tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017. Karena beberapa hal dan kendala di lapangan, Pemerintah Kabupaten Karo mengajukan perpanjangan kedua dan disetujui oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu hingga tanggal 15 Desember 2017.

Pada tanggal 09 Juni 2017 Pemerintah Kabupaten Karo juga mendapatkan bantuan dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 85.250.100.000,- yang diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Secara umum kebutuhan relokasi mandiri tidak jauh berbeda dengan relokasi tahap I di Siosar dimana kebutuhan utama adalah tersedianya rumah dan lahan pertanian masyarakat (1.683 KK) dari 4 desa (Desa Gurukinayan, Desa Gamber, Desa Berastepu, Desa Kutatonggal). Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo Bahwa masyarakat yang akan direlokasi Tahap II (Relokasi Mandiri) akan diberikan bantuan senilai Rp 110.000.000/KK dengan rincian bantuan dana rumah senilai Rp 59.400.000.-/KK (lahan rumah disediakan oleh masyarakat) dan bantuan dana lahan pertanian senilai Rp 50.600.000.-/KK.

Realisasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunungapi Sinabung tahap II (Relokasi Mandiri) sampai saat ini sedang

berlangsung dimana Bantuan Lahan Usaha Tani untuk 1.679 KK telah selesai dilaksanakan. Sedangkan Bantuan Dana Rumah (1.655 KK) dan prasarana lingkungan sampai saat ini dalam proses pembangunan dengan pola mandiri. Dimana proses pembangunan perumahan menggunakan metode hamparan, hingga saat ini telah terbangun sebanyak 21 hamparan (1.470 unit) yaitu: Hamparan Gajah (40 unit), Hamparan Nang Belawan 1 (55 unit), Hamparan Nang Belawan 2 (343 unit), Hamparan Kuta Mbelin 1 (7 unit), Hamparan Kuta Mbelin 2(12 unit), Hamparan Kuta Mbelin 3(98 unit), Hamparan Salit (33 unit), Hamparan Ndokum Siroga 1 (69 unit), Hamparan Ndokum Siroga 2 (58 unit), Hamparan Ndokum Siroga 3 (18 unit), Hamparan Surbakti 1 (67 unit), Hamparan Surbakti 2 (227 unit), Hamparan Surbakti 3 (95 unit), Hamparan Manuk Mulia 1(41 unit), Hamparan Manuk Mulia 2 (9 unit),Hamparan Manuk Mulia 3 (19 unit), Hamparan Singa (21 unit), Hamparan Kacaribu 1 (26 unit), Hamparan Kacaribu 2 (34 unit), Hamparan Gang Garuda (169 unit), Hamparan Sumbul (29 unit) dan180 unit perumahan mandiri olehwargayang tersebar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam pada penjelasan tabel berikut berikut :

Tabel 3.2

**RANGKUMAN PROGRES PER HAMPARAN PENYELESAIAN BDR REHAB-REKON
SINABUNG 10 FEBRUARI 2018**

NO	HAMPARAN	JUMLAH (KK)	PROGRES FISIK RATA- RATA (%)	PROGRES PENYALURAN DARI KPP KE AP (%)	PROGRES PENCAIRAN BDR (%)
1	RumahJadi	145	100.00%	100%	100%
2	Gajah	40	100.00%	100%	100%
3	Nang Belawan 1	54	100.00%	100%	100%
4	Nang Belawan 2	140	100.00%	100%	87%
5	Salit 1	33	100.00%	100%	100%
6	KutaMbelin 1	7	100.00%	100%	100%
7	KutaMbelin 2	12	100.00%	100%	100%
8	ManukMulia 2	9	100.00%	100%	100%
9	ManukMulia 3	18	100.00%	100%	100%
10	Surbakti 1	67	100.00%	100%	94%
11	Surbakti 3	95	100.00%	100%	100%
12	NdokumSiroga 1	69	100.00%	100%	100%
13	NdokumSiroga 2	58	100.00%	100%	80%
14	Singa	21	100.00%	100%	100%
15	Kacaribu 2	15	100.00%	100%	80%
16	GBKP NdokumSiroga	3	100.00%	100%	57%
17	MandiriTersebar 1(ArihErsada)	9	100.00%	100%	100%
18	MandiriTersebar 2 (ErsadaArih)	16	100.00%	100%	100%
19	MandiriTersebar 3 (Lau Borus)	6	100.00%	100%	100%

NO	HAMPARAN	JUMLAH (KK)	PROGRES FISIK RATA- RATA (%)	PROGRES PENYALURAN DARI KPP KE AP (%)	PROGRES PENCAIRAN BDR (%)
20	MandiriTersebar 4 (JumpaRezeki)	3	100.00%	100%	72%
21	MandiriTersebar 5 (SangapEncari)	3	100.00%	100%	72%
22	MandiriTersebar 6 (MajuBersama)	3	100.00%	100%	66%
23	MandiriTersebar 7 (Simalem)	11	100.00%	100%	80%
SUB TOTAL		837			
PROSES KONSTRUKSI					
1	Nang Belawan 2	201	83.00%	100%	87%
2	Kutambelin 3	98	61.00%	100%	72%
3	Surbakti 2	227	49.00%	100%	57%
4	Kacaribu 1	26	56.00%	100%	70%
5	Kacaribu 2	19	87.00%	100%	80%
6	Gang Garuda	173	42.00%	100%	79%
7	Sumbul	29	84.00%	100%	100%
8	GBKP NdokumSiroga	17	80.00%	100%	57%
9	MandiriTersebar 4 (JumpaRezeki)	8	87.00%	100%	72%
10	MandiriTersebar 5 (SangapEncari)	11	68.00%	100%	72%
11	MandiriTersebar 6 (MajuBersama)	8	83.00%	100%	66%
12	ManukMulia 3	1	0.00%	0%	0%
SUB TOTAL		818			
TOTAL		1,655			

Sumber : Bidang RR BPBD Kabupaten Karo (17 Februari 2018)

3.1.2. Realisasi Kegiatan Tahap III (Relokasi Siosar)

Relokasi tahap ketiga yang akan dilaksanakan di Siosar untuk masyarakat Desa Sigarang-garang, Desa Sukanalu, Desa Mardinding dan Dusun Lau Kawarsebanyak ±1.127 KK saat ini sedang dalam proses verifikasi warga penerima bantuan relokasi. Tidak tertutup masih akan potensi perubahan data masyarakat mengingat yang diverifikasi masih data penduduk yang berdomisili di dalam desa, sedangkan data penduduk yang berdomisili di luar desa belum diverifikasi. Lahan untuk permukiman di Siosar sedang dalam proses pematangan lahan yang menggunakan dana hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB tahun anggaran 2017 sebesar Rp 85.250.100.000,-. Untuk lahan usaha tani berada di areal pelepasan Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Nomor : SK.547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 tentang pelepasan Kawasan Hutan Produksi tetap dalam rangka TMKH untuk relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo seluas 480,11 Ha.

3.2. Kebutuhan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunungapi Sinabung Tahun 2018 – 2019

Rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini atau disebut juga rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunungapi Sinabung tahun 2018 – 2019 disusun sebagai perbaikan atas dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunungapi Sinabung 2015-2017 yang telah disusun sebelumnya berupa rencana relokasi 2.053 KK. Perbaikan rencana aksi ini diperlukan, mengingat adanya perkembangan kebutuhan dan kejadian bencana susulan berupa banjir lahar hujan dan peningkatan aktivitas erupsi Gunungapi Sinabung menjadi Awasi (level IV) mengakibatkan perluasan cakupan daerah terdampak bencana.

Gunungapi Sinabung dinaikkan statusnya menjadi Awasi (level IV) pada Selasa, 2 Juni 2015 pukul 23.00 WIB. Erupsi dan luncuran awan panas masih berfluktuasi. Bupati Karo telah menetapkan masa tanggap darurat sejak 2 Juni 2015 hingga 6 Juli 2015. Peningkatan status Gunungapi Sinabung menjadi Awasi disertai dengan bertambahnya area yang harus dikosongkan dalam radius 7 km di sisi tenggara dan selatan dari puncak kawah Sinabung menyebabkan jumlah pengungsi terus bertambah. Berdasarkan data sementara BNPB pada Rabu, 18 Juni 2015 tercatat pengungsi sebanyak 10.377 jiwa (2.762 KK) yang tersebar di 10 pos pengungsian. Pengungsi berasal dari Desa Guru Kinayan, Desa Tiga Pancur, Desa Pintu Besi, Desa Sukanalu, Desa Berastepu, Desa Sigarang-garang, Desa Jeraya, Desa Kuta Rayat, Desa Kuta Gunggung, Desa Mardinding, Desa Kuta Tengah, dan Dusun Lau Kawai. Pengungsi bukan hanya berasal dari desa sisi tenggara-selatan dari puncak kawah, tetapi masyarakat desa-desa di sisi utara, timur dan barat daya juga ikut mengungsi.

Penyelenggaraan kegiatan pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunungapi Sinabung direncanakan meliputi:

1. Penanganan pemenuhan Kebutuhan Relokasi Tahap II Mandiri (220 KK) untuk 1 Desa (Desa Gurukinayan);
2. Penanganan pemenuhan kebutuhan Relokasi dan Rekonstruksi tahap II Lanjutan; dan
3. Penanganan Kebutuhan Relokasi Tahap III (1.038KK)untuk 3 Desa dan 1 Dusun (Desa Sigaranggarang, Desa Sukanalu, Desa Mardinding dan Dusun Lau Kawai).

Tabel 3.3
Rekapitulasi Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca
Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Relokasi Mandiri	Siosar	Gunung Sinabung	PRAKIRAAN KEBUTUHAN	KETERANGAN
		Kebutuhan (Rp)	Kebutuhan (Rp)	Kebutuhan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)	
1	2	3	4	6	5=3+4	6
1	Sektor Permukiman	69.834.720.583	184.019.151.174	-	253.853.871.757	
a	Sub Sektor Perumahan	24.860.000.000	151.396.320.000	-	156.256.320.000	
b	Sub Sektor Prasarana Lingkungan	42.474.720.583	47.583.031.174	-	90.057.751.757	
c	Pendampingan/Fasilitator	2.500.000.000	5.039.800.000	-	7.539.800.000	
2	Sektor Infrastruktur	87.660.000.000	305.950.000.000	-	393.610.000.000	
a	Sub Sektor Transportasi	83.600.000.000	163.470.000.000	-	247.070.000.000	
b	Sub Sektor Energi	4.060.000.000	3.230.000.000	-	7.290.000.000	
c	Sub Sektor Air & Sanitasi	-	22.500.000.000	-	22.500.000.000	
d	Sub Sektor Sumber Daya Air	-	-	-	-	
e	Sub Sektor Ruang Terbuka Hijau	-	116.750.000.000	-	116.750.000.000	
3	Sektor Sosial	18.747.300.000	72.119.090.000	-	90.866.390.000	
a	Sub Sektor Kesehatan	1.017.900.000	8.526.850.000	-	9.544.750.000	
b	Sub Sektor Pendidikan	8.800.000.000	35.508.340.000	-	44.308.340.000	
c	Sub Sektor Keagamaan	2.200.000.000	11.000.000.000	-	13.200.000.000	
d	Sub Sektor Lembaga Sosial	6.729.400.000	14.283.900.000	-	21.013.300.000	
e	Pendampingan/Pemberdayaan Sosial Masyarakat	-	2.800.000.000	-	2.800.000.000	
4	Sektor Ekonomi	21.670.014.450	143.481.867.605	103.790.575.000	268.942.457.055	
a	Sub Sektor Pertanian	15.832.214.450	111.516.867.605	103.610.575.000	230.959.657.055	
b	Sub Sektor Peternakan	3.487.800.000	3.365.000.000	180.000.000	7.032.800.000	
c	Sub Sektor Koperasi dan UKM	2.350.000.000	8.100.000.000	-	10.450.000.000	
d	Sub Sektor Pariwisata	-	9.750.000.000	-	9.750.000.000	
e	Pendampingan/Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	10.750.000.000	-	10.750.000.000	
5	Lintas Sektor	5.345.000.000	46.873.900.000	-	52.218.900.000	
a	Sub Sektor Pemerintahan	1.020.000.000	31.898.900.000	-	32.918.900.000	
b	Sub Sektor Lingkungan Hidup & Kehutanan	3.750.000.000	4.750.000.000	-	8.500.000.000	
c	Sub Sektor Pengurangan Resiko Bencana	575.000.000	5.225.000.000	-	5.800.000.000	
d	Sub Sektor Perencanaan & Tata Ruang	-	5.000.000.000	-	5.000.000.000	
Total = 3+4		203.257.035.033	752.444.008.779	103.790.575.000	1.059.491.618.812	

3.2.1. Kajian Pemenuhan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Permukiman

Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman meliputi subsektor perumahan dan sub sektor prasarana lingkungan pada setiap tahapan relokasi. Secara umum pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman yang diinginkan masyarakat terdampak adalah pindah atau relokasi ke lahan yang disediakan pemerintah, dan pada umumnya mengharapkan pindah lokasi diluar tempat tinggal sebelumnya tetapi masih berada di daerah Kabupaten Karo serta masih saling berdekatan antar desa yang terkena

dampak karena adanya kesamaan kultur. Hanya sebagian kecil masyarakat yang memilih pindah lokasi yang dipilih sendiri atas biaya pemerintah.

Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman(1.112 KK) meliputi pemulihan kebutuhan permukiman tahap II relokasi mandiri (220 KK), pemulihan kebutuhan permukiman tahap III relokasi di Siosar (892 KK) dan pemulihan kebutuhan permukiman kebutuhan terdampak pascabencana erupsi Gunungapi Sinabung dengan total rencana kebutuhan sebesar Rp. 253.853.871.757,- meliputi pemulihan subsektor perumahan sebesar Rp.156.256.320.000,- subsektor prasarana lingkungan sebesar Rp.90.057.751.757,- dan sub sektor pendampingan sebesar Rp. 7.539.800.000,- Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Rekapitulasi Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Permukiman Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4
1	Sektor Permukiman		253.853.871.757
	Tahap II Relokasi Mandiri Lanjutan		69.834.720.583
a	Sub Sektor Perumahan	Kabanjahe,	24.860.000.000
b	Sub Sektor Prasarana Lingkungan	Simpang Empat,	42.474.720.583
c	Pendampingan Permukiman	Tigapanah	2.500.000.000
2	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)		184.019.151.174
a	Sub Sektor Perumahan	Merek,	131.396.320.000
b	Sub Sektor Prasarana Lingkungan	Tigapanah	47.583.031.174
c	Pendampingan/Fasilitator	(Siosar)	5.039.800.000

1. Lanjutan Tahap II Relokasi Mandiri (220 KK)

Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi tahap II (Relokasi Mandiri) untuk 220 KK yang berasal dari desa Gurukinayan menggunakan pola relokasi mandiri dimana masyarakat menyiapkan lahan dan membangun rumahnya secara mandiri serta didampingi secara teknis oleh tim pendamping (fasilitator).

Kebutuhan total sektor permukiman (220 KK) sebesar ± Rp. 69.834.720.583,- yang terdiri dari kebutuhan sektor perumahan dengan bantuan dana lahan tapak rumah dan rumah sebesar Rp. 13.068.000.000.- dengan harga satuan Rp. 59.400.000,-/KK, bantuan dana lahan usaha tani sebesar Rp. 11.132.000.000,- dengan harga satuan Rp. 50.600.000,-/KK, kebutuhan prasarana lingkungan sebesar Rp 42.474.720.583,-.Untuk kegiatan perencanaan dan supervisi prasarana

lingkungan, penataan dan perbaikan kualitas lingkungan, penyambungan daya listrik rumah 900 VA, penyambungan daya listrik sarana dan prasarana air minum (SPAM) dan dukungan kegiatan, telah dipenuhi melalui Hibah Rehabilitasi dan Rekontruksi BNPB yang bersumber dari APBN, sedangkan bantuan isi rumah sebesar Rp. 660.000.000,- dengan harga satuan Rp. 3.000.000,-/KK akan diberikan oleh Kementerian Sosial dan kebutuhan pedampingan permukiman sebesar Rp. 2.500.000.000,-. Total pemenuhan kebutuhan pasca bencana sektor permukiman relokasi tahap II (Relokasi Mandiri) 220 KK dapat dilihat pada tabel 3.5. Tabel 3.6 dan Tabel 3.7

Tabel 3.5
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Permukiman Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
1	Sektor Permukiman					
	Tahap II Relokasi Mandiri (Tambahan)					24.860.000.000
	a Bantuan Dana Tapak Rumah & Rumah (BDR)	Kabanjahe,	220	KK	59.400.000	13.068.000.000
	b Bantuan Lahan Usaha Tani (BDLUT)	Simpang Empat,	220	KK	50.600.000	11.132.000.000
	c Bantuan Isi Rumah	Tigapanah	220	KK	3.000.000	660.000.000

Tabel 3.6
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Prasarana Lingkungan Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
1	Sektor Permukiman					
	Tahap II Relokasi Mandiri					42.474.720.583
	a Perencanaan & Supervisi Prasarana Lingkungan	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah	1	Paket	2.201.721.361	2.201.721.361
	b Penataan Lingkungan & Perbaikan Kualitas Lingkungan (Infrastruktur Dasar) Untuk 220 KK		1	Paket	36.513.999.222	36.513.999.222
	c Penyambungan Daya Listrik Rumah	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah	1.253	KK	3.000.000	3.759.000.000

Tabel 3.7
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Pedampungan
Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
1	Sektor Permukiman					
	Tahap II Relokasi Mandiri Lanjutan					2.500.000.000
	Pendampingan Rehabilitasi & Rekontruksi	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah	1	Paket	2.500.000.000	2.500.000.000

2. Tahap III Relokasi Siosar (1.038 KK)

Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi tahap III untuk 1.038 KK terdiri dari 3 Desa dan 1 Dusun (Desa Mardinding, Desa Sigarang-garang, Desa Sukanalu dan Dusun Lau Kawar) yang merupakan desa terdampak langsung banjir lahar dingin erupsi Gunungapi Sinabung.

Lokasi relokasi tahap III ini direncanakan tetap berada pada lahan APL yang telah ditetapkan oleh Bupati Karo seluas 250 Ha di Siosar Kecamatan Merek, yang posisi pada *siteplan* berada dilokasi pengembangan. Namun masih membutuhkan penambahan desain *siteplan* lebih detil. Minimal kebutuhan lahan untuk permukiman tahap III ini adalah seluas 90 Ha dengan asumsi masing-masing KK memperoleh 200 m² untuk tapak rumah dan 50 m² untuk sarana dan prasarana lingkungan.

Kebutuhan total sektor permukiman (892 KK) sebesar Rp 184.019.151.174,- yang terdiri dari kebutuhan sektor perumahan sebesar ± Rp 131.399.320.000,- dengan kegiatan pembuatan *siteplan* sebesar Rp. 500.000.000,- pembangunan rumah sebesar Rp. 100.796.000.000,- dengan harga satuan Rp 113.000.000,-/KK, dan penyambungan daya listrik 900 VA serta instalasi dalam rumah sebesar Rp. 2.676.000.000 dengan harga satuan Rp. 3.000.000/KK dan pembuatan sertifikat rumah sebesar Rp. 267.600.000 dengan harga satuan Rp. 3.000.000/KK serta prasarana lingkungan sebesar ± Rp 47.583.031.174,- untuk kegiatan pembuatan jalan lingkungan dan sarana pendukung, penataan lingkungan dan perbaikan kualitas lingkungan, sarana dan prasarana air minum (SPAM), instalasi pengolahan air limbah (IPAL KOMUNAL), persampahan dan penerangan jalan lingkungan. Sedangkan untuk *land and clearing* lahan permukiman sebesar Rp. 7.433.690.250,- telah dipenuhi melalui hibah rehabilitasi dan rekontruksi BNPB yang bersumber dari APBN, sedangkan bantuan isi rumah sebesar Rp

3.114.000.000,- dengan harga satuan Rp. 3.000.000,-/KK akan diberikan oleh Kementerian Sosial. Total pemenuhan kebutuhan pasca bencana sektor permukiman relokasi tahap III di Siosar (892KK) dapat dilihat pada Tabel 3.8. Tabel 3.9. dan tabel 3.10.

Tabel 3.8
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Perumahan
Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
1	Sektor Permukiman					
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawai)					131.396.320.000
a	Pembuatan Site Plan	Merek, Tigapanah (Siosar)	1	Paket	500.000.000	500.000.000
b	Land & Clearing		70	Ha	328.571.429	23.000.000.000
c	Pembangunan Rumah (BDR)		892	KK	113.000.000	100.796.000.000
d	Bantuan Isi Rumah		892	KK	3.000.000	2.676.000.000
e	Penyambungan Daya Listrik 900 VA & Instalasi Dalam Rumah		892	KK	3.000.000	2.676.000.000
f	Konsultan Supervisi Pembangunan Rumah		1	KK	1.480.720.000	1.480.720.000
g	Pembuatan Setifikat Rumah		892	KK	300.000	267.600.000

Tabel 3.9
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Prasarana Lingkungan
Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
1	Sektor Permukiman					
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawai)					47.583.031.174
a	Jalan Lingkungan & Sarana Pendukung					
	1. Jalan Lingkungan (Paving Block)		1	Paket	9.484.499.376	9.484.499.376
	2. Saluran Type 1		1	Paket	2.553.753.461	2.553.753.461
	3. Saluran Type 2		1	Paket	4.305.510.255	4.305.510.255
	4. Saluran Type 3		1	Paket	7.327.423.255	7.327.423.255
	5. Pembuatan Gorong-gorong		1	Paket	729.196.202	729.196.202
b	Saluran Rumah Pemipaan		892	KK	1.500.000	1.338.000.000
c	IPAL Komunal		18	Unit	533.500.000	9.603.000.000
d	Persampahan		4	Unit	750.000.000	3.000.000.000
e	Penerangan Jalan Lingkungan (PJL)		9	Km	15.000.000	135.000.000
f	Penataan Lingkungan & Perbaikan Kualitas Lingku					
	1. Penataan Lingkungan Tembok Penahan		1	Paket	5.584.277.119	5.584.277.119
	2. Perbaikan Kualitas Lingkungan		1	Paket	2.000.000.000	2.000.000.000
	Konsultan Perencanaan Jalan lingkungan dan Sarana Pendukung		1	Paket	488.007.651	488.007.651
h	Konsultan Perencanaan IPAL Komunal		1	Paket	252.060.000	252.060.000
i	Konsultan Perencanaan Penerangan Jalan Lingku		1	Paket	10.000.000	10.000.000
	Konsultan Perencanaan Penataan					
j	Lingkungan dan Perbaikan Kualitas		1	Paket	151.685.542	151.685.542
k	Konsultan Supervisi Perencanaan IPAL Komunal		1	Paket	378.090.000	378.090.000
l	Konsultan Supervisi Perencanaan Penerangan Jala		1	Paket	15.000.000	15.000.000
	Konsultan Supervisi Perencanaan Penataan					
m	Lingkungan dan Perbaikan Kualitas Jalan		1	Paket	227.528.314	227.528.314

Tabel 3.10
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Pedampungan
Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
1	Sektor Permukiman					
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kavar)					5.039.800.000
a	Pendampingan Rehabilitasi & Rekonstruksi	Merek, Tigapanah (Siosar)	1	Paket	5.039.800.000	5.039.800.000

3.2.2.Kajian Pemenuhan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Infrastruktur

Secara umum pemenuhan kebutuhan sektor infrastruktur adalah membangun kembali dengan kualitas lebih baik terhadap aset yang rusak pada sektor transportasi dan SDA, selain memperbaiki aset yang rusak kebutuhan infrastruktur menuju daerah relokasi juga perlu dipenuhi.

Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur dengan total rencana kebutuhan sebesar Rp. 393.610.000.000,- meliputi pemulihan kebutuhan sub sektor transportasi dan sub sektor energi untuk tahap II relokasi mandiri (220 KK) sebesar Rp. 87.660.000.000,- dan pemulihan kebutuhan sub sektor transportasi, sub sektor energi, sub sektor air & sanitasi dan sub sektor ruang terbuka hijau untuk tahap III relokasi siosar sebesar Rp. 305.950.000.000,- Rincian pemenuhan kebutuhan sektor infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Infrastruktur
Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	6
2	Sektor Infrastruktur		393.610.000.000
	Tahap II (Relokasi Mandiri) Lanjutan		87.660.000.000
	a Sub Sektor Transfortasi	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah	83.600.000.000
	b Sub Sektor Energi		4.060.000.000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kavar)		305.950.000.000
	a Sub Sektor Transfortasi	Merek, Tigapanah (Siosar)	163.470.000.000
	b Sub Sektor Energi		3.230.000.000
	c Sub Sektor Air & Sanitasi		22.500.000.000
	d Sub Sektor Ruang Terbuka Hijau		116.750.000.000

1. Tahap II Relokasi Mandiri (1.875 KK)

Prioritas dalam pemenuhan kebutuhan pemulihan sektor infrastruktur pada relokasi tahap II (Relokasi Mandiri) diantaranya adalah pembangunan jembatan dan pembangunan jalan dan bangunan pendukung akses ke daerah relokasi mandiri, pembangunan jaringan energi listrik, penerangan jalan utama. Total kebutuhan sektor infrastruktur sebesar Rp 87.660.000.000,- terdiri dari pembangunan jembatan dan pembangunan jalan dan bangunan pendukung akses ke daerah relokasi mandiri sebesar Rp 83.600.000.000,- dan pembangunan jaringan energi listrik dan penerangan jalan utama sebesar Rp 4.060.000.000,- telah dipenuhi melalui Perusahaan Listrik Negara yang bersumber dari dana APBN. Kebutuhan pasca bencana subsektor transportasi dan subsektor energi tahap II relokasi mandiri (220 KK) dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.12
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Transportasi dan sub sektor energi Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	6
	Tahap II (Relokasi Mandiri) Lanjutan		87.660.000.000
	a Sub Sektor Transfortasi	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah	83.600.000.000
	b Sub Sektor Energi		4.060.000.000

2. Tahap III di Siosar (1.038 KK)

Pemenuhan kebutuhan pemulihan sektor infrastruktur pada relokasi tahap III di siosar diantaranya adalah peningkatan jalan ke daerah relokasi, pemasangan jaringan distribusi energi listrik. Kebutuhan lainnya adalah peningkatan sarana dan prasarana mode transportasi dan pembangunan system penyediaan air minum serta pembangunan sarana ruang terbuka hijau. Total kebutuhan sektor infrastruktur sebesar Rp 305.950.000.000,- terdiri dari subsektor transportasi sebesar Rp 163.470.000.000,-, subsektor energi sebesar Rp 3.230.000.000,-, subsektor air dan sanitasi sebesar Rp 22.500.000.000,- dan subsektor ruang terbuka hijau sebesar Rp 116.750.000.000,-. Kebutuhan pasca bencana sektor infrastruktur relokasi tahap III (1.038 KK) dapat dilihat pada tabel - tabel berikut :

Tabel 3.13
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Transportasi
Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	6
2	Sektor Infrastruktur		305,950,000,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kavar)		305,950,000,000
a	Sub Sektor Transfortasi	Merek, Tigapanah (Siosar)	163,470,000,000
b	Sub Sektor Energi		3,230,000,000
c	Sub Sektor Air & Sanitasi		22,500,000,000
d	Sub Sektor Ruang Terbuka Hijau		116,750,000,000

Tabel 3.14
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Energi
Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
2	Sektor Infrastruktur					
	b Sub Sektor Energi					3,230,000,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kavar)					3,230,000,000
	a Pembangunan Jaringan Energi Listrik	Merek, Tigapanah	1	Paket	1,980,000,000	1,980,000,000
	b Penerangan Jalan Utama	(Siosar)	75	Titik	2,000,000	150,000,000
	c Peemasangan Lampu Jalan		1	Paket	1,100,000,000	1,100,000,000

Tabel 3.15
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Air & Sanitasi
Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
2	Sektor Infrastruktur					
	c Sub Sektor Air & Sanitasi					22,500,000,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kavar)					22,500,000,000
	a Sistem Pemediaan Air Minum (SPAM)	Siosar	1	Unit	22,500,000,000	22,500,000,000

Tabel 3.16

Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Ruang Terbuka Hijau Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prkiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*5
2	Sektor Infrastruktur					
	e Sub Sektor Ruang Terbuka Hijau					116,750,000,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanahu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)					116,750,000,000
	a Penataan Pertamanan & Sarana Umum	Merek,	25	Ha	3,000,000,000	75,000,000,000
	b Tempat Pembuangan Sampah Akhir	Tigapanah	1	Unit	1,500,000,000	1,500,000,000
	c Tempat Pemakaman Umum	(Siosar)	7	Unit	5,750,000,000	40,250,000,000

3.2.3.Kajian Pemenuhan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Sosial

Dampak Erupsi Gunungapi Sinabung pada sektor sosial meliputi subsektor pendidikan, kesehatan, agama, lembaga sosial dan pendampingan/pemberdayaan sosial masyarakat membutuhkan total biaya sebesar Rp 90.866.390.000.-, upaya pemenuhan kebutuhan pemulihan pasca bencana Gunungapi Sinabung pada sektor sosial tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17

Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Sosial Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Total Kebutuhan (Rp)
			6
3	Sektor Sosial		90,866,390,000
	Tahap II Relokasi Mandiri Lanjutan		18,747,300,000
	a Sub Sektor Kesehatan	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah	1,017,900,000
	b Sub Sektor Pendidikan		8,800,000,000
	c Sub Sektor Agama		2,200,000,000
	d Sub Sektor Lembaga Sosial		6,729,400,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanahu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)		72,119,090,000
	a Sub Sektor Kesehatan	Merek, Tigapanah (Siosar)	8,526,850,000
	b Sub Sektor Pendidikan		35,508,340,000
	c Sub Sektor Agama		11,000,000,000
	d Sub Sektor Lembaga Sosial		14,283,900,000
	e Pendampingan/Pemberdayaan Sosial Masyarakat		2,800,000,000

1. Tahap II Relokasi Mandiri

Kegiatan percepatan untuk lanjutan tahap II relokasi mandiri sejumlah 1.875 KK (1.655 KK dan 220 KK) pada sektor sosial meliputi subsektor pendidikan, kesehatan, agama, dan lembaga sosial membutuhkan total biaya sebesar Rp 18.747.300.000,- dengan rincian :

1.1. Sub Sektor Kesehatan

Subsektor kesehatan membutuhkan biaya sebesar Rp 1.017.900.000,- yang akan dipergunakan untuk pembangunan puskesmas serta sarana dan prasarana kesehatan di wilayah relokasi mandiri seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Kesehatan
Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
3	Sektor Sosial					
	Tahap II Relokasi Mandiri					1.017.900.000
a	Pembangunan PUSTU & Sarana Pendukung	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah	2	Unit	450.000.000	900.000.000
b	Pengadaan Alat Kesehatan PUSTU					
	1. Steteskop Untuk Dewasa		2	Unit	1.300.000	2.600.000
	2. Steteskop Untuk Pediatric		2	Unit	1.500.000	3.000.000
	3. Standar Infus		2	Unit	1.250.000	2.500.000
	4. Lampur Periksa		2	Unit	1.200.000	2.400.000
	5. Tempat Tidur Periksa		2	Unit	6.000.000	12.000.000
	6. Timbangan Bayi		2	Unit	650.000	1.300.000
	7. Timbangan Dewasa		2	Unit	350.000	700.000
	8. Matras		4	Unit	1.500.000	6.000.000
	9. Lemari Obat		2	Unit	8.500.000	17.000.000
	10. Lemari Alat		2	Unit	8.200.000	16.400.000
	11. Meja Instrumen/Alat		2	Unit	3.500.000	7.000.000
	12. Pispot (Urinal)		2	Unit	2.500.000	5.000.000
	13. Lemari Kecil Pasien		2	Unit	6.500.000	13.000.000
	14. Tempat Tidur Persalinan.		2	Unit	11.000.000	22.000.000
	15. Kursi Roda		2	Unit	3.500.000	7.000.000

1.2 Sub Sektor Pendidikan

Subsektor pendidikan membutuhkan biaya sebesar Rp 8.800.000.000,- yang akan dipergunakan untuk pembangunan unit sekolah baru serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah relokasi mandiri seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Pendidikan
Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
3	Sektor Sosial					
	Tahap II Relokasi Mandiri					8.800.000.000
a	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah				
	USB PAUD		2	Unit	1.500.000.000	3.000.000.000
	USB SD		2	Unit	1.900.000.000	3.800.000.000
b	Pembangunan Ruang Kelas Baru					
	SDN Surbakti		2	Ruang	230.000.000	460.000.000
c	Rehabilitasi Gedung					
	Gedung SDN Perteguhan		3	Ruang	70.000.000	210.000.000
	Atap SDN Surbakti		11	Ruang	70.000.000	770.000.000
	Atap SMP Negeri 2 Simpang Empat		8	Ruang	70.000.000	560.000.000

1.3 Sub Sektor Agama

Subsektor Agama membutuhkan biaya sebesar Rp 2.200.000.000,- yang akan dipergunakan untuk pembangunan mesjid dan program peningkatan sumber daya manusia khususnya bidang keagamaan di wilayah relokasi mandiri seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Agama
Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
3	Sektor Sosial					
c	Sub Sektor Agama					2.200.000.000
	Tahap II Relokasi Mandiri					2.200.000.000
a	Mesjid & Serana Pendukung	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah	1	Unit	1.100.000.000	1.100.000.000
b	Program Peningkatan SDM Keagamaan		1	Paket	1.100.000.000	1.100.000.000

1.4. Sub Sektor Lembaga Sosial

Subsektor lembaga sosial membutuhkan biaya sebesar Rp 6.729.400.000,- yang akan dipergunakan untuk pembentukan pembinaan kelompok sanggar seni & budaya dan Program KKS,KIS,KIP &PKH. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.21
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Lembaga Sosial
Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
2	3	4	5	6	7=4*6
Sektor Sosial					
Tahap II Relokasi Mandiri					6.729.400.000
a	Pembentukan & Pembinaan Kelompok Sanggar Seni & Budaya	1	Paket	1.000.000.000	1.000.000.000
b	Program KKS,KIS, KIP & PKH	1	Paket	5.729.400.000	5.729.400.000

2. Tahap III Relokasi Siosar (1.038 KK)

Kegiatan percepatan untuk lanjutan tahap III relokasi siosar sejumlah 1.038 KK pada sektor sosial meliputi subsektor pendidikan, kesehatan, agama, dan lembaga sosial membutuhkan total biaya sebesar Rp 72.119.090.000,- dengan rincian :

2.1 Sub Sektor Kesehatan

Subsektor kesehatan membutuhkan biaya sebesar Rp 8.526.850.000,- yang akan dipergunakan untuk pembangunan puskesmas serta sarana dan prasarana kesehatan di wilayah relokasi siosar seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.22
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Kesehatan
Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
3	Sektor Sosial					
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau K					8.526.850.000
a	Pembangunan Puskesmas & Sarana Pendukung	Merek, Tigapanah (Siosar)	1	Unit	5.500.000.000	5.500.000.000
b	Pembangunan PUSTU Masing-masing Desa		3	Unit	250.000.000	750.000.000
c	Pengadaan Rumah Medis & Paramedis		4	Unit	400.000.000	1.600.000.000
d	Pengadaan Alat Kesehatan PUSTU					
	1. Steteskop Untuk Dewasa		3	Unit	1.300.000	3.900.000
	2. Steteskop Untuk Pediatric		3	Unit	1.500.000	4.500.000
	3. Standar Infus		3	Unit	1.250.000	3.750.000
	4. Lampur Periksa		3	Unit	1.200.000	3.600.000
	5. Tempat Tidur Periksa		3	Unit	6.000.000	18.000.000
	6. Timbangan Bawi		3	Unit	650.000	1.950.000
	7. Timbangan Dewasa		3	Unit	350.000	1.050.000
	8. Matras		6	Unit	1.500.000	9.000.000
	9. Lemari Obat		3	Unit	8.500.000	25.500.000
	10. Lemari Alat		3	Unit	8.200.000	24.600.000
	11. Meja Instrumen/Alat		3	Unit	3.500.000	10.500.000
	12. Pispot (Urinal)		3	Unit	2.500.000	7.500.000
	13. Lemari Kecil Pasien		3	Unit	6.500.000	19.500.000
	14. Tempat Tidur Persalinan.		3	Unit	11.000.000	33.000.000
	15. Kursi Roda		3	Unit	3.500.000	10.500.000
e	Pengadaan Transportasi Medis		1	Unit	500.000.000	500.000.000

2.2 Sub Sektor Pendidikan

Subsektor pendidikan membutuhkan biaya sebesar Rp 35.508.340.000,- yang akan dipergunakan untuk pembangunan sekolah baru serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah relokasi Siosar tahap I sebelumnya seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Pendidikan
Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
3	Sektor Sosial					
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kavar)					35.508.340.000
	a Pembangunan Perpustakaan Sekolah & Sarana Pendukung	Merek, Tigapanah (Siosar)	1	Unit	856.000.000	856.000.000
	b Program Bea Siswa Berprestasi		1	Paket	11.530.000.000	11.530.000.000
	c Program Peningkatan SDM Guru/Pendidik		1	Paket	150.000.000	150.000.000
	a Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)					
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		1	Unit	1.500.000.000	1.500.000.000
	Sekolah Dasar (SD)		2	Unit	3.300.000.000	6.600.000.000
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)		1	Unit	2.500.000.000	2.500.000.000
	b Pengadaan Sarana & Prasarana Sekolah					
	Pengadaan Sarana & Prasarana PAUD		1	Paket	2.000.000.000	2.000.000.000
	Pengadaan Sarana & Prasarana SD		1	Paket	3.275.600.000	3.275.600.000
	Pengadaan Sarana & Prasarana SMP		1	Paket	2.353.400.000	2.353.400.000
	c Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa		3	Paket	400.000.000	1.200.000.000
	d Program Peningkatan SDM Guru/Pendidik		1	Paket	1.500.000.000	1.500.000.000
	e Troumahelling		1	Paket	700.000.000	700.000.000
	f Pembangunan Perpustakaan Sekolah & Sarana Pendukung		1	Unit	450.000.000	450.000.000
	g Konsultan Perencanaan		1	Paket	382.860.000	382.860.000
	h Konsultan Supervisi		1	Paket	510.480.000	510.480.000

2.3 Sub Sektor Agama

Subsektor lembaga agama membutuhkan biaya sebesar Rp 11.000.000.000,- yang akan dipergunakan untuk pemabangunan rumah ibadah dan sarana pendukung. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.24
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Agama
Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
3	Sektor Sosial					
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kavar)					11.000.000.000
	a Masjid & Sarana Pendukung	Merek, Tigapanah (Siosar)	1	Unit	1.100.000.000	1.100.000.000
	b Gereja & Sarana Pendukung					
	Gereja GBKP & Sarana Pendukung		3	Unit	1.100.000.000	3.300.000.000
	Gereja Katolik & Sarana Pendukung		3	Unit	1.100.000.000	3.300.000.000
	Gereja Pentakosta & Sarana Pendukung		2	Unit	1.100.000.000	2.200.000.000
	c Program Peningkatan SDM Keagamaan		1	Paket	1.100.000.000	1.100.000.000

2.4 Sub Sektor Lembaga Sosial dan Sub Sektor Pendampingan/Pemberdayaan Sosial Masyarakat

Subsektor lembaga sosial membutuhkan biaya sebesar Rp 14.283.900.000,- yang akan dipergunakan untuk bantuan penyediaan jadup, psikososial, pembinaan kelompok sanggar seni dan budaya dan pembangunan perpustakaan desa beserta sarana dan prasarana pendukung sebagai upaya meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat desa serta program KKS, KIS, KIP dan PKH . Sub sektor pendampingan/pemberdayaan sosial masyarakat membutuhkan biaya sebesar Rp. 2.800.000.000,- Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Lembaga Sosial Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
3	Sektor Sosial					
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kavar)					14.283.900.000
	a Bantuan Penyedian Jadup	Merek, Tigapanah (Siosar)	1	Paket	4.954.500.000	4.954.500.000
	b Psikososial		1	Paket	600.000.000	600.000.000
	c Perpustakaan Desa & Sarana Pendukung		2	Paket	1.000.000.000	2.000.000.000
	d Pembentukan & Pembinaan Kelompok Sanggar Seni & Budaya		1	Paket	1.000.000.000	1.000.000.000
	e Program KKS, KIS, KIP & PKH		1	Paket	5.729.400.000	5.729.400.000

Tabel 3.26
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Pendampingan/Pemberdayaan Sosial Masyarakat Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
3	Sektor Sosial					
	e Pendampingan/Pemberdayaan Sosial Masyarakat					2.800.000.000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kavar)					2.800.000.000
	a Pendampingan Sektor Sosial	Merek, Tigapanah (Siosar)	4	Paket	700.000.000	2.800.000.000

3.2.4.Kajian Pemenuhan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Ekonomi

Pemulihan ekonomi pada daerah relokasi direncanakan dengan total biaya sebesar Rp. 268.942.457.055,- akan dilaksanakan tahap II relokasi mandiri melalui subsektor pertanian sebesar Rp. 15.832.214.450,- subsektor peternakan sebesar Rp. 3.487.800.000,- subsektor koperasi dan UKM sebesar Rp. 2.350.000.000,- dan tahap III relokasi siosar (1038 KK) melalui subsektor pertanian sebesar Rp. 111.516.867.605,- subsektor peternakan sebesar Rp. 3.365.000.000,-, subsektor koperasi dan UKM sebesar Rp. 8.100.000.000,- subsektor pariwisata sebesar Rp. 9.750.000.000. dan pendampingan &pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 10.750.000.000,- serta non relokasi melalui Sub sektor pertanian sebesar Rp. 103.610.575.000,- dan subsektor peternakan sebesar Rp. 180.000.000,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.27
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Ekonomi Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	6
4	Sektor Ekonomi		268.942.457.055
	Tahap II Relokasi Mandiri Lanjutan		21.670.014.450
a	Sub Sektor Pertanian	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah	15.832.214.450
b	Sub Sektor Peternakan		3.487.800.000
c	Sub Sektor Koperasi & UKM		2.350.000.000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kavar)		143.481.867.605
a	Sub Sektor Pertanian	Merek, Tigapanah (Siosar)	111.516.867.605
b	Sub Sektor Peternakan		3.365.000.000
c	Sub Sektor Koperasi & UKM		8.100.000.000
d	Sub Sektor Pariwisata		9.750.000.000
e	Pendampingan/Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		10.750.000.000
	Non Relokasi		103.790.575.000
a	Sub Sektor Pertanian	Namanteran, Merdeka,	103.610.575.000
b	Sub Sektor Peternakan		180.000.000

1. Tahap II Relokasi Mandiri (1.875 KK)

Pemulihan ekonomi pada relokasi tahap II (Relokasi Mandiri) sebanyak 1.875 KK, (1.655 KK dan 220 KK) direncanakan akan dilaksanakan melalui subsektor pertanian, peternakan dan koperasi & UKM dengan total biaya sebesar Rp. 21.670.014.450,- dapat dilihat pada penjelasan berikut :

1.1 Sub Sektor Pertanian

Pada subsektor pertanian terdapat perbedaan jumlah penerima bantuan yakni penerima bantuan lahan usaha tani (1.899 KK) dengan bantuan dana rumah (1.875 KK) disebabkan tidak semua penerimaan bantuan dana lahan usaha tani (BDLUT)

mendapatkan bantuan dana rumah (BDR). Dimana kebutuhan BDLUT (1.679 KK) telah selesai dilaksanakan menggunakan dana Hibab BNPB tahun 2015 sehingga total kebutuhan subsektor pertanian sebesar Rp. 15.832.214.450,-. Kegiatan dan kebutuhan subsektor pertanian disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 3.28
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Ekonomi Pasca Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
4	Sektor Ekonomi					
	Tahap II Relokasi Mandiri					15.832.214.450
a	Verifikasi & Validasi Penerima Bantuan Pertanian	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah, Merdeka, Namanteran,	1	Paket	200.000.000	200.000.000
b	Pengadaan Pupuk & Saprodi	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah, Merdeka, Namanteran,	1	Paket	10.596.575.000	10.596.575.000
c	Pengadaan Bibit Tanaman dan Pupuk	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah,	1	Paket	1.297.660.000	1.297.660.000
d	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah,	1	Paket	3.487.479.450	3.487.479.450
e	Bimtek Penerapan Teknologi Pertanian Bagi Petani	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah,	3	Unit	50.000.000	150.000.000
f	Verifikasi & Validasi Penerima Bantuan Pertanian	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah,	670	OH	150.000	100.500.000

1.2 Sub Sektor Peternakan

Dukungan pemulihan ekonomi pada subsektor peternakan pada relokasi 1.875 KK direncanakan berupa kegiatan pengadaan bibit peternakan unggas, peningkatan produksi peternakan unggas dan bomtek/penyuluhan peternakan unggas. Nilai kebutuhan untuk kegiatan subsektor peternakan adalah Rp 3.487.800.000,- dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.29
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Peternakan Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
4	Sektor Ekonomi					
	Tahap II Relokasi Mandiri Lanjutan					3.487.800.000
a	Pengadaan Bibit Peternakan Unggas	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah	1	Paket	1.162.800.000	1.162.800.000
b	Peningkatan Produksi Peternakan Unggas					
	Pengadaan Kandang Ternak Unggas		40	Paket	12.000.000	480.000.000
	Pakan & Obat - Obatan Ternak Unggas		40	Paket	45.000.000	1.800.000.000
c	Bimtek Dan Penyuluhan Peternakan Unggas		1	Paket	45.000.000	45.000.000

1.3 SubSektor Koperasi & UKM

Kegiatan subsektor Koperasi & UKM berupa pembinaan dan peningkatan produktifitas Koperasi & UKM dengan kebutuhan dana sebesar Rp 2.350.000.000,- rekapitulasi kebutuhan pada subsektor ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.30
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Koperasi & UKM
Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
4	Sektor Ekonomi					
	Tahap II Relokasi Mandiri Lanjutan					2.350.000.000
a	Pembinaan Industri Kecil Menengah	Kabanjaje,	1	Paket	350.000.000	350.000.000
b	Pembinaan Koperasi & UKM	Simpang	5	Paket	50.000.000	250.000.000
c	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama	Empat,	1	Paket	1.500.000.000	1.500.000.000
d	Peningkatan Produktifitas Koperasi & UKM	Tigapanah	5	Paket	50.000.000	250.000.000

2. Tahap III Relokasi di Siosar (1,038 KK)

Dari perkembangan aktivitas Gunungapi Sinabung yang semakin meningkat menjadikan adanya penambahan desa yang berpotensi untuk direlokasi dengan penduduk sebanyak 1.038 KK. Desa tersebut adalah Sigarang - garang, Mardinding, Sukanalu, dan Dusun Lau Kawar. Program pemulihan ekonomi sebesar Rp. 93.320.867.605,- untuk masyarakat yang berpotensi direlokasi dijelaskan berikut ini;

2.1 Sub Sektor Pertanian

Program subsektor pertanian sebesar Rp. 111.516.867.605,- adalah: 1) penyimpanan dan pengelohan lahan pertanian, 2) pengadaan bibit pertanian, 3) pengadaan pupuk dan saprodi, 4) pengadaan sapras pertanian, 5) bimtek dan penyuluhan pertanian, 6) kegiatan pendukung seperti pembangunan jalan usaha tani, pembuatan embung dan pengadaan alsintan. Untuk lebih lengkapnya disajikan pada Tabel 3.31 dibawah ini.

Tabel 3.31
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Pertanian
Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
4	Sektor Ekonomi					
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)					111.516.867.605
	a. Penyediaan & Pengolahan Lahan Pertanian	Merek, Tigapanah (Siosar)	1.038	KK	20.000.000	20.760.000.000
	b. Pengadaan Benih Pertanian		1.038	KK	650.000	674.700.000
	c. Pengadaan Pupuk & Saprodi		1.038	KK	1.000.000	1.038.000.000
	d. Pengadaan Saprasi Pertanian		1.038	KK	2.400.000	2.491.200.000
	e. Bimtek Dan Penyuluhan Pertanian		4	Paket	50.000.000	200.000.000
	f. Pembangunan Embung		5	Paket	1.000.000.000	5.000.000.000
	g. Peningkatan & Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebun		1	Paket	1.200.000.000	1.200.000.000
	h. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebun					
	i. Khusus Kawasan Terdampak Erupsi Sinabung		1	Paket	35.211.967.605	35.211.967.605
	j. Pengembangan Jalan Usaha Tani		30	Km	600.000.000	18.000.000.000
	k. Pengadaan Alsintan					
	- TR 2 Rotari		74	Unit	43.000.000	3.182.000.000
	- Cultivator		101	Unit	18.000.000	1.818.000.000
	l. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat					
	- Sapi	Merek, Tigapanah (Siosar)	96	Ekor	19.000.000	1.824.000.000
	- Kandang Sapi		12	Unit	36.480.000	437.760.000
	- Obat-obatan Sapi		1	Paket	29.352.000	29.352.000
	- Perluasan Hijauan Pakan Ternak		24	Ha	10.000.000	240.000.000
	- Kambing		240	Ekor	2.000.000	480.000.000
	- Kandang Kambing		20	Unit	20.000.000	400.000.000
	- Obat-obatan Kambing		1	Paket	49.888.000	49.888.000
	m. Bimtek Teknologi Peternakan		4	Pertemuan	45.000.000	180.000.000
	n. Jalan Usaha Tani					
	- Jasa Konsultan Perencanaan		1	Paket	386.000.000	386.000.000
	- Jasa Konsultan Pengawas		1	Paket	464.000.000	464.000.000
	- Biaya Umum		1	Paket	150.000.000	150.000.000
	- Peningkatan Jalan Usaha Tani		30	Paket	570.000.000	17.100.000.000

2.2 Sub Sektor Peternakan

Kegiatan subsektor peternakan untuk masyarakat berpotensi relokasi 1.038KK direncanakan berupa peternakan domba dan penggemukan sapi potong atau peternakan sapi perah. Nilai kebutuhan untuk kegiatan subsektor peternakan adalah Rp 3.365.000.000,-. Kebutuhan pendanaan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.32
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Peternakan
Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
4	Sektor Ekonomi					
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)					3.365.000.000
	a. Pengadaan Bibit Ternak Domba & Sapi	Merek, Tigapanah (Siosar)	1	Paket	2.200.000.000	2.200.000.000
	b. Peningkatan Produksi Peternakan Domba & Sapi					
	Pengadaan Kandang Peternakan		1	Paket	700.000.000	700.000.000
	Perluasan Hijauan Pakan Ternak		1	Paket	420.000.000	420.000.000
	c. Bimtek Dan Penyuluhan Peternakan Domba & Sapi		1	Paket	45.000.000	45.000.000

Pada peternakan domba setiap KK akan mendapatkan 1 ekor bibit domba, kandang, dan pelatihan peternakan domba. Peternakan domba akan dilakukan dengan pembuatan kandang didekat rumah.

Pada budidaya penggemukan sapi ataupun peternakan sapi perah, setiap KK akan mendapatkan 1 ekor bibit sapi, konsentrat, pakan hijauan, obat hewan, kandang dan pelatihan peternakan. Untuk kandang peternakan sapi akan dibuatkan berupa kandang komunal.

2.3 Sub Sektor Koperasi & UKM

Seperti halnya pada kegiatan relokasi awal di siosar untuk 370 KK maka pada relokasi tahap III sebanyak1.038 KK ini yang juga dilakukan di siosar, pada subsektor Koperasi & UKM berupa bimbingan teknis keterampilan dengan kebutuhan dana sebesar Rp 8.100.000.000,-.Rekapitulasi Kebutuhan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.33
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Koperasi dan UKM
Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
4	Sektor Ekonomi					
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)					8.100.000.000
	a Pembentukan Serta Pembinaan Koperasi & UKM	Merek, Tigapanah (Siosar)	4	Paket	50.000.000	200.000.000
	b Pelatihan Usaha Kecil Menengah		4	Paket	375.000.000	1.500.000.000
	c Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama		1	Paket	1.500.000.000	1.500.000.000
	d Peningkatan Produktifitas Koperasi & UKM		6	Paket	400.000.000	2.400.000.000
	e Pengadaan Pasar Tradisional & Sarana Pendukung		1	Paket	2.500.000.000	2.500.000.000

2.4 Sub Sektor Pariwisata

Mengingat bahwa Kabupten Karo sebagai destinasi wisata di Propinsi Sumatera Utara yang memiliki banyak objek wisata dan melihat daerah relokasi di siosar yang sangat berpotensi menjadi destinasi wisata baru maka dipandang perlu untuk melakukan pembangunan objek wisata dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 9.750.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.34
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Pariwisata
Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
4	Sektor Ekonomi					
	d Sub Sektor Pariwisata					9.750.000.000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kavar)					9.750.000.000
	a Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Siosar	Merek, Tigapanah (Siosar)	1	Paket	700.000.000	700.000.000
	b Pengadaan Museum Gunungapi Sinabung & Sarana Pendukung		1	Paket	5.300.000.000	5.300.000.000
	c Sosialisasi & Promosi Wisata Karo		1	Paket	3.000.000.000	3.000.000.000
	d Sosialisasi Sadar Wisata		1	Paket	750.000.000	750.000.000

3.2.5.Kajian Pemenuhan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lintas Sektor

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi dan banjir lahar hujan Gunungapi Sinabung tahun 2018 – 2019 dibagi dalam tigabagian yaitu lanjutan relokasi tahap II (1682 KK) Relokasi Mandiri, relokasi tahap III (1.038 KK) di siosar dan rehabilitasi dan rekonstruksi diluar relokasi, Berdasarkan kajian kebutuhan lintas sektor dengan melihat kearifan lokal, menghindari konflik sosial dan sesuai musyawarah masyarakat, bahwa masyarakat meminta bedol desa dan nama desa jangan diganti. Diperlukan pemulihan subsektor pemerintahan agar masyarakat kembali mendapat pelayanan pemerintahan yang memadai, dengan membangun balai desa, kantor desa, *dispaly room*, kantor PPK desa dan Jambur serta fasilitas pengurusan surat/dokumen penting. Kajian kebutuhan lintas sebesar Rp 52.218.900.000,-. Dapat dilihat pada rincian berikut :

Tabel 3.35
Rekapitulasi Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lintas Sektor
PascaErupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	6
5	Lintas Sektor		52.218.900.000
	Tahap II Relokasi Mandiri Lanjutan		5.345.000.000
	a Sub Sektor Pemerintahan	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah	1.020.000.000
	a Sub Sektor Lingkungan Hidup & Kehutanan		3.750.000.000
	b Sub Sektor Pengurangan Resiko Bencana		575.000.000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kavar)		46.873.900.000
	a Sub Sektor Pemerintahan	Merek, Tigapanah (Siosar)	31.898.900.000
	b Sub Sektor Lingkungan Hidup & Kehutanan		4.750.000.000
	c Sub Sektor Pengurangan Resiko Bencana		5.225.000.000
	d Sub Sektor Perencanaan & Tata Ruang		5.000.000.000

2. Tahap III Relokasi di Siosar (1.038 KK)

Jumlah desa untuk potensi relokasi tahap III di siosar adalah 3 desa 1 dusun yaitu Desa Sigaranggarang, Desa Sukanalu, Desa Mardinding dan Dusun Lau Kawar dengan jumlah kepala keluarga 1.038 KK. Tidak tertutup masih akan potensi perubahan data masyarakat mengingat yang diverifikasi masih data penduduk yang berdomisili di dalam desa, sedangkan data penduduk yang berdomisili di luar desa belum diverifikasi. Kajian kebutuhan relokasi tahap III di siosar sama dengan relokasi tahap I di siosar yang telah dilaksanakan sebelumnya, diperlukan pemulihan subsektor pemerintahan agar masyarakat kembali mendapat pelayanan pemerintahan yang memadai untuk 3 desa 1 dusun, dengan membangun balai desa, kantor desa, *display room*, kantor PPK desa dan jambur serta fasilitasi pengurusan surat/dokumen penting, fasilitasi perbankan dengan restrukturisasi pinjaman melalui penundaan utang masyarakat dan keringanan bunga utang. Kebutuhan lintas sektor untuk potensi relokasi tahap III sebesar Rp 46.873.900.000,-. Untuk melihat rincian lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.39, tabel 3.40, Tabel 3.41 dan Tabel 3.42

Tabel 3.39
Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sub sektor pemerintahan
Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
5	Lintas Sektor					
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)					31.898.900.000
	a Pembangunan Kantor & Prasarana Pendukung	Merek, Tigapanah (Siosar)				
	Kantor Kapala Desa		3	Unit	310.000.000	930.000.000
	Pos Babinsa		1	Unit	350.000.000	350.000.000
	Pos Polmas		1	Unit	350.000.000	350.000.000
	b Jambur Desa & Prasarana Pendukung		3	Unit	1.035.000.000	3.105.000.000
	d Pembangunan Gapura Desa		3	Unit	40.000.000	120.000.000
	e Pembangunan Gedung Olah Raga & Sarana Pendukung		1	Paket	25.000.000.000	25.000.000.000
	f Penataan Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil		1	Paket	300.000.000	300.000.000
	g Pembangunan Balai Desa		3	Paket	450.000.000	1.350.000.000
	h Konsultan Perencana		1	Paket	168.900.000	168.900.000
	i Konsultan Supervisi		1	Paket	225.000.000	225.000.000

Tabel 3.40

Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sub sektor lingkungan hidup & kehutanan Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
1	Lintas Sektor					
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kavar)					4.750.000.000
a	Reboisasi & Penghijauan	Merek, Tigapanah	100	Ha	10.000.000	1.000.000.000
b	Pengadaan Bibit Kayu & MPTS	(Siosar)	500.000	Btg	7.500	3.750.000.000

Tabel 3.41

Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sub sektor penurunan resiko bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
1	Lintas Sektor					
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kavar)					5.225.000.000
a	Penyusunan PRB Daerah	Kabupaten Karo	1	Paket	1.000.000.000	1.000.000.000
b	Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Erupsi Sinabung	Kabupaten Karo	1	Paket	1.200.000.000	1.200.000.000
c	Desa Tangguh Siaga Bencana	Kabupaten Karo	1	Paket	575.000.000	575.000.000
d	Pembuatan Buku Kebencanaan	Kabupaten Karo	1	Paket	250.000.000	250.000.000
e	Pengadaan Radio Komunikasi Handy Talky (HT)	Kabupaten Karo	100	Unit	1.500.000	150.000.000
f	Pembangunan Tower Repieter	Kabupaten Karo	4	Unit	12.500.000	50.000.000
g	Pengadaan Perangkat Call Centre 112	Kabupaten Karo	1	Paket	800.000.000	800.000.000
h	Pembuatan Film Dokumenter Bencana Gunung Sinabung	Kabupaten Karo	1	Paket	1.200.000.000	1.200.000.000

Tabel 3.42

Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sub sektor perencanaan & Tata Ruang Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
1	Lintas Sektor					
	d Sub Sektor Perencanaan & Tata Ruang					5.000.000.000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kavar)					5.000.000.000
a	Perencanaan Tata Ruang Gunung Sinabung					
	Pengelolaan Peta Rawan Bencana	Merek, Tigapanah	1	Paket	3.000.000.000	3.000.000.000
	Penataan Ruang Berbasis PRB	(Siosar)	1	Paket	2.000.000.000	2.000.000.000

BAB IV

PRINSIP DAN KEBIJAKAN

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

4.1.Prinsip Dasar

Prinsip dasar penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat, Dunia Usaha dan BUMD/N bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
2. Pendanaan penanggulangan bencana tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana prasarana fisik dan non fisik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan.
3. Membangun kembali lebih baik dan aman (*Build Back Better and Safer*) yang berbasis pada konsep pengurangan risiko bencana.
4. Pemulihan dilakukan secara komprehensif meliputi semua sector terdampak yaitu perumahan dan prasarana permukiman, infrastruktur, Sosial, Ekonomi Produktif dan Lintas Sektor.
5. Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, program berkelanjutan, serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Menggunakan pendekatan sosial budaya, adat istiadat dan mengutamakan penggunaan sumber daya setempat.
7. Dilaksanakan tepat waktu secara terencana, terpadu, koordinatif dan berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan daerah.
8. Mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak-anak dan penyandang cacat serta mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada prinsipnya adalah upaya mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana pada situasi yang lebih baik dari sebelumnya. Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

4.2. Kebijakan dan Strategi

4.2.1. Kebijakan

Kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi ditetapkan sebagai berikut:

1. Dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Karo diberikan dalam bentuk hibah.
2. Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Karo dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dituangkan dalam DPA BPBD Kabupaten Karo sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

3. Pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Karo dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana didasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :224/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan Peraturan Kepala BNPB Nomor: 04 Tahun 2015 Tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana yang selanjutnya dijabarkan dalam suatu juklak yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.
4. Pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah bersumber dari APBN yang disalurkan dari RKUN ke RKUD sehingga tidak termasuk di dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Dana APBD.
5. Pemanfaatan dana bantuan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, paling lambat 12 (duabelas) bulan setelah dana diterima di RKUD, dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Kepala BNPB.
6. Khusus untuk hibah dalam bentuk BLM yang berupa Bantuan Dana Rumah (BDR) dan Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) disalurkan berdasarkan kebijakan sebagai berikut :
 - a. BDR/BDLUT merupakan dana stimulan yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo.
 - b. Penyaluran dana dari RKUD ke Rekening Kelompok Petani/Pemukim (KPP).
 - c. Luas Lahan Tapak Rumah (LTR) untuk dibangun ditetapkan minimal 75 m² dengan luas bangunan rumah sesuai kebutuhan. Rumah yang akan dibangun memenuhi standarisasi bangunan rumah tahan gempa.
 - d. BDLUT digunakan untuk pengadaan Lahan Usaha Tani. Luas Lahan Usaha Tani (LUT) ditetapkan minimal 1.000 m².

- e. Harga LTR/LUT ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara penjual (pemilik lahan) dan pembeli (penerima bantuan) yang selanjutnya dituangkan kedalam dokumen Perikatan Jual Beli atau Akta Jual Beli atau Bukti Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT setempat.
- f. Letak lokasi LTR/LUT berada di wilayah Kabupaten Karo dan di luar zona berbahaya yang telah ditetapkan oleh PVMBG.
- g. Status LTR/LUT bukan merupakan lahan milik pemerintah, bukan lahan konservasi/kawasan hutan, juga bukan lahan seng ketadan atau berpotensi sengketa.
- h. Masyarakat penerima manfaat yang telah memiliki LTR atas namanya sendiri dengan luas minimal 75 m² dan atau LUT atas nama sendiri dengan luas minimal 1000 m², dapat mengusulkan untuk mendapatkan kompensasi senilai hibah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi.
- i. Masyarakat penerima manfaat yang telah memiliki rumah atas namanya sendiri yang dibangun di atas lahan miliknya sendiri dapat mengusulkan untuk mendapatkan kompensasi senilai hibah yang telah ditetapkan. Nilai kompensasi dihitung berdasarkan nilai harga bangunan dan nilai harga lahan tapak rumah. Bangunan rumah yang dapat dikompensasi adalah yang dibangun di atas lahan minimal 75 m² dan memenuhi standarisasi rumah sehat dan layak huni yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi.
- j. Masyarakat penerima manfaat dapat membangun rumahnya di atas LUT miliknya sendiri atau LUT yang telah dibelinya melalui BDLUT.

4.2.2. Strategi

Sejalan dengan kebijakan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, maka strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Alokasi hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan hasil asistensi RKA oleh BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Utara terhadap usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
2. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi sektor permukiman, sector infrastruktur, sector ekonomi, sector sosial dan lintas sector

berbasis komunitas dirancang dengan strategi pengorganisasian masyarakat (*Community Organizing*) dan bertumpu pada inisiatif dan prakarsa masyarakat (*Participatory Development*) dengan tidak meninggalkan kearifan lokal.

3. Hibah dialokasikan pada DPA BPBD untuk Belanja Non-BLM dan pada DPA SKPKD untuk Belanja BLM, yang dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melibatkan OPD teknis terkait yang ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan tentang Penetapan Kelompok Kerja.
4. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersifat konstruksi maupun non konstruksi dilaksanakan dengan swakelola oleh BPBD dibantu oleh Tim/Pengelola Teknis dari Satuan/Organisasi Kerja Pemerintah Daerah terkait, atau secara kontraktual sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah.
5. BNPB dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karo selaku penerima hibah dari Pemerintah Pusat dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan kewenangannya.
6. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan kegiatan yang efisien, efektif, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten/BPBD Kabupaten Karo selaku penerima hibah dari pemerintah Pusat melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Instansi Pengawasan, institusi Kepolisian atau lembaga lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi terhadap pengawasan anggaran dan kegiatan untuk melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

4.3. Ruang Lingkup Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan berdasarkan penilaian kerusakan dan kerugian yang dilengkapi dengan penilaian kebutuhan pemulihan kemanusiaan masyarakat korban bencana untuk

memperoleh perkiraan kebutuhan pemulihan pasca bencana. Keterkaitan antara penilaian kerusakan dan kerugian dengan penilaian kebutuhan pemulihan kemanusiaan memberikan umpan balik bagi kebutuhan pemulihan dengan menempatkan masyarakat korban bencana dan lingkungannya sebagai sasaran pemulihan pascabencana.

Ruang lingkup Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada masing-masing Tahap kegiatan sebagai berikut :

4.3.1. Pemenuhan Kebutuhan Relokasi Tahap.II (Relokasi Mandiri) :

1. Sektor Pemukiman.

Pemenuhan Kebutuhan untuk Pemulihan Sektor Pemukiman meliputi Subsektor Perumahan dan Prasarana Lingkungan sejumlah 220 KK terhadap 4 Desa (Gurukinayan, Kutatonggal, Brastepu dan Gamber) berhak mendapatkan Stimulan dalam rangka relokasi beserta pendampingan pelaksanaan kegiatan.

2. Sektor Infrastruktur

Pemenuhan kebutuhan untuk pemulihan sektor infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian wilayah meliputi subsektor transportasi darat dan subsektor energi (listrik).

3. Sektor Ekonomi Produktif

Pemenuhan kebutuhan untuk pemulihan sektor ekonomi produktif meliputi subsektor pertanian, peternakan, koperasi dan UKM.

4. Sektor Sosial

Pemenuhan kebutuhan pemulihan sektor sosial meliputi pemulihan kehidupan sosial masyarakat pada subsektor kesehatan, pendidikan, agama, dan lembaga sosial.

5. Lintas Sektor

Pemenuhan kebutuhan pemulihan lintas sektor meliputi subsektor pemerintahan, lingkungan hidup, dan pengurangan risiko bencana.

4.3.2. Pelaksanaan Kegiatan Relokasi TahapIII (Siosar) :

1. Sektor Pemukiman.

Pemulihan sektor permukiman meliputi subsektor perumahan dan prasarana lingkungan sejumlah 1.127 KK terhadap 3 Desa (Sukanalu, Sigarang-garang, Mardinding) dan 1 Dusun (Laukawar) berhak mendapatkan stimulan dalam rangka relokasi beserta pendampingan pelaksanaan kegiatan.

2. Sektor Infrastruktur

Pemulihan sektor infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian wilayah meliputi subsektor transportasi darat dan subsektor energi (listrik), air dan sanitasi, dan ruang terbuka hijau

3. Sektor Ekonomi Produktif

Pemulihan sektor ekonomi produktif meliputi subsektor pertanian, peternakan, koperasi dan ukm, pariwisata, pendampingan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

4. Sektor Sosial

Pemenuhan kebutuhan pemulihan sektor sosial meliputi pemulihan kehidupan sosial masyarakat pada subsektor kesehatan, pendidikan, agama, dan lembaga sosial dan pendampingan sosial masyarakat.

5. Lintas Sektor

Pemenuhan kebutuhan pemulihan lintas sektor meliputi subsektor pemerintahan, lingkungan hidup , pengurangan risiko bencana serta perencanaan dan tataruang.

4.4. Skema Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Mekanisme dan prosedur pendanaan pemerintah dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunungapi Sinabung mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang-undang tersebut.

Sekema pelaksanaan anggaran antara lain sebagai berikut :

1. Untuk pendanaan yang bersumber dari kementerian/lembaga akan langsung menyampaikan bantuan pendanaannya kepada pemerintah kabupaten terkait, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berkenaan dengan bentuk kegiatan masing-masing dan alokasi pendanaan. Dalam kerangka situasi penanggulangan bencana, diperlukan langkah-langkah percepatan penyaluran dana sebagai berikut:
 - a. Percepatan penyelesaian administrasi dokumen anggaran, baik dalam kerangka penyusunan anggaran maupun revisi anggaran;
 - b. Percepatan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); dan
 - c. Percepatan proses pengesahan anggaran di lembaga legislatif.
2. Pembiayaan yang menggunakan APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBD Kabupaten Karo akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan anggaran terkait.
3. Pembiayaan Hibah kepada Pemerintah Daerah akan mengikuti pelaksanaan anggaran keuangan daerah. Pembiayaan Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Karo dilakukan sebagai berikut:

1. Penganggaran Hibah dalam APBD

Penganggaran hibah dalam APBD dilaksanakan setelah :

1. Pemerintah Daerah menerima Surat Penetapan Pemberian Hibah.
2. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Karo.
3. Asistensi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) melalui Berita Acara Rapat Penelaahan Hibah bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.
4. Penyaluran dana hibah dari RKUN ke RKUD Mekanisme Penganggaran Hibah dalam APBD Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kabupaten Karo menganggarkan penerimaan hibah pada lain-lain pendapatan dalam APBD.
 - b. Pemerintah Kabupaten Karo menganggarkan penggunaan hibah sebagai belanja dalam APBD berdasarkan SPPH dan RKA, serta untuk Belanja non-BLM menuangkannya dalam DPA APBD Kabupaten Karo sedangkan untuk Belanja BLM menuangkannya dalam DPA SKPKD Kabupaten Karo.

- c. Pemerintah Kabupaten Karo dapat melakukan perubahan RKA yang disebabkan antara lain :
- 1) Perubahan lingkup kegiatan.
 - 2) Luncuran dari sisa dana kegiatan tahun sebelumnya.
- Perubahan RKA dilaporkan pada BNPB dan ditampung dalam APBD dan dituangkan dalam DPA.
- d. Dalam hal SPPH diterima setelah APBD ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan setelah Bupati Karo melakukan perubahan atas peraturan Bupati Karo mengenai penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karo. Perubahan atas peraturan Bupati Karo dituangkan dalam DPA untuk kemudian dianggarkan dalam APBD-Perubahan.
- e. Dalam DPA BPBD maupun DPA SKPKD tahun anggaran berikutnya, anggaran dan kegiatan lanjutan yang berasal dari DPA tahun anggaran sebelumnya, dituangkan sebagai DPA lanjutan.

2. Penyaluran dan Penggunaan Hibah

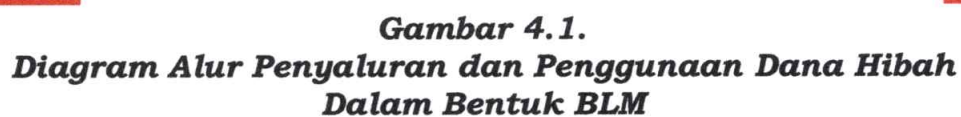
Penyaluran dan penggunaan hibah dimulai setelah penerimaan hibah pada RKUD Kabupaten Karo. Penggunaan Dana Hibah mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah atau APBD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggunaan hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Non Bantuan Langsung Masyarakat (Non BLM).

1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan dalam bentuk BLM dituangkan pada DPA OPD SKPKD Kab. Karo dan dilaksanakan melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat dalam Kelompok Petani/Pemukim (KPP) dengan pendampingan dari Pemerintah Daerah untuk kegiatan :

- a. Bantuan Dana Rumah (BDR) Tahap II Lanjutan untuk Desa Gurukinayan, Berastepu, Kuta Tonggal dan Gamber sebesar Rp. 59.400.000/KK.
- b. Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) Tahap II Lanjutan untuk Desa Gurukinayan, Berastepu, Kuta Tonggal dan Gamber sebesar Rp. 50.600.000/KK.

Mekanisme penyaluran dan penggunaan Dana Hibah dalam bentuk BLM seperti pada gambar.4.1.



2. Non Bantuan Langsung Masyarakat (Non BLM)

Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang diberikan dalam bentuk Non-BLM dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Karo dengan mekanisme baik swakelola maupun kontraktual sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan :

a. Infrastruktur Permukiman Relokasi Mandiri

1) Bantuan Dana Lingkungan

Konsep relokasi Tahap II (mandiri) masyarakat mencari dan menentukan lahan sendiri, namun kenyataannya masyarakat memilih lahan secara berkelompok sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana lingkungan.

2) Pematangan Lahan APL Agropolitan Siosar kurang lebih 100 ha untuk rencana pertapakan rumah dan permukiman relokasi Tahap III.

b. Ekonomi

1) Pengadaan bibit, pupuk dan obat

2) Demplot pertanian

3) Koperasi/industri rumah tangga

c. Biaya Umum/Pendampingan

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non konstruksi baik dalam mekanisme BLM maupun Non BLM, dibutuhkan biaya perencanaan dan pengawasan/supervisi konstruksi serta dukungan pelaksanaan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dukungan pelaksanaan tersebut berupa biaya untuk :

1) ATK

2) Pelaporan

3) Honorarium

4) Sosialisasi

5) Pembekalan

6) Rapat koordinasi

7) Perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) serta koordinasi.

4.5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019 dengan jadwal sebagaimana terdapat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi dan Banjir Lahar Dingin Gunungapi Sinabung

NO	KEGIATAN	2017				2018				PASCA RR
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Perencanaan									
2	Persiapan pelaksanaan									
3	Pelaksanaan Rehabilitasi									
a	Sektor Permukiman									
	- Lanjutan Relokasi Tahap I									
	- Lanjutan Relokasi Tahap II									
	- Relokasi Tahap III									
b	Sektor Infrastruktur									
c	Sektor Ekonomi Produksi									
d	Sektor Sosial									
e	Lintas Sektor									

Jadwal pelaksanaan sebagaimana terdapat pada tabel 4.1 akan dapat tercapai dengan asumsi anggaran tersedia secara tepat waktu dan cukup, serta komponen pendukung kegiatan seperti penyediaan lahan dan lain-lain dapat selesai tepat waktu.

BAB V

PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNGAPI SINABUNG

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunungapi Sinabung merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perencanaan kegiatan (termasuk identifikasi dan penghimpunan sumber pembiayaan), pelaksanaan kegiatan, pengorganisasian pelaksana kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi kegiatan (termasuk pengawasan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah dan/atau pemerintah daerah), hingga pengalihan hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai program pembangunan yang berkelanjutan.

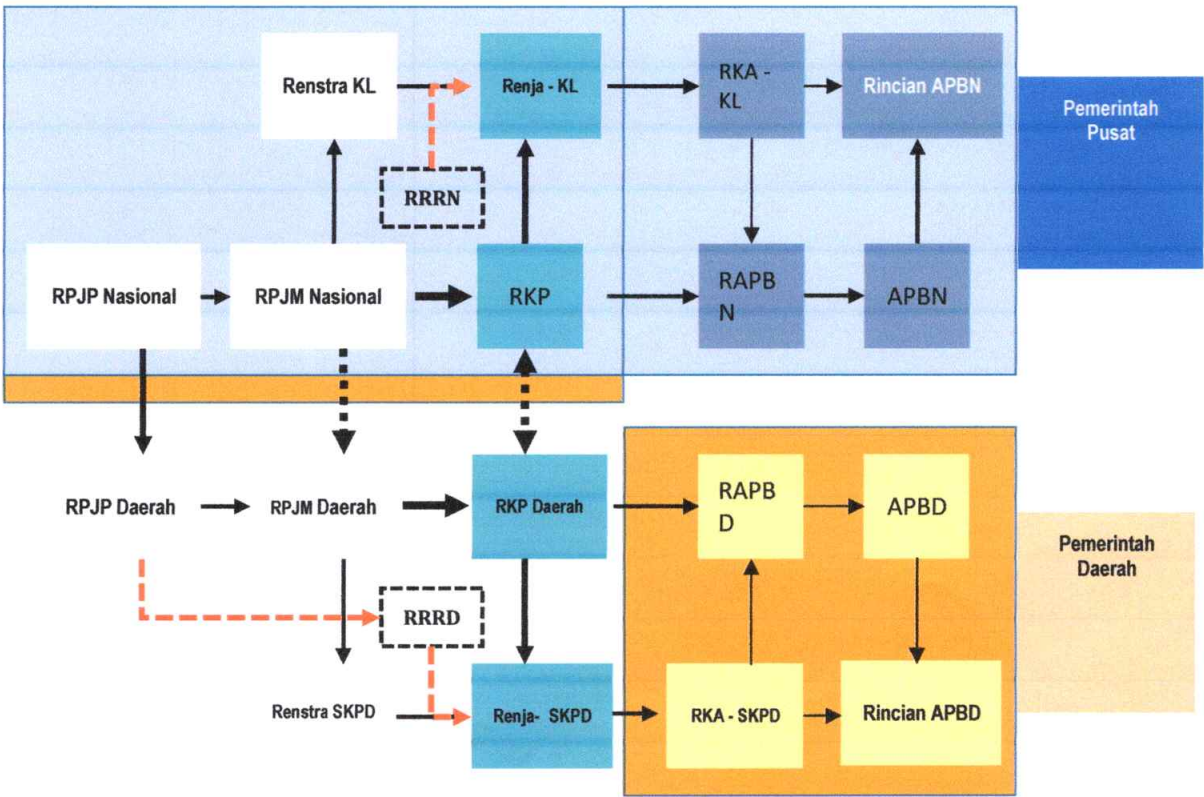
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, merupakan kegiatan yang harus segera dilaksanakan sesaat setelah penanganan darurat selesai dilaksanakan. Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat

Erupsi Gunungapi Sinabung masih terus berlangsung dan diperkirakan masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan. Mengingat keadaan darurat yang cukup lama dan kondisi masyarakat terpapar bencana yang sangat memprihatinkan, maka Pemerintah cq. BNPB menetapkan untuk melaksanakan penanganan darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam waktu yang bersamaan. Untuk itu, telah dilakukan identifikasi terhadap sektor dan sub sektor mana yang akan ditanggulangi dengan penanganan darurat dan mana yang ditanggulangi dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Terkait dengan keunikan penanggulangan bencana erupsi Gunungapi Sinabung ini, maka perlu ditetapkan suatu aturan khusus berupa Keputusan Presiden, yang diharapkan menjadi landasan hukum yang cukup dan dapat mengikat bagi seluruh unsur terkait yang akan dikoordinasikan oleh BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Utara maupun BPBD Kabupaten Karo.

5.1. Perencanaan dan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunungapi Sinabung

Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi gunungapi sinabung adalah kebijakan yang harus diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, termasuk dalam kaitannya dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan. Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun pertama pasca bencana, dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang sudah ditetapkan sebelumnya, demikian juga terhadap RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi dan kabupaten/kota dan RAPBD tahun berjalan. Untuk tahun kedua dan seterusnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus sudah dimasukkan dalam RKP, APBN, RKPD dan RAPBD, sesuai dengan mekanisme dalam peraturan dan perundang-undangan terkait.



Gambar 5.1.
Kedudukan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Erupsi Gunungapi Sinabung Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Keterangan :

Renstra KL	: Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Renja KL	: Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
RKA-KL	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RKA-SKPD	: Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
RAPBN	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RAPBD	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Pendek
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RRRN	: Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nasional
RRRD	: Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah

Sumber pendanaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari APBD dan APBN, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk didanai dari sumber lainnya, seperti dana masyarakat, dunia usaha, dan bantuan/hibah dari lembaga atau negara donor. Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah daerah yang terkena bencana dalam hal APBD tidak memadai dalam membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Bantuan diberikan melalui mekanisme Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Penyusunan kebutuhan pendanaan tersebut dilakukan secara *Bottom-Up* dan partisipatif, yang disinkronkan dengan usulan-usulan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta dikonsolidasikan oleh BNPB dan BPBD. Proses ini dilakukan dengan tujuan mengurangi potensi duplikasi kegiatan dan pembiayaan serta menganalisis prioritas pemulihan masing-masing sektor berdasarkan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Besarnya kebutuhan pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dihitung berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Pasca bencana (Jitu Pasna). Pengkajian kebutuhan pasca bencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan berdasarkan hasil pengkajian terhadap akibat bencana dan dampak bencana. Komponen akibat bencana yang dikaji terdiri dari penilaian kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan risiko bencana. Pengkajian akibat bencana, dampak bencana sampai kepada kebutuhan pasca bencana meliputi sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor.

Penanggulangan Pasca bencana Erupsi Gunungapi Sinabung untuk kegiatan tahun 2018 - 2019, direncanakan yaitu :

1. Pemenuhan Kebutuhan Relokasi Tahap II Mandiri (220 KK)

Kebutuhan relokasi lanjutan tahap II untuk 220 KK warga empat desa yang berasal dari Desa Gurukinayan 33 KK, Kutatonggal 5 KK, Berastepu 163 KK dan Gamber 19 KK.

Tabel 5.1.
Rekapitulasi Kebutuhan Tahap II Relokasi Mandiri (220 KK)

No.	Sektor	Kebutuhan (Rp)
1	Permukiman	69.834.720.583
2	Infrastruktur	87.660.000.000
3	Sosial	18.747.300.000
4	Ekonomi Produktif	21.670.014.450
5	Lintas Sektor	5.345.000.000
Total		203.257.035.033

2. Relokasi Tahap III (1.038 KK)

Pemenuhan kebutuhan relokasi warga tiga desa satu dusun berasal dari Desa Sukanalu 332 KK, Sigarang-garang 423 KK, Mardinding 263 KK, dan Dusun Lau Kawar 20 KK.

Tabel 5.2.
Rekapitulasi Kebutuhan Tahap III Relokasi di Siosar (1.038 KK)

No.	Sektor	Kebutuhan (Rp)
1	Permukiman	184. 019.151.174
2	Infrastruktur	305.950.000.000
3	Sosial	72.119.090.000
4	Ekonomi Produktif	143.481.867.605
5	Lintas sektor	46.873.900.000
Total		752.444.008.799

Sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi gunungapi sinabung berasal dari APBN berupa dana hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (dari Kementerian Keuangan), DIPA K/L, dan APBD sesuai kewenangan masing-masing. Penetapan prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan dalam dua tahun anggaran, yakni dari 2018 sampai dengan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemulihan sektor permukiman dilaksanakan selama dua tahun anggaran, yakni tahun anggaran 2018 - 2019;
2. Pemulihan sektor infrastruktur dilaksanakan secara bertahap dengan mengutamakan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana infrastruktur untuk pelayanan transportasi, air minum, sumberdaya air dan irigasi, serta kegiatan pengurangan risiko bencana;
3. Pemulihan sektor ekonomi produktif dilaksanakan secara bertahap bersamaan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi produktif, dilakukan kegiatan penguatan kapasitas dalam rangka pengurangan risiko bencana;
4. Pemulihan sektor sosial diprioritaskan pada tahun anggaran 2018 - 2019; bersamaan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor sosial, dilakukan kegiatan penguatan kapasitas dalam rangka pengurangan risiko bencana; dan
5. Pemulihan lintas sektor diprioritaskan pada tahun anggaran 2018 - 2019 dalam rangka mengembalikan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana.

Identifikasi potensi sumber pendanaan ditempuh dengan cara pendayagunaan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Rupiah murni APBN, APBD provinsi/kabupaten pada 2018 dan 2019 didayagunakan secara optimal untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah terkena dampak bencana melalui relokasi (jika dimungkinkan) kegiatan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku;
2. Anggaran perubahan APBN, APBD provinsi/kabupaten pada 2018 didayagunakan secara optimal untuk upaya lanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah yang terkena dampak bencana sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku ; dan
3. Anggaran pemerintah Pusat APBN, APBD provinsi/kabupaten pada 2018 dan 2019 didayagunakan secara optimal untuk upaya lanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah yang terkena dampak bencana sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku.

Berdasarkan upaya tersebut, maka indikasi pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilihat pada Tabel 5.3. dan Tabel 5.4 Rekap Penilaian Kebutuhan dan Sumber Dana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana Erupsi Gunungapi Sinabung.

Tabel 5.3.
Rekapitulasi Penilaian Kebutuhan Relokasi Tahap II (Relokasi Mandiri)
dan Sumber Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Erupsi Gunungapi Sinabung

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Penilaian Kebutuhan				Keterangan
			Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7=4*6	8
1	Sektor Permukiman					69.834.720.363	
	a Sub Sektor Perumahan		1	Paket	24.860.000.000	24.860.000.000	Hibah RR 2017 (220 KK)
	b Sub Sektor Prasarana Lingkungan		1	Paket	42.474.720.363	42.474.720.363	
	c Pendampingan		1	Paket	2.500.000.000	2.500.000.000	Hibah RR 2017 (220 KK)
2	Sektor Infrastruktur					87.660.000.000	
	a Sub Sektor Transportasi		1	Paket	83.600.000.000	83.600.000.000	Kementerian PUPR, CSR
	b Sub Sektor Energi		1	Paket	4.060.000.000	4.060.000.000	APED, CSR
3	Sektor Sosial					18.747.300.000	
	a Sub Sektor Kesehatan		1	Paket	1.017.900.000	1.017.900.000	APEN K/L
	b Sub Sektor Pendidikan		1	Paket	8.800.000.000	8.800.000.000	Kemendikbud, CSR
	c Sub Sektor Keagamaan		1	Paket	2.200.000.000	2.200.000.000	Kementerian Agama: swadaya
	d Sub Sektor Lembaga Sosial		1	Paket	6.729.400.000	6.729.400.000	Kemendikbud: Kemensos
4	Sektor Ekonomi					21.670.014.450	
	a Sub Sektor Pertanian		1	Paket	15.832.214.450	15.832.214.450	K/L Hibah RR
	b Sub Sektor Perikanan		1	Paket	3.487.800.000	3.487.800.000	K/L Hibah RR
	c Sub Sektor Koperasi dan UKM		1	Paket	2.350.000.000	2.350.000.000	K/L Hibah RR
5	Lintas Sektor					5.345.000.000	
	a Sub Sektor Pemerintahan		1	Paket	1.020.000.000	1.020.000.000	K/L
	b Sub Sektor Lingkungan Hidup & Kehutanan		1	Paket	3.750.000.000	3.750.000.000	K/L
	c Sub Sektor Pengurangan Risiko Bencana		1	Paket	575.000.000	575.000.000	APED, K/L
Total = 1-2-3-4-5						203.257.035.033	

Tabel 5.4.
Rekapitulasi Penilaian Kebutuhan Relokasi Tahap III dan Sumber Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunungapi Sinabung

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakirisan Kebutuhan				Keterangan
			Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7=4*6	8
1	Sektor Permukiman					184,013,151,174	
	a Sub Sektor Perumahan		1	Paket	131,396,320,000	131,396,320,000	
	b Sub Sektor Prasarana Lingkungan		1	Paket	47,583,031,174	47,583,031,174	
	c Pendampingan		1	Paket	5,033,800,000	5,033,800,000	
2	Sektor Infrastruktur					305,950,000,000	
	a Sub Sektor Transportasi		1	Paket	163,470,000,000	163,470,000,000	Hibah RP, APBN K/L
	b Sub Sektor Energi		1	Paket	3,230,000,000	3,230,000,000	PLN
	c Sub Sektor Air & Sanitasi		1	Paket	22,500,000,000	22,500,000,000	APBN PU PERA
	d Sub Sektor Ruang Terbuka Hijau		1	Paket	116,750,000,000	116,750,000,000	APBD
3	Sektor Sosial					72,119,090,000	
	a Sub Sektor Kesehatan		1	Paket	8,526,850,000	8,526,850,000	Hibah RP, Kemenkes
	b Sub Sektor Pendidikan		1	Paket	35,508,340,000	35,508,340,000	Kemendikbud
	c Sub Sektor Keagamaan		1	Paket	11,000,000,000	11,000,000,000	Kemen Agama & CSR
	d Sub Sektor Lembaga Sosial		1	Paket	14,283,900,000	14,283,900,000	Kemensos, kemendikbud
	e Pendampingan/Pemberdayaan Sosial Masyarakat		1	Paket	2,800,000,000	2,800,000,000	APBN BNPB
4	Sektor Ekonomi					143,481,867,605	
	a Sub Sektor Pertanian		1	Paket	111,516,867,605	111,516,867,605	Hibah RP, Kementan, Kemen PU PR
	b Sub Sektor Peternakan		1	Paket	3,365,000,000	3,365,000,000	Kementan, APBD
	c Sub Sektor Koperasi dan UKM		1	Paket	8,100,000,000	8,100,000,000	Kemen kop UKM
	d Sub Sektor Pariwisata		1	Paket	9,750,000,000	9,750,000,000	APBD
	e Pendampingan/Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		1	Paket	10,750,000,000	10,750,000,000	APBN BNPB, APBN K/L
5	Lintas Sektor					46,873,900,000	
	a Sub Sektor Pemerintahan		1	Paket	31,898,900,000	31,898,900,000	APBD, CSR, K/L
	b Sub Sektor Lingkungan Hidup & Kelutanan		1	Paket	4,750,000,000	4,750,000,000	Kemen LHK
	c Sub Sektor Pengurangan Resiko Bencana		1	Paket	5,225,000,000	5,225,000,000	APBN BNPB
	d Sub Sektor Perencanaan & Tata Ruang		1	Paket	5,000,000,000	5,000,000,000	K/L
Total						752,444,008,779	

5.2. Kelembagaan dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Erupsi Gunungapi Sinabung

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi gunungapi sinabung dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Karo yang melibatkan OPD teknis terkait dan tim pendamping masyarakat.

Bupati dalam hal ini Bupati Kabupaten Karo adalah penanggung jawab utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayahnya yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh BPBD dan dibantu oleh OPD teknis terkait. Sedangkan BPBD Provinsi dan BNPB berfungsi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berjenjang terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Karo.

Terkait dengan kekhususan sifat dan karakteristik hibah dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, maka organisasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana yang telah diuraikan diatas ditambah dengan hal-hal yang secara khusus diatur dalam Juknis ini.

Struktur pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi gunungapi sinabung pada Pemerintah Kabupaten Karo ditetapkan pada instansi BPBD, yang umumnya ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Pelaksana BPBD dan/atau Kepala SKPKD.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa.
3. Bendahara Pengeluaran (BP) adalah personil dari BPBD, apabila diperlukan dapat ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dari Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang mempunyai kemampuan dalam penatausahaan keuangan.
4. Tim/Pengelola Teknis terdiri dari personil BPBD, OPD terkait dan Instansi Pemerintah terkait yang ditetapkan dengan Surat Keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan pejabat perbendaharaan dan pejabat yang bertanggung jawab atas pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.3. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Erupsi Gunungapi Sinabung

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan dan pertanggung jawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam pengelolaan APBN maupun APBD termasuk Hibah kepada Pemerintah Daerah.

Untuk pembiayaan dengan sumber APBD, perlu dicermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk pembiayaan yang bersumber dari Hibah Pemerintah (Rupiah Murni) kepada Pemerintah Kabupaten Karo yang dikelola melalui mekanisme APBD, agar juga memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Erupsi Gunungapi Sinabung serta Naskah Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan dengan Pemerintah Kabupaten Karo.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana mengatur bahwa pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam peraturan pemerintah ini juga diatur bahwa sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam rangka melakukan pengendalian terhadap partisipasi masyarakat dunia usaha dan masyarakat internasional, penatausahaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana, dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan kegiatan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten Karo, memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran selain kepada PA masing-masing sesuai dengan sumber anggarannya, juga menyampaikan laporan kepada Tim Pendukung Teknis.

Atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Hibah, maka Pemerintah Kabupaten Karo wajib menyampaikan laporan secara triwulanan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan BNPB dalam hal ini Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Laporan Triwulan menyajikan informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan, penyerapan anggaran, permasalahan dan kendala yang dihadapi dan alternatif solusi yang sudah dilaksanakan maupun yang masih perlu dilaksanakan.

5.3.1. *Laporan Triwulan*

Laporan triwulan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran hibah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. KPP menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pemerintah daerah dalam hal ini BPBD Kabupaten Karo.
2. Bupati Karo atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Pelaksana BPBD, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara triwulan kepada Kepala BNPB c.q Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
3. Laporan triwulan dari Pemerintah/BPBD Kabupaten Karo, juga ditembuskan kepada Gubernur dan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi selaku pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten/Kota.
4. Laporan triwulan yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran hibah, dibuat seinformatif mungkin

5.3.2. *Laporan Akhir*

Bupati Karo melalui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BNPB c.q Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan tembusan kepada

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan.

Laporan akhir dari Pemerintah/BPBD Kabupaten Karo, juga ditembuskan kepada Gubernur dan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Utara selaku pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi atas kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten/Kota.

Laporan akhir pelaksanaan kegiatan memuat :

1. Pendahuluan memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar, ruang lingkup kegiatan dan lain-lain informasi yang dianggap perlu.
2. Pelaksanaan kegiatan, memuat uraian yang membandingkan rencana dan realisasi dan capaian kinerja. Rekapitulasi disajikan dengan memuat informasi yang jelas
3. Kesimpulan dan Saran.

Laporan akhir dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa :

1. Surat Penyampaian Laporan Akhir dari Gubernur/Bupati/ Walikota
2. Fotokopi PHD (Perjanjian Hibah Daerah).
3. Fotokopi Resume Kontrak.
4. Fotokopi Setoran Sisa Dana ke Kas Negara (SSBP).
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dari Penyedia Jasa kepada PPK setelah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Barang/Jasa atau PHO (Provisional Hand Over).
6. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Terakhir.
7. Dokumentasi Pelaksanaan 0 %, 50 % dan 100 %.
- 8.

5.4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara umum telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang mencakup tahapan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu, evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, digunakan lima indikator, yaitu :

1. Konsistensi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemulihan, kegiatan prioritas, dan pendanaan dengan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. Koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang menghasilkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
3. Partisipasi melalui mekanisme konsultasi yang menjangkau aspirasi masyarakat penerima manfaat;
4. Kapasitas lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi melalui laporan keuangan dan laporan kinerja, serta kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
5. Potensi keberlanjutan dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Penerimaan dan penelaahan laporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh BNPB dan BPBD dengan melibatkan kementerian/lembaga dan SKPD terkait dengan mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana.

5.5. Pemantauan dan Evaluasi di Tingkat Pusat

Pemantauan dan evaluasi di tingkat pusat dilaksanakan oleh penanggung jawab program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di BNPB dan Ditjen. Perimbangan Keuangan, maupun dengan menetapkan Tim Pemantauan dan Evaluasi.

1. Tim Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Pusat

Organisasi tim pemantauan dan evaluasi tingkat pusat terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab : - Kepala BNPB
- Kementerian Keuangan
- b. Ketua Tim : BNPB dan Kemen Keuangan
- c. Sekretaris : BNPB dan Kemen Keuangan
- d. Koordinator sektor : Eselon III (K/L)

- e. Koordinator Unit : Disesuaikan pelaksana sektor
- f. Anggota Pelaksana : Pada masing-masing sektor

2. Pemantauan yang dilakukan melalui:

- a. Penerimaan laporan triwulan;

Laporan triwulan memuat informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan realisasi keuangan, termasuk permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana bantuan. Laporan ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada Bupati, BNPB dan Kemen Keuangan.

- b. Pemantauan ke Kabupaten Karo;

Pemantauan ke Kabupaten Karo dilakukan apabila dari hasil pemantauan terhadap laporan bulanan dan laporan lainnya terdapat permasalahan yang harus dicarikan solusinya secara langsung kepada pihak-pihak terkait di tingkat kabupaten. Pemantauan ini dapat dilakukan secara periodik.

Organisasi Pemantauan dan evaluasi ini akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

5.6. Tindak Lanjut Dinamisasi Kebutuhan Pasca Pemantauan dan Evaluasi

Jangka waktu rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi gunungapi sinabung adalah dua tahun anggaran, yakni dari tahun anggaran 2017 sampai dengan 2018, dimana pemotretan kebutuhan dan analisisnya dilakukan dengan sumber data review rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi gunungapi sinabung .

Setelah rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi gunungapi sinabung ini memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diharapkan pos yang belum jelas pendanaannya dan pos yang sangat rinci dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi gunungapi sinabung dapat mendorong pihak-pihak lain, termasuk dunia usaha, untuk turut berpartisipasi.

Proses pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala diyakini dapat memunculkan dinamisasi data kebutuhan yang bergerak sesuai kondisi mutakhir di lapangan. Hal ini terkait erat dengan jarak waktu yang cukup panjang antara perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga data kebutuhan akan bergerak dinamis sesuai dengan respons masyarakat dan para pihak. Untuk itu, diperlukan mekanisme tertentu yang dibenarkan

menurut peraturan perundang-undangan guna menjawab dinamisasi kebutuhan yang dimaksud.

Mekanisme pergeseran anggaran sebagai akibat hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan tata aturan yang berlaku, sehingga akan memiliki sisi positif sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum terhadap tindakan lain yang merupakan respons terhadap dinamisasi kebutuhan di lapangan;
2. Menjaga agar setiap dana yang dianggarkan dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi ini dibelanjakan dengan setepat-tepatnya; dan
3. Menjawab kebutuhan riil di lokasi terdampak sesuai dengan kondisi paling mutakhir.

5.7. Kestinambungan Pemulihan Pasca bencana Berbasis Pengurangan Risiko Bencana

Setelah pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi ini, juga perlu disusun strategi kebijakan yang dikaitkan dengan siklus perencanaan dan penganggaran reguler guna memastikan kestinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pembangunan "*Normal*" sesuai kewenangan instansi terkait. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah juga perlu mengupayakan untuk melaksanakan:

1. Perencanaan penanggulangan bencana melalui pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, melakukan kajian analisis risiko bencana, melakukan analisis kerentanan dan kapasitas daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana, dan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB).
2. Pengurangan faktor-faktor penyebab risiko bencana melalui pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang dengan mengkaji ulang tata ruang dan wilayah berbasis mitigasi bencana, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam RPJMD, RKPD, RKASKPD, dan RTRW.
3. Dengan adanya kejadian bencana erupsi Gunungapi Sinabung, diharapkan pemerintah daerah melakukan kajian ulang terhadap RTRW provinsi dan kabupaten terdampak;

4. Penelitian, pendidikan, dan pelatihan penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan melalui penyelenggaraan pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam sistem pendidikan formal dan informal dan penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana;
5. Berdasarkan potensi bencana, pencegahan, dan pengurangan risiko bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang dan wilayah melalui mekanisme perizinan dan persyaratan teknis pembangunan sesuai kewenangan lembaga yang terkait;
6. Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai dari APBD.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Aspek Legal Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunungapi Sinabung telah disepakati bersama oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui serangkaian proses koordinasi dan konsultasi. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus berpedoman pada Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi dan banjir lahar hujan Gunungapi Sinabung yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNPB.

Dengan pertimbangan bahwa sebagian pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bersumber dari APBN, maka pelaksanaan kegiatannya berpedoman pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3

Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Sebagai tindak lanjut operasional pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, maka perlu ditetapkan:

1. Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Penanganan Pasca bencana Erupsi Gunungapi Sinabung;
2. Surat Keputusan Bupati Karo tentang Penetapan Lahan Relokasi Pemukiman Akibat Bencana Erupsi Gunungapi Sinabung;
3. Surat Keputusan Bupati Karo tentang Relokasi Pengungsi Korban Bencana Gunungapi Sinabung Kabupaten Karo;
4. Surat Keputusan dan pedoman lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunungapi Sinabung.

6.2. Jangka Waktu Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Jangka waktu Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunungapi Sinabung adalah dua tahun anggaran, yaitu dimulai pada tahun anggaran 2018 dan diselesaikan pada tahun anggaran 2019.

6.3. Aspek Akuntabilitas Pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam kerangka pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga pengawasan yang lain. Akuntabilitas pendanaan dari sumber bantuan luar negeri diselenggarakan sesuai peraturan yang berlaku.

Informasi tentang perencanaan penganggaran dan laporan penggunaan anggaran harus dapat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan dan penggunaan anggaran harus dipublikasikan di media-media publik. Pemerintah perlu mengatur agar pengelolaan bantuan masyarakat memiliki laporan keuangan yang memenuhi standar.

Untuk memfasilitasi penyaluran bantuan masyarakat pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah daerah melalui BPBD provinsi dan BPBD kabupaten mengacu pada Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi dan lahar hujan Gunungapi Sinabung.

6.4. Aspek Pengakhiran Masa Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Setelah berakhirnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana erupsi Gunungapi Sinabung, Pemerintah Kabupaten Karo melalui BPBD Provinsi Sumatera Utara harus segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara lengkap kepada BNPB selambat-lambatnya enam bulan setelah pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berakhir. Selanjutnya, kegiatan koordinasi pembangunan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KARO,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA ERUPSI GUNUNGAPI SINABUNG
DI KABUPATEN KARO TAHUN 2018-2019

RINCIAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ERUPSI GUNUNGAPI SINABUNG DI
KABUPATEN KARO TAHUN 2018-2019

I. PERSENTASE PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCA ERUPSI
GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2018-2019

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Prakiraan Kebutuhan (Rp)	Persentase Kebutuhan
1	2	3	4
1	Sektor Permukiman	253,853,871,757	23.96%
	a Sub Sektor Perumahan	156,256,320,000	
	b Sub Sektor Prasarana Lingkungan	90,057,751,757	
	c Pendampingan/Fasilisator	7,539,800,000	
2	Sektor Infrastruktur	393,610,000,000	37.15%
	a Sub Sektor Transportasi	247,070,000,000	
	b Sub Sektor Energi	7,290,000,000	
	c Sub Sektor Air & Sanitasi	22,500,000,000	
	d Sub Sektor Sumber Daya Air	-	
	e Sub Sektor Ruang Terbuka Hijau	116,750,000,000	
3	Sektor Sosial	90,866,390,000	8.58%
	a Sub Sektor Kesehatan	9,544,750,000	
	b Sub Sektor Pendidikan	44,308,340,000	
	c Sub Sektor Keagamaan	13,200,000,000	
	d Sub Sektor Lembaga Sosial	21,013,300,000	
	e Pendampingan/Pemberdayaan Sosial Masyarakat	2,800,000,000	
4	Sektor Ekonomi	268,942,457,055	25.38%
	a Sub Sektor Pertanian	230,959,657,055	
	b Sub Sektor Peternakan	7,032,800,000	
	c Sub Sektor Koperasi dan UKM	10,450,000,000	
	d Sub Sektor Pariwisata	9,750,000,000	
	e Pendampingan/Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	10,750,000,000	
5	Lintas Sektor	52,218,900,000	4.93%
	a Sub Sektor Pemerintahan	32,918,900,000	
	b Sub Sektor Lingkungan Hidup & Kehutanan	8,500,000,000	
	c Sub Sektor Pengurangan Resiko Bencana	5,800,000,000	
	d Sub Sektor Perencanaan & Tata Ruang	5,000,000,000	
Total = 1+2+3+4+5		1,059,491,618,812	100%

II REKAPITULASI PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2018-2019

No	Sektor / Subsektor / Kegiatan	TAHAP II		TAHAP III		Non Relokasi		TOTAL	KETERANGAN
		Relokasi Mandiri	Kebutuhan (Rp)	Siosar	Kebutuhan (Rp)	Gunung Sinabung	Total Kebutuhan (Rp)		
1	2	3	4	6	5=3+4	6	5=3+4	6	
1	Sektor Permukiman	69,834,720,583	184,019,151,174	-	253,853,871,757				
	a Sub Sektor Perumahan	24,860,000,000	131,396,320,000	-	156,256,320,000				
	b Sub Sektor Prasarana Lingkungan	42,474,720,583	47,583,031,174	-	90,057,751,757				
	c Pendampingan / Fasilitasor	2,500,000,000	5,039,800,000	-	7,539,800,000				
2	Sektor Infrastruktur	87,660,000,000	305,950,000,000	-	393,610,000,000				
	a Sub Sektor Transportasi	83,600,000,000	163,470,000,000	-	247,070,000,000				
	b Sub Sektor Energi	4,060,000,000	3,230,000,000	-	7,290,000,000				
	c Sub Sektor Air & Sanitasi	-	22,500,000,000	-	22,500,000,000				
	d Sub Sektor Sumber Daya Air	-	-	-	-				
	e Sub Sektor Ruang Terbuka Hijau	-	116,750,000,000	-	116,750,000,000				
3	Sektor Sosial	18,747,300,000	72,119,090,000	-	90,866,390,000				
	a Sub Sektor Kesehatan	1,017,900,000	8,526,850,000	-	9,544,750,000				
	b Sub Sektor Pendidikan	8,800,000,000	35,508,340,000	-	44,308,340,000				
	c Sub Sektor Keagamaan	2,200,000,000	11,000,000,000	-	13,200,000,000				
	d Sub Sektor Lembaga Sosial	6,729,400,000	14,283,900,000	-	21,013,300,000				
	e Pendampingan / Pemberdayaan Sosial Masyarakat	-	2,800,000,000	-	2,800,000,000				
4	Sektor Ekonomi	21,670,014,450	143,481,867,605	103,790,575,000	268,942,457,055				
	a Sub Sektor Pertanian	15,832,214,450	111,516,867,605	103,610,575,000	230,959,657,055				
	b Sub Sektor Peternakan	3,487,800,000	3,365,000,000	180,000,000	7,032,800,000				
	c Sub Sektor Koperasi dan UKM	2,350,000,000	8,100,000,000	-	10,450,000,000				
	d Sub Sektor Pariwisata	-	9,750,000,000	-	9,750,000,000				
	e Pendampingan / Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	10,750,000,000	-	10,750,000,000				
5	Lintas Sektor	5,345,000,000	46,873,900,000	-	52,218,900,000				
	a Sub Sektor Pemerintahan	1,020,000,000	31,898,900,000	-	32,918,900,000				
	b Sub Sektor Lingkungan Hidup & Kehutanan	3,750,000,000	4,750,000,000	-	8,500,000,000				
	c Sub Sektor Pengurangan Resiko Bencana	575,000,000	5,225,000,000	-	5,800,000,000				
	d Sub Sektor Perencanaan & Tata Ruang	-	5,000,000,000	-	5,000,000,000				
	Total = 3+4	203,257,035,033	752,444,008,779	103,790,575,000	1,059,491,618,812				

III. REKAPITULASI . . .

III. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHAP II
RELOKASI MANDIRITAHUN 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan				Keterangan
			Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7=4*6	8
1	1 Sektor Permukiman					69,834,720,583	
	a Sub Sektor Perumahan		1	Paket	24,860,000,000	24,860,000,000	Hibah RR 2017 (220 KK)
	b Sub Sektor Prasarana Lingkungan		1	Paket	42,474,720,583	42,474,720,583	
	c Pendampingan		1	Paket	2,500,000,000	2,500,000,000	Hibah RR 2017 (220 KK)
2	2 Sektor Infrastruktur					87,660,000,000	
	a Sub Sektor Transportasi		1	Paket	83,600,000,000	83,600,000,000	Kementerian PUPR, CSR
	b Sub Sektor Energi		1	Paket	4,060,000,000	4,060,000,000	APBD, CSR
3	3 Sektor Sosial					18,747,300,000	
	a Sub Sektor Kesehatan		1	Paket	1,017,900,000	1,017,900,000	APBN K/L
	b Sub Sektor Pendidikan		1	Paket	8,800,000,000	8,800,000,000	Kemendikbud, CSR
	c Sub Sektor Keagamaan		1	Paket	2,200,000,000	2,200,000,000	Kementerian Agama; swadaya
	d Sub Sektor Lembaga Sosial		1	Paket	6,729,400,000	6,729,400,000	Kemendikbud; Kemensos
4	4 Sektor Ekonomi					21,670,014,450	
	a Sub Sektor Pertanian		1	Paket	15,832,214,450	15,832,214,450	K/L, Hibah RR
	b Sub Sektor Peternakan		1	Paket	3,487,800,000	3,487,800,000	K/L, Hibah RR
	c Sub Sektor Koperasi dan UKM		1	Paket	2,350,000,000	2,350,000,000	K/L, Hibah RR
5	5 Lintas Sektor					5,345,000,000	
	a Sub Sektor Pemerintahan		1	Paket	1,020,000,000	1,020,000,000	K/L
	b Sub Sektor Lingkungan Hidup & Kehutanan		1	Paket	3,750,000,000	3,750,000,000	K/L
	c Sub Sektor Pengurangan Resiko Bencana		1	Paket	575,000,000	575,000,000	APBD, K/L
	Total = 1+2+3+4+5					203,257,035,033	

IV. PENILAIAN ...

IV. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHAP III RELOKASI SIOSAR (DESA MARDINGDING, SUKANALU, SIGARANG-GARANG DAN DUSUN LAU KAWAR TAHUN 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan				Keterangan
			Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7=4*6	8
1	Sektor Permukiman					184,019,151,174	
	a Sub Sektor Perumahan		1	Paket	131,396,320,000	131,396,320,000	
	b Sub Sektor Prasarana Lingkungan		1	Paket	47,583,031,174	47,583,031,174	
	c Pendampingan		1	Paket	5,039,800,000	5,039,800,000	
2	Sektor Infrastruktur					305,950,000,000	
	a Sub Sektor Transportasi		1	Paket	163,470,000,000	163,470,000,000	Hibah RR, APBN K/L,
	b Sub Sektor Energi		1	Paket	3,230,000,000	3,230,000,000	PLN
	c Sub Sektor Air & Sanitasi		1	Paket	22,500,000,000	22,500,000,000	APBN PU PERA
	d Sub Sektor Ruang Terbuka Hijau		1	Paket	116,750,000,000	116,750,000,000	APBD
3	Sektor Sosial					72,119,090,000	
	a Sub Sektor Kesehatan		1	Paket	8,526,850,000	8,526,850,000	Hibah RR, Kemenkes
	b Sub Sektor Pendidikan		1	Paket	35,508,340,000	35,508,340,000	Kemendikbud
	c Sub Sektor Keagamaan		1	Paket	11,000,000,000	11,000,000,000	Kemen Agama & CSR
	d Sub Sektor Lembaga Sosial		1	Paket	14,283,900,000	14,283,900,000	Kemensos, kemendikbud
	e Pendampingan/Pemberdayaan Sosial Masyarakat		1	Paket	2,800,000,000	2,800,000,000	APBN BNPB
4	Sektor Ekonomi					143,481,867,605	
	a Sub Sektor Pertanian		1	Paket	111,516,867,605	111,516,867,605	Hibah RR, Kementan, Kementan, APBD
	b Sub Sektor Peternakan		1	Paket	3,365,000,000	3,365,000,000	Kementan, APBD
	c Sub Sektor Koperasi dan UKM		1	Paket	8,100,000,000	8,100,000,000	Kemen kop UKM
	d Sub Sektor Pariwisata		1	Paket	9,750,000,000	9,750,000,000	APBD
	e Pendampingan/Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		1	Paket	10,750,000,000	10,750,000,000	APBN BNPB, APBN K/L
5	Lintas Sektor					46,873,900,000	
	a Sub Sektor Pemerintahan		1	Paket	31,898,900,000	31,898,900,000	APBD, CSR, K/L
	b Sub Sektor Lingkungan Hidup & Kehutanan		1	Paket	4,750,000,000	4,750,000,000	Kemen LHK
	c Sub Sektor Pengurangan Resiko Bencana		1	Paket	5,225,000,000	5,225,000,000	APBN BNPB
	d Sub Sektor Perencanaan & Tata Ruang		1	Paket	5,000,000,000	5,000,000,000	K/L
	Total					752,444,008,779	

V. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TERDAMPAK (NON RELOKASI) TAHUN 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan				Keterangan
			Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7=4*6	8
1	Sektor Ekonomi					103,790,575,000	
	a Sub Sektor Pertanian		1	Paket	103,610,575,000	103,610,575,000	
	b Sub Sektor Peternakan		1	Paket	180,000,000	180,000,000	
	Total					103,790,575,000	

1.1. REKAPITULASI PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SEKTOR PERMUKIMAN PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG
KABUPATEN KARO TAHUN 2018 - 2019

No	Sektor / Subsektor / Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Total Kebutuhan (Rp)	
1	2	3	4	
1	Sektor Permukiman		253,853,871,757	
	Tahap II Relokasi Mandiri Lanjutan		69,834,720,583	
	a Sub Sektor Perumahan	Kabanjaje,	24,860,000,000	
	b Sub Sektor Prasarana Lingkungan	Simpang Empat,	42,474,720,583	
	c Pendampingan Permukiman	Tigapanah	2,500,000,000	
2	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kavar)		184,019,151,174	
	a Sub Sektor Perumahan	Merek,	131,396,320,000	
	b Sub Sektor Prasarana Lingkungan	Tigapanah	47,583,031,174	
	c Pendampingan / Fasilitator	(Siosar)	5,039,800,000	

1.2. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR PERUMAHAN PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG
KABUPATEN KARO TAHUN 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
1	Sektor Permukiman					
	a Sub Sektor Perumahan					
	Tahap II Relokasi Mandiri (Tambahan)					156,256,320,000
	a Bantuan Dana Tapak Rumah & Rumah (BDR)	Kabanjahe,	220	KK	59,400,000	13,068,000,000
	b Bantuan Lahan Usaha Tani (BDLUT)	Simpang Empat,	220	KK	50,600,000	11,132,000,000
	c Bantuan Isi Rumah	Tigapanah	220	KK	3,000,000	660,000,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)					131,396,320,000
	a Pembuatan Site Plan		1	Paket	500,000,000	500,000,000
	b Land & Clearing		70	Ha	328,571,429	23,000,000,000
	c Pembangunan Rumah (BDR)		892	KK	113,000,000	100,796,000,000
	d Bantuan Isi Rumah	Merek, Tigapanah (Siosar)	892	KK	3,000,000	2,676,000,000
	e Penyambungan Daya Listrik 900 VA & Instalasi Dalam Rumah		892	KK	3,000,000	2,676,000,000
	f Konsultan Supervisi Pembangunan Rumah		1	KK	1,480,720,000	1,480,720,000
	g Pembuatan Setifikat Rumah		892	KK	300,000	267,600,000

1.3 PENILAIAN KEBUTUHAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR PRASARANA LINGKUNGAN PASCABENCANA ERUPSI
GUNUNGAPI SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
1	Sektor Permukiman					
b	Sub Sektor Prasarana Lingkungan					
	Tahap II Relokasi Mandiri					
a	Perencanaan & Supervisi Prasarana Lingkungan	Kabanjahe, Smpang Empat, Tigapanah	1	Paket	2,201,721,361	2,201,721,361
	Penataan Lingkungan & Perbaikan Kualitas					
b	Lingkungan (Infrastruktur Dasar) Untuk 220 KK	Kabanjahe, Smpang Empat, Tigapanah	1	Paket	36,513,999,222	36,513,999,222
c	Penyambungan Daya Listrik Rumah		1,253	KK	3,000,000	3,759,000,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)					47,583,031,174
a	Jalan Lingkungan & Sarana Pendukung					
	1. Jalan Lingkungan (Paving Block)		1	Paket	9,484,499,376	9,484,499,376
	2. Saluran Type 1		1	Paket	2,553,753,461	2,553,753,461
	3. Saluran Type 2		1	Paket	4,305,510,255	4,305,510,255
	4. Saluran Type 3		1	Paket	7,327,423,255	7,327,423,255
	5. Pembuatan Gorong-gorong		1	Paket	729,196,202	729,196,202
b	Saluran Rumah Pemipaan		892	KK	1,500,000	1,338,000,000
c	IPAL Komunal		18	Unit	533,500,000	9,603,000,000
d	Persampahan		4	Unit	750,000,000	3,000,000,000
e	Penerangan Jalan Lingkungan (PJL)		9	Km	15,000,000	135,000,000
	Penataan Lingkungan & Perbaikan Kualitas					
f	Lingkungan					
	1. Penataan Lingkungan Tembok Penahan		1	Paket	5,584,277,119	5,584,277,119
	2. Perbaikan Kualitas Lingkungan		1	Paket	2,000,000,000	2,000,000,000
g	Konsultan Perencanaan Jalan lingkungan dan Sarana Pendukung		1	Paket	488,007,651	488,007,651
h	Konsultan Perencanaan IPAL Komunal		1	Paket	252,060,000	252,060,000
i	Konsultan Perencanaan Penerangan Jalan Lingkungan		1	Paket	10,000,000	10,000,000
j	Konsultan Perencanaan Penataan Lingkungan dan Perbaikan Kualitas Lingkungan		1	Paket	151,685,542	151,685,542
k	Konsultan Supervisi Perencanaan IPAL Komunal		1	Paket	378,090,000	378,090,000
l	Konsultan Supervisi Perencanaan Penerangan Jalan		1	Paket	15,000,000	15,000,000
m	Konsultan Supervisi Perencanaan Penataan Lingkungan dan Perbaikan Kualitas Jalan		1	Paket	227,528,314	227,528,314

1.4. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENDAMPINGAN/PEMBERDAYAAN PERMUKIMAN PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG
KABUPATEN KARO TAHUN 2018 - 2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
1	Sektor Permukiman					
	c Pendampingan Permukiman					7,539,800,000
	Tahap II Relokasi Mandiri Lanjutan					2,500,000,000
	Pendampingan Rehabilitasi & Rekontruksi	Kabanjahe, Sempang Empat, Tigapanah	1	Paket	2,500,000,000	2,500,000,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kavar)					5,039,800,000
	a Pendampingan Rehabilitasi & Rekontruksi	Merek, Tigapanah (Siosar)	1	Paket	5,039,800,000	5,039,800,000

2.1. REKAPITULASI PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SEKTOR INFRASTRUKTUR
PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2018-2019

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	6
2	Sektor Infrastruktur		393,610,000,000
	Tahap II (Relokasi Mandiri) Lanjutan		87,660,000,000
	a Sub Sektor Transfortasi	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah	83,600,000,000
	b Sub Sektor Energi		4,060,000,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)		305,950,000,000
	a Sub Sektor Transfortasi	Merek, Tigapanah (Siosar)	163,470,000,000
	b Sub Sektor Energi		3,230,000,000
	c Sub Sektor Air & Sanitasi		22,500,000,000
	d Sub Sektor Ruang Terbuka Hijau		116,750,000,000

2.2. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR TRANSPORTASI PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
2	Sektor Infrastruktur					
	a Sub Sektor Trasportasi					247,070,000,000
	Tahap II (Relokasi Mandiri) Lanjutan					
	Pembangunan Jembatan Pada Desa Nangbelawan Untuk Akses Relokasi Mandiri Tahap II	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah	12	Km	6,791,666,667	81,500,000,000
	Pembangunan Jalan dan Bangunan Pendukung Akses Relokasi Mandiri Tahap II		1	Unit	2,100,000,000	2,100,000,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)					
	Pembangunan Jalan dan Bangunan Pendukung Akses Nagara-Siosar	Merek, Tigapanah (Siosar)	8	Km	8,641,975,309	70,000,000,000
	Pembangunan Jalan dan Bangunan Pendukung Akses Sp. Pertibi Tembe-Pertibi Tembe Siosar		10	Km	8,231,578,947	78,200,000,000
	Pembangunan Jalan dan Bangunan Pendukung Pada Relokasi Tahap III		3	Km	5,000,000,000	5,000,000,000
	Pembangunan Jembatan Jembatan Relokasi Tahap III		4	Unit	2,067,500,000	8,270,000,000
	Konsultan Perencana		1	Paket	900,000,000	900,000,000
	Konsultan Supervisi		1	Paket	1,100,000,000	1,100,000,000

2.3. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR ENERGI PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG
KABUPATEN KARO TAHUN 2018 - 2019

No.	Sektor /Subsektor /Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan				Total Kebutuhan (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7=4*6	
2	Sektor Infrastruktur						
	b Sub Sektor Energi						
	Tahap II (Relokasi Mandiri) Lanjutan						
	a Pembangunan Jaringan Energi Listrik	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah	1	Paket	3,500,000,000	3,500,000,000	
	b Penerangan Jalan Utama		1	Paket	560,000,000	560,000,000	
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)						
	a Pembangunan Jaringan Energi Listrik	Merek, Tigapanah (Siosar)	1	Paket	1,980,000,000	1,980,000,000	
	b Penerangan Jalan Utama		75	Titik	2,000,000	150,000,000	
	c Pemasangan Lampu Jalan		1	Paket	1,100,000,000	1,100,000,000	

2.4. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR AIR & SANITASI PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG
KABUPATEN KARO - SUMATERA UTARA

No.	Sektor /Subsektor /Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
2	Sektor Infrastruktur					
	c Sub Sektor Air & Sanitasi					22,500,000,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)					22,500,000,000
	a Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Siosar	1	Unit	22,500,000,000	22,500,000,000

2.5. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR RUANG TERBUKA HIJAU PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
2	Sektor Infrastruktur					
	e Sub Sektor Ruang Terbuka Hijau					116,750,000,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)					116,750,000,000
	a Penataan Pertamanan & Sarana Umum	Merek, 25	25	Ha	3,000,000,000	75,000,000,000
	b Tempat Pembungan Sampah Akhir	Tigapanah	1	Unit	1,500,000,000	1,500,000,000
	c Tempat Pemakaman Umum	(Siosar)	7	Unit	5,750,000,000	40,250,000,000

3.1. REKAPITULASI PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SEKTOR SOSIAL PASCA ERUPSI
GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2018-2019

No	Sektor /Subsektor /Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	6
3	Sektor Sosial		90,866,390,000
	Tahap II Relokasi Mandiri Lanjutan		18,747,300,000
	a Sub Sektor Kesehatan	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah	1,017,900,000
	b Sub Sektor Pendidikan		8,800,000,000
	c Sub Sektor Agama		2,200,000,000
	d Sub Sektor Lembaga Sosial		6,729,400,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)		72,119,090,000
	a Sub Sektor Kesehatan	Merek, Tigapanah (Siosar)	8,526,850,000
	b Sub Sektor Pendidikan		35,508,340,000
	c Sub Sektor Agama		11,000,000,000
	d Sub Sektor Lembaga Sosial		14,283,900,000
	e Pendampingan/Pemberdayaan Sosial Masyarakat		2,800,000,000

3.2. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR KESEHATAN PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG
KABUPATEN KARO TAHUN 2018 - 2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
3	Sektor Sosial					
	a Sub Sektor Kesehatan					9,544,750,000
	Tahap II Relokasi Mandiri					1,017,900,000
	a Pembangunan PUSTU & Sarana Pendukung	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah	2	Unit	450,000,000	900,000,000
	b Pengadaan Alat Kesehatan PUSTU					
	1. Steteskop Untuk Dewasa		2	Unit	1,300,000	2,600,000
	2. Steteskop Untuk Pediatric		2	Unit	1,500,000	3,000,000
	3. Standar Infus		2	Unit	1,250,000	2,500,000
	4. Lampur Periksa		2	Unit	1,200,000	2,400,000
	5. Tempat Tidur Periksa		2	Unit	6,000,000	12,000,000
	6. Timbangan Bayi		2	Unit	650,000	1,300,000
	7. Timbangan Dewasa		2	Unit	350,000	700,000
	8. Matras		4	Unit	1,500,000	6,000,000
	9. Lemari Obat		2	Unit	8,500,000	17,000,000
	10. Lemari Alat		2	Unit	8,200,000	16,400,000
	11. Meja Instrumen /Alat		2	Unit	3,500,000	7,000,000
	12. Pispot (Urinal)		2	Unit	2,500,000	5,000,000
	13. Lemari Kecil Pasien		2	Unit	6,500,000	13,000,000
	14. Tempat Tidur Persalinan.		2	Unit	11,000,000	22,000,000
	15. Kursi Roda		2	Unit	3,500,000	7,000,000

TAHAP . . .

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)		1	Unit	5,500,000,000	8,526,850,000
	a Pembangunan Puskesmas & Sarana Pendukung		3	Unit	250,000,000	750,000,000
	b Pembangunan PUSTU Masing-masing Desa		4	Unit	400,000,000	1,600,000,000
	c Pengadaan Rumah Medis & Paramedis					
	d Pengadaan Alat Kesehatan PUSTU					
	1. Steteskop Untuk Dewasa	Merek, Tigapanah (Siosar)	3	Unit	1,300,000	3,900,000
	2. Steteskop Untuk Pediatric		3	Unit	1,500,000	4,500,000
	3. Standar Infus		3	Unit	1,250,000	3,750,000
	4. Lampur Periksa		3	Unit	1,200,000	3,600,000
	5. Tempat Tidur Periksa		3	Unit	6,000,000	18,000,000
	6. Timbangan Bayi		3	Unit	650,000	1,950,000
	7. Timbangan Dewasa		3	Unit	350,000	1,050,000
	8. Matras		6	Unit	1,500,000	9,000,000
	9. Lemari Obat		3	Unit	8,500,000	25,500,000
	10. Lemari Alat		3	Unit	8,200,000	24,600,000
	11. Meja Instrumen/Alat		3	Unit	3,500,000	10,500,000
	12. Pispot (Urinal)		3	Unit	2,500,000	7,500,000
	13. Lemari Kecil Pasien		3	Unit	6,500,000	19,500,000
	14. Tempat Tidur Persalinan.		3	Unit	11,000,000	33,000,000
	15. Kursi Roda		3	Unit	3,500,000	10,500,000
	e Pengadaan Transportasi Medis		1	Unit	500,000,000	500,000,000

3.3. PENILAIAN . . .

3.3. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR PENDIDIKAN PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG
KABUPATEN KARO

No.	Sektor / Subsektor / Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
3	Sektor Sosial					
	b Sub Sektor Pendidikan					
	Tahap II Relokasi Mandiri					
	a Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah				
	USB PAUD		2	Unit	1,500,000,000	3,000,000,000
	USB SD		2	Unit	1,900,000,000	3,800,000,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru					
	SDN Surbakti		2	Ruang	230,000,000	460,000,000
	Rehabilitasi Gedung					
	Gedung SDN Perteguhen		3	Ruang	70,000,000	210,000,000
	Atap SDN Surbakti		11	Ruang	70,000,000	770,000,000
	Atap SMP Negeri 2 Simpang Empat		8	Ruang	70,000,000	560,000,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)					35,508,340,000
	a Pembangunan Perpustakaan Sekolah & Sarana Pendukung	Merek, Tigapanah (Siosar)	1	Unit	856,000,000	856,000,000
	Program Bea Siswa Berprestasi		1	Paket	11,530,000,000	11,530,000,000
	Program Peningkatan SDM Guru/Pendidik		1	Paket	150,000,000	150,000,000
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)					
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		1	Unit	1,500,000,000	1,500,000,000
	Sekolah Dasar (SD)		2	Unit	3,300,000,000	6,600,000,000
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)		1	Unit	2,500,000,000	2,500,000,000
	Pengadaan Sarana & Prasarana Sekolah					
	Pengadaan Sarana & Prasarana PAUD		1	Paket	2,000,000,000	2,000,000,000
	Pengadaan Sarana & Prasarana SD		1	Paket	3,275,600,000	3,275,600,000
	Pengadaan Sarana & Prasarana SMP		1	Paket	2,353,400,000	2,353,400,000
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa		3	Paket	400,000,000	1,200,000,000
	Program Peningkatan SDM Guru/Pendidik		1	Paket	1,500,000,000	1,500,000,000
	Troumahelling		1	Paket	700,000,000	700,000,000
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah & Sarana Pendukung		1	Unit	450,000,000	450,000,000
	Konsultan Perencanaan		1	Paket	382,860,000	382,860,000
	Konsultan Supervisi		1	Paket	510,480,000	510,480,000

3.4. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR AGAMA PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG
KABUPATEN KARO TAHUN 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
3	Sektor Sosial					
	c Sub Sektor Agama					13,200,000,000
	Tahap II Relokasi Mandiri					2,200,000,000
	a Mesjid & Sarana Pendukung	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah	1	Unit	1,100,000,000	1,100,000,000
	b Program Peningkatan SDM Keagamaan		1	Paket	1,100,000,000	1,100,000,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)					11,000,000,000
	a Mesjid & Sarana Pendukung		1	Unit	1,100,000,000	1,100,000,000
	b Gereja & Sarana Pendukung					
	Gereja GBKP & Sarana Pendukung	Merek, Tigapanah (Siosar)	3	Unit	1,100,000,000	3,300,000,000
	Gereja Katolik & Sarana Pendukung		3	Unit	1,100,000,000	3,300,000,000
	Gereja Penthakosta & Sarana Pendukung		2	Unit	1,100,000,000	2,200,000,000
	c Program Peningkatan SDM Keagamaan		1	Paket	1,100,000,000	1,100,000,000

3.5. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR LEMBAGA SOSIAL PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG
KABUPATEN KARO TAHUN 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
3	Sektor Sosial					
	d Sub Sektor Lembaga Sosial					21,013,300,000
	Tahap II Relokasi Mandiri					6,729,400,000
	a Pembentukan & Pembinaan Kelompok Sanggar Seni & Budaya		1	Paket	1,000,000,000	1,000,000,000
	b Program KKS,KIS, KIP & PKH		1	Paket	5,729,400,000	5,729,400,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)					14,283,900,000
	a Bantuan Penyediaan Jadup Atau Isian Rumah		1	Paket	4,954,500,000	4,954,500,000
	b Psikososial		1	Paket	600,000,000	600,000,000
	c Perpustakaan Desa & Sarana Pendukung	Merek, Tigapanah (Siosar)	2	Paket	1,000,000,000	2,000,000,000
	d Pembentukan & Pembinaan Kelompok Sanggar Seni & Budaya		1	Paket	1,000,000,000	1,000,000,000
	e Program KKS, KIS, KIP & PKH		1	Paket	5,729,400,000	5,729,400,000

3.6. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2018 - 2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
3	Sektor Sosial					
	e Pendampingan/ Pemberdayaan Sosial Masyarakat					2,800,000,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)					2,800,000,000
	a Pendampingan Sektor Sosial					
		Merek,	4	Paket	700,000,000	2,800,000,000
		Tigapanah (Siosar)				

4.1. REKAPITULASI PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SEKTOR EKONOMI
PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2018-2019

No	Sektor /Subsektor /Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	6
4	Sektor Ekonomi		268,942,457,055
	Tahap II Relokasi Mandiri Lanjutan		21,670,014,450
	a Sub Sektor Pertanian	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah	15,832,214,450
	b Sub Sektor Peternakan		3,487,800,000
	c Sub Sektor Koperasi & UKM		2,350,000,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)		143,481,867,605
	a Sub Sektor Pertanian	Merek, Tigapanah (Siosar)	111,516,867,605
	b Sub Sektor Peternakan		3,365,000,000
	c Sub Sektor Koperasi & UKM		8,100,000,000
	d Sub Sektor Pariwisata		9,750,000,000
	e Pendampingan /Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		10,750,000,000
	Non Relokasi		103,790,575,000
	a Sub Sektor Pertanian	Namanteran, Merdeka,	103,610,575,000
	b Sub Sektor Peternakan		180,000,000

4.2. PENILAIAN . . .

4.2. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR PERTANIAN PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG
KABUPATEN KARO TAHUN 2018 - 2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
4	Sektor Ekonomi					
	a Sub Sektor Pertanian					230,959,657,055
	Tahap II Relokasi Mandiri					15,832,214,450
	a Verifikasi & Validasi Penerima Bantuan Pertanian	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah, Merdeka, Namanteran.	1	Paket	200,000,000	200,000,000
	b Pengadaan Pupuk & Saprodi		1	Paket	10,596,575,000	10,596,575,000
	c Pengadaan Bibit Tanaman dan Pupuk		1	Paket	1,297,660,000	1,297,660,000
	d Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah.	1	Paket	3,487,479,450	3,487,479,450
	e Bintek Penerapan Teknologi Pertanian Bagi Petani		3	Unit	50,000,000	150,000,000
	f Verifikasi & Validasi Penerima Bantuan Pertanian		670	OH	150,000	100,500,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)					111,516,867,605
	a Penyiapan & Pengolahan Lahan Pertanian		1,038	KK	20,000,000	20,760,000,000
	b Pengadaan Benih Pertanian		1,038	KK	650,000	674,700,000
	c Pengadaan Pupuk & Saprodi		1,038	KK	1,000,000	1,038,000,000
	d Pengadaan Supras Pertanian		1,038	KK	2,400,000	2,491,200,000
	e Bimtek Dan Penyuluhan Pertanian		4	Paket	50,000,000	200,000,000
	f Pembangunan Embung		5	Paket	1,000,000,000	5,000,000,000
	g Peningkatan & Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		1	Paket	1,200,000,000	1,200,000,000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Pekebunan Khusus					
	h Kawasan Terdampak Erupsi Sinabung		1	Paket	35,211,967,605	35,211,967,605
	i Pengembangan Jalan Usaha Tani		30	Km	600,000,000	18,000,000,000
	j Pengadaan Alsintan	Merek, Tigapanah (Siosar)				
	- TR 2 Rotari		74	Unit	43,000,000	3,182,000,000
	- Cultivator		101	Unit	18,000,000	1,818,000,000
	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat					
	- Sapi		96	Ekor	19,000,000	1,824,000,000
	- Kandang Sapi		12	Unit	36,480,000	437,760,000
	- Obat-obatan Sapi		1	Paket	29,352,000	29,352,000
	- Perluasan Hijauan Pakan Ternak		24	Ha	10,000,000	240,000,000
	- Kambing		240	Ekor	2,000,000	480,000,000
	- Kandang Kambing		20	Unit	20,000,000	400,000,000
	- Obat-obatan Kambing		1	Paket	49,888,000	49,888,000

1. Bintek . . .

1	2	3	4	5	6	7=4*6
l	Bintek Penerapan Teknologi Pertanian Bagi Petani	Merek, Tigapanah (Siosar)	4	Pertemuan	50,000,000	200,000,000
m	Bintek Teknologi Peternakan		4	Pertemuan	45,000,000	180,000,000
n	Jalan Usaha Tani					
	- Jasa Konsultan Perencanaan		1	Paket	386,000,000	386,000,000
	- Jasa Konsultan Pengawas		1	Paket	464,000,000	464,000,000
	- Biaya Umum		1	Paket	150,000,000	150,000,000
	- Peningkatan Jalan Usaha Tani		30	Paket	570,000,000	17,100,000,000
	Non Relokasi					103,610,575,000
a	Pengolahan Lahan Pertanian	Namanteran, Merdeka, Tiganderket, Payung	12,000	KK	5,000,000	60,000,000,000
b	Pengadaan Bibit Pertanian		12,000	KK	350,000	4,200,000,000
c	Pengadaan Pupuk dan Saprodi		12,000	KK	500,000	6,000,000,000
d	Pengadaan Sarpras Pertanian		12,000	KK	1,000,000	12,000,000,000
f	Peningkatan & Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		1	Paket	3,000,000,000	3,000,000,000
g	Bimtek Dan Penyuluhan Pertanian		10	Paket	50,000,000	500,000,000
h	Belanja Pupuk Kompos		140,085	Zak	125,000	17,510,625,000
i	Bintek Penerapan Teknologi Pertanian Bagi Petani		4	Pertemuan	50,000,000	200,000,000
j	Verifikasi dan Validasi Penerimaan Bantuan Pertanian		1,333	OH	150,000	199,950,000

4.3. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR PETERNAKAN PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO
TAHUN 2018 - 2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
4	Sektor Ekonomi					
	b Sub Sektor Peternakan					7,032,800,000
	Tahap II Relokasi Mandiri Lanjutan					
	a Pengadaan Bibit Peternakan Unggas	Kabangjahe, Simpang Empat, Tigapanah	1	Paket	1,162,800,000	1,162,800,000
	b Peningkatan Produksi Peternakan Unggas		40	Paket	12,000,000	480,000,000
	Pengadaan Kandang Ternak Unggas		40	Paket	45,000,000	1,800,000,000
	Pakan & Obat - Obat Ternak Unggas		1	Paket	45,000,000	45,000,000
	c Bimtek Dan Penyuluhan Peternakan Unggas					
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)					
	a Pengadaan Bibit Ternak Domba & Sapi	Merek, Tigapanah (Siosar)	1	Paket	2,200,000,000	3,365,000,000
	b Peningkatan Produksi Peternakan Domba & Sapi					2,200,000,000
	Pengadaan Kandang Peternakan		1	Paket	700,000,000	700,000,000
	Perluasan Hijauan Pakan Ternak		1	Paket	420,000,000	420,000,000
	c Bimtek Dan Penyuluhan Peternakan Domba & Sapi		1	Paket	45,000,000	45,000,000
	Non Relokasi					
	a Bimtek Dan Penyuluhan Peternakan	Namanteran, Merdeka, Tiganderket, Payung	4	Paket	45,000,000	180,000,000
						180,000,000

4.4. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR KOPERASI & UKM PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG
KABUPATEN KARO TAHUN 2018 - 2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
4	Sektor Ekonomi					
	Tahap II Relokasi Mandiri Lanjutan					2,350,000,000
	a Pembinaan Industri Kecil Menengah	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah	1	Paket	350,000,000	350,000,000
	b Pembinaan Koperasi & UKM		5	Paket	50,000,000	250,000,000
	c Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama		1	Paket	1,500,000,000	1,500,000,000
	d Peningkatan Produktifitas Koperasi & UKM		5	Paket	50,000,000	250,000,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)					8,100,000,000
	a Pembentukan Serta Pembinaan Koperasi & UKM	Merek, Tigapanah (Siosar)	4	Paket	50,000,000	200,000,000
	b Pelatihan Usaha Kecil Menengah		4	Paket	375,000,000	1,500,000,000
	c Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama		1	Paket	1,500,000,000	1,500,000,000
	d Peningkatan Produktifitas Koperasi & UKM		6	Paket	400,000,000	2,400,000,000
	e Pengadaan Pasar Tradisional & Sarana Pendukung		1	Paket	2,500,000,000	2,500,000,000

4.5. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR PARIWISATA PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG
KABUPATEN KARO TAHUN 2018 - 2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
4	Sektor Ekonomi					
	d Sub Sektor Pariwisata					9,750,000,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)					9,750,000,000
	a Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Siosar	Merek, Tigapanah (Siosar)	1	Paket	700,000,000	700,000,000
	b Pengadaan Museum Gunungapi Sinabung & Sarana Pendukung		1	Paket	5,300,000,000	5,300,000,000
	c Sosialisasi & Promosi Wisata Karo		1	Paket	3,000,000,000	3,000,000,000
	d Sosialisasi Sadar Wisata		1	Paket	750,000,000	750,000,000

4.6. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENDAMPINGAN/PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2018 - 2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
4	Sektor Ekonomi					
	e Sub Sektor Pendampingan/Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat					10,750,000,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)					10,750,000,000
	a Pendampingan/Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Merek, Tigapanah (Siosar)	4	Paket	2,500,000,000	10,000,000,000
	b Verifikasi & Validasi Data Penerima Manfaat		1	Paket	750,000,000	750,000,000

5.1. REKAPITULASI PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI LINTAS SEKTOR
KABUPATEN KARO PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG TAHUN 2018-2019

No	Sektor /Subsektor /Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	6
5	Lintas Sektor		52,218,900,000
	Tahap II Relokasi Mandiri Lanjutan		5,345,000,000
	a Sub Sektor Pemerintahan	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah	1,020,000,000
	a Sub Sektor Lingkungan Hidup & Kehutanan		3,750,000,000
	b Sub Sektor Pengurangan Resiko Bencana		575,000,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kwar)		46,873,900,000
	a Sub Sektor Pemerintahan	Merek, Tigapanah (Siosar)	31,898,900,000
	b Sub Sektor Lingkungan Hidup & Kehutanan		4,750,000,000
	c Sub Sektor Pengurangan Resiko Bencana		5,225,000,000
	d Sub Sektor Perencanaan & Tata Ruang		5,000,000,000

5.2. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR PEMERINTAHAN PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
5	Lintas Sektor					
	a Sub Sektor Pemerintahan					
	Tahap II Relokasi Mandiri Lanjutan					32,918,900,000
	a Pembangunan Gapura Desa	Kabajahe, Simpang Empat, Tigapanah	18	Unit	40,000,000	720,000,000
	b Penataan Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil		1	Paket	300,000,000	300,000,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)					31,898,900,000
	a Pembangunan Kantor & Prasarana Pendukung					
	Kantor Kepala Desa		3	Unit	310,000,000	930,000,000
	Pos Babinsa		1	Unit	350,000,000	350,000,000
	Pos Polmas		1	Unit	350,000,000	350,000,000
	b Jambur Desa & Prasarana Pendukung		3	Unit	1,035,000,000	3,105,000,000
	d Pembangunan Gapura Desa		3	Unit	40,000,000	120,000,000
	e Pembangunan Gedung Olah Raga & Sarana Pendukung		1	Paket	25,000,000,000	25,000,000,000
	f Penataan Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil		1	Paket	300,000,000	300,000,000
	g Pembangunan Balai Desa		3	Paket	450,000,000	1,350,000,000
	h Konsultan Perencana		1	Paket	168,900,000	168,900,000
	i Konsultan Supervisi		1	Paket	225,000,000	225,000,000

5.3. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG
KABUPATEN KARO TAHUN 2018 - 2019

No.	Sektor / Subsektor / Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
1	Lintas Sektor					
	b Sub Sektor Lingkungan Hidup & Kehutanan					8,500,000,000
	Tahap II Relokasi Mandiri Lanjutan					3,750,000,000
	a Pengadaan Bibit Kayu & MPTS	Kabanjahe, Simpang Empat, Tigapanah	500,000	Btg	7,500	3,750,000,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)					4,750,000,000
	a Reboisasi & Penghijauan	Merek, Tigapanah	100	Ha	10,000,000	1,000,000,000
	b Pengadaan Bibit Kayu & MPTS	(Siosar)	500,000	Btg	7,500	3,750,000,000

5.4. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR PENGURANGAN RESIKO BENCANA PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG
KABUPATEN KARO TAHUN 2018 - 2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
1	Lintas Sektor					
c	Sub Sektor Pengurangan Resiko Bencana					
	Tahap II Relokasi Mandiri Lanjutan					5,800,000,000
	a Desa Tangguh Siaga Bencana	Lingkar Sinabung	1	Paket	575,000,000	575,000,000
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)					5,225,000,000
	a Penyusunan PRB Daerah	Kabupaten Karo	1	Paket	1,000,000,000	1,000,000,000
	b Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Erupsi Sinabung	Kabupaten Karo	1	Paket	1,200,000,000	1,200,000,000
	c Desa Tangguh Siaga Bencana	Kabupaten Karo	1	Paket	575,000,000	575,000,000
	d Pembuatan Buku Kebencanaan	Kabupaten Karo	1	Paket	250,000,000	250,000,000
	e Pengadaan Radio Komunikasi Handy Talky (HT)	Kabupaten Karo	100	Unit	1,500,000	150,000,000
	f Pembangunan Tower Repieter	Kabupaten Karo	4	Unit	12,500,000	50,000,000
	g Pengadaan Perangkat Call Centre 112	Kabupaten Karo	1	Paket	800,000,000	800,000,000
	h Pembuatan Film Dokumenter Bencana Gunung Sinabung	Kabupaten Karo	1	Paket	1,200,000,000	1,200,000,000

5.5. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR PERENCANAAN & TATA RUANG PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG
KABUPATEN KARO TAHUN 2018-2019

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan			
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4*6
1	Lintas Sektor					
	d Sub Sektor Perencanaan & Tata Ruang					
	Tahap III Relokasi Siosar (Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar)					5,000,000,000
	a Perencanaan Tata Ruang Gunung Sinabung					5,000,000,000
	Pengelolaan Peta Rawan Bencana	Merek, Tigapanah (Siosar)	1	Paket	3,000,000,000	3,000,000,000
	Penataan Ruang Berbasis PRB		1	Paket	2,000,000,000	2,000,000,000

Σ. BUPATI KARO


TERKELIN BRAHMA